



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah berperan dalam menentukan arah dan sasaran pembangunan daerah sehingga tercipta berkehidupan masyarakat yang maju dan berkelanjutan;
- b. bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah merupakan kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah yang bersifat aspiratif terhadap kehendak masyarakat Kabupaten Kolaka yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah;
- c. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2005-2025 segera berakhir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huru b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 – 2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Pemalang yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2045 yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten / kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJP Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis
 - d. BAB IV : Visi dan Misi Daerah
 - e. BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok
 - f. BAB VI : Penutup.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Bupati.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJM Nasional.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi RPJPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal

BUPATI PEMALANG,

MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

HERIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang disusun berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJP Nasional, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Pemalang. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, dan arahan secara garis besar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya. Pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya. Dalam dua puluh tahun mendatang sangat penting dan mendesak bagi masyarakat Kabupaten Pemalang untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di tingkat regional dan nasional. Kurun waktu RPJP Daerah adalah 20 (duapuluh) tahun. Pelaksanaan RPJP Daerah terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam tiap-tiap tahap RPJPD yaitu : RPJPD tahap pertama, RPJPD tahap kedua, RPJPD tahap ketiga, dan RPJPD tahap keempat. RPJPD Kabupaten Pemalang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD. Dalam penyusunan RPJMD sesuai dengan visi, misi dan program Bupati terpilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, serta kebijakan keuangan daerah

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 adalah untuk: a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian kebijakan umum daerah, b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkelanjutan dan e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Perencanaan jangka panjang lebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitikberatkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis, individu pemikir-pemikir visioner serta unsur-unsur penyelenggara negara yang memiliki kompetensi olah pikir rasional dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai subyek maupun tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan.

RPJPD harus disusun dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi Daerah. Selanjutnya RPJPD dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD. RPJMD merupakan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2025-2045

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan menguraikan latar belakang Kabupaten Pemalang dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045. Informasi yang dipaparkan memberikan dasar bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menyusun dokumen RPJPD Tahun 2025-2045. Bab ini juga meninjau dasar perancangan RPJPD yang terdiri atas dasar hukum, hubungan antar dokumen RPJPD Kabupaten Pemalang dengan dokumen lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dokumen RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045.

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di jalur Pantai Utara (Pantura), berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Pekalongan di sebelah timur, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas di sebelah selatan, serta Kabupaten Tegal di sebelah barat, dengan luas daratan 1.115,30 Km² atau ±3,31 persen dari luas Jawa Tengah. Secara administrasi Kabupaten Pemalang memiliki 14 kecamatan, 212 desa, dan 11 kelurahan.

Kabupaten Pemalang saat ini mengalami berbagai perkembangan dalam sektor pertanian, perdagangan, dan industri. Keberagaman budaya masyarakat Pemalang, yang terdiri dari berbagai suku dan etnis, juga memberikan warna tersendiri dalam sejarahnya. Dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan upaya pembangunan, Kabupaten Pemalang terus menjaga warisan sejarahnya sambil bertransformasi menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial yang lebih modern. Melalui perubahan-perubahan yang ada, Kabupaten Pemalang perlu untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat juga sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat. Perencanaan dan perumusan kebijakan perlu dituangkan dalam perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan arah dan fokus pembangunan sehingga mampu menciptakan perencanaan pembangunan yang baik dan mampu menjadi pedoman dalam mengatur strategi pembangunan Kabupaten Pemalang.

Dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Pemalang berupa Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Pemalang yang disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005–2025 yang akan memasuki periode baru melalui dokumen RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045. Rencana penyusunan dokumen ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 18 yang menyebutkan bahwa penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD Periode sebelumnya berakhir. Penyusunan dokumen RPJPD ini bertujuan untuk menghadirkan acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah 20 tahun mendatang. Dokumen ini pada intinya memuat arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah. Secara teknis, RPJPD sebagai dokumen perencanaan jangka panjang dua puluh tahun harus disusun berdasarkan rekomendasi yang tertuang di dalam Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 serta memedomani dan memerhatikan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Sistem Perencanaan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan. Rencana Pembangunan ini memiliki jangka waktu yang terbagi ke dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh semua unsur penyelenggara negara baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan melibatkan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pelaksanaan KLHS bersifat wajib salah satunya dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penyusunan dan penetapan RPJPD harus dilengkapi dengan rekomendasi hasil KLHS yang memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

Perencanaan ini diharapkan dapat mewujudkan akselerasi pembangunan daerah melalui upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mengakomodir masukan dari masyarakat sehingga perumusan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok Kabupaten Pemalang dalam dua puluh tahun ke depan dapat diwujudkan dalam bentuk dokumen RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

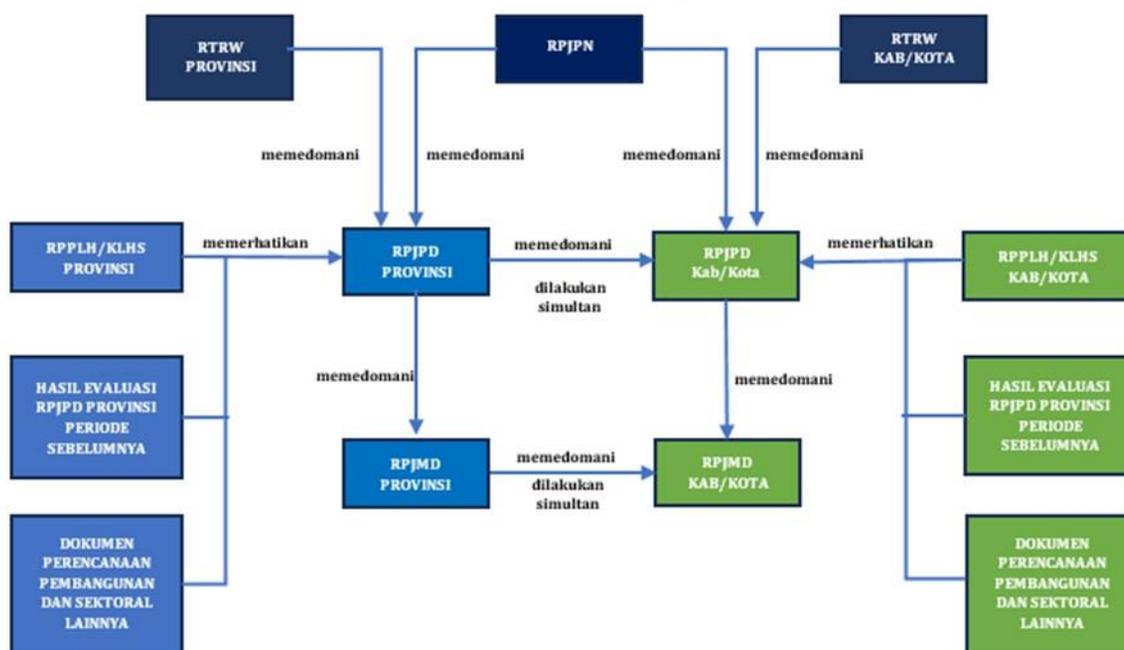
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Undang-Undang Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor...., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.....);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

- Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi – Pemalang Tahun 2016 - 2036 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2050 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 9);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang; (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 13);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus saling terintegrasi dan sinergis dengan perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 perlu diselaraskan dengan dokumen-dokumen Provinsi dan Nasional agar menghasilkan dokumen yang sinergis dan terpadu. Sistem perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 memiliki keterkaitan dan integrasi dengan beberapa dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti RTRW, KLHS hingga RPJPD wilayah sekitar. Hal ini disebabkan adanya hubungan dan keterkaitan yang erat antardokumen perencanaan. Secara ringkas dokumen RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD. Keterkaitan antara dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar I.1 berikut.



Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN

Gambar I.1

Hubungan antara RPJPD Kabupaten Pemalang dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

a. Hubungan Antara RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

RPJPD perlu memedomani RPJPN agar terjadi sinergitas dan sinkronisasi kebijakan yang berkaitan langsung dengan wilayah Pemalang. Dari sisi prioritas pembangunan daerah, sinkronisasi kebijakan dapat didasarkan kepada isu-isu dan strategi pembangunan nasional. Dengan demikian, penyusunan RPJPD Pemalang Tahun 2025-2045 perlu memerhatikan RPJPN tahun 2025-2045 melalui Penyelarasan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan.

b. Hubungan Antara RPJPD dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah

RPJPD Kabupaten Pemalang perlu memedomani RPJPD Provinsi Jawa Tengah untuk sinergitas dan sinkronisasi kebijakan dan prioritas pembangunan. Sementara, prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan isu-isu dan strategi pembangunan Provinsi Jawa Tengah demi terciptanya sinkronisasi kebijakan. Selain itu, perlu juga upaya untuk memastikan dukungan pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJPD provinsi dan RPJPN.

c. Hubungan Antara RPJPD dan RTRW Kabupaten Pemalang

Penyusunan RPJPD Kabupaten Pemalang harus memerhatikan RTRW Kabupaten Pemalang. Hal ini mengingat strategi dan kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Pemalang dalam RPJPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RTRW. Fungsi dari RTRW adalah sebagai pedoman dalam memerhatikan dan menentukan lokasi/lokus pembangunan daerah berdasarkan potensi wilayahnya. Hal ini sejalan dengan skema perencanaan pembangunan yang berdimensi kewilayahan yaitu harus memerhatikan pentingnya pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih atau strategis. Penilaian ini harus didasarkan kepada perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu yang memerhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

d. Hubungan Antara RPJPD dan KLHS RPJPD Kabupaten Pemalang

Dokumen KLHS merupakan salah satu dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 adalah untuk menghadirkan arahan dan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita cita dan tujuan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan sesuai dengan visi,

misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama. Dari upaya ini diharapkan seluruh usaha yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan dapat bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya sehingga dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menjaga arah kebijakan pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang selama kurun waktu tahun 2025-2045;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah jangka panjang antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat;
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah lima tahunan yang dituangkan dalam RPJMD dan perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam RKPD.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Pemalang sebagai salah satu pertimbangan perumusan kebijakan RPJPD yang meliputi: aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan sosial dan budaya, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2005-2025 serta mencantumkan tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, serta pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini menjelaskan permasalahan dan isu strategis daerah. Permasalahan memuat pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Isu strategis memuat kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Bab ini menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi daerah yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah yaitu selama 20 (dua puluh) tahun ke depan.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Bab ini memuat usaha dan upaya yang harus dilakukan dalam mencapai arah kebijakan dan sasaran pokok dari setiap strategi terpilih. Narasi yang disampaikan menguraikan arah, tahapan dan prioritas pembangunan daerah. Tahapan pembangunan yang dimaksud adalah tahapan rencana lima tahunan yang membagi RPJPD menjadi 4 (empat) RPJMD secara berkesinambungan. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 memuat Arah Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan Daerah yang keseluruhannya sesuai dengan karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah.

BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pemerintah Kabupaten Pemalang berupaya merumuskan berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang valid dan relevan untuk perwujudan pembangunan Kabupaten Pemalang yang lebih baik. Salah satu poin penting dalam perumusan kebijakan pembangunan adalah ditelaahnya berbagai data dan informasi pembangunan yang merupakan salah satu komoditi utama dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah agar terjaga relevansi antara kebijakan pembangunan dengan permasalahan yang ingin dihadapi. Ketepatan sasaran dalam memilih kebijakan yang akan dilaksanakan selama periode pembangunan jangka panjang harus terimplementasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sebagai acuan perumusan kebijakan pembangunan maka disusunlah gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Pemalang.

Gambaran umum Kabupaten Pemalang berisikan gambaran kondisi eksisting pembangunan Kabupaten Pemalang dari berbagai aspek sekaligus catatan evaluasi pembangunan jangka panjang periode sebelumnya. Selain itu, dirumuskan juga proyeksi penduduk sebagai subyek maupun obyek pembangunan termasuk kebutuhan sarana dan prasarana pembangunan sebagai pendukung aktivitas masyarakat. Terakhir, disusun pula potensi pengembangan pusat pertumbuhan wilayah yang merujuk pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pemalang sebagai salah satu poin penting pembangunan berbasis kewilayahan.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dalam perencanaan pembangunan daerah memiliki sisi strategis utamanya dalam memberikan dukungan baik langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Penjabaran aspek geografi akan memberikan gambaran utuh bagaimana karakteristik wilayah Kabupaten Pemalang baik dalam kaitannya dengan luas dan batasan wilayah, letak geografis, topografi, geologi, hidrologi hingga klimatologi wilayah.

Analisis aspek demografi dalam pembangunan Kabupaten Pemalang akan memberikan ukuran, struktur, maupun distribusi/persebaran penduduk baik secara series maupun kewilayahan. Analisis aspek demografi ini menjadi penting mengingat pelaksana utama pembangunan sekaligus obyek pembangunan adalah penduduk, sehingga keterkaitan antara demografi dengan aspek-aspek lain akan menjadi perlu untuk diperhatikan secara seksama.

2.1.1 Geografi

Aspek geografi menjelaskan peran strategis karakteristik wilayah, potensi sumber daya alam serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim.

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

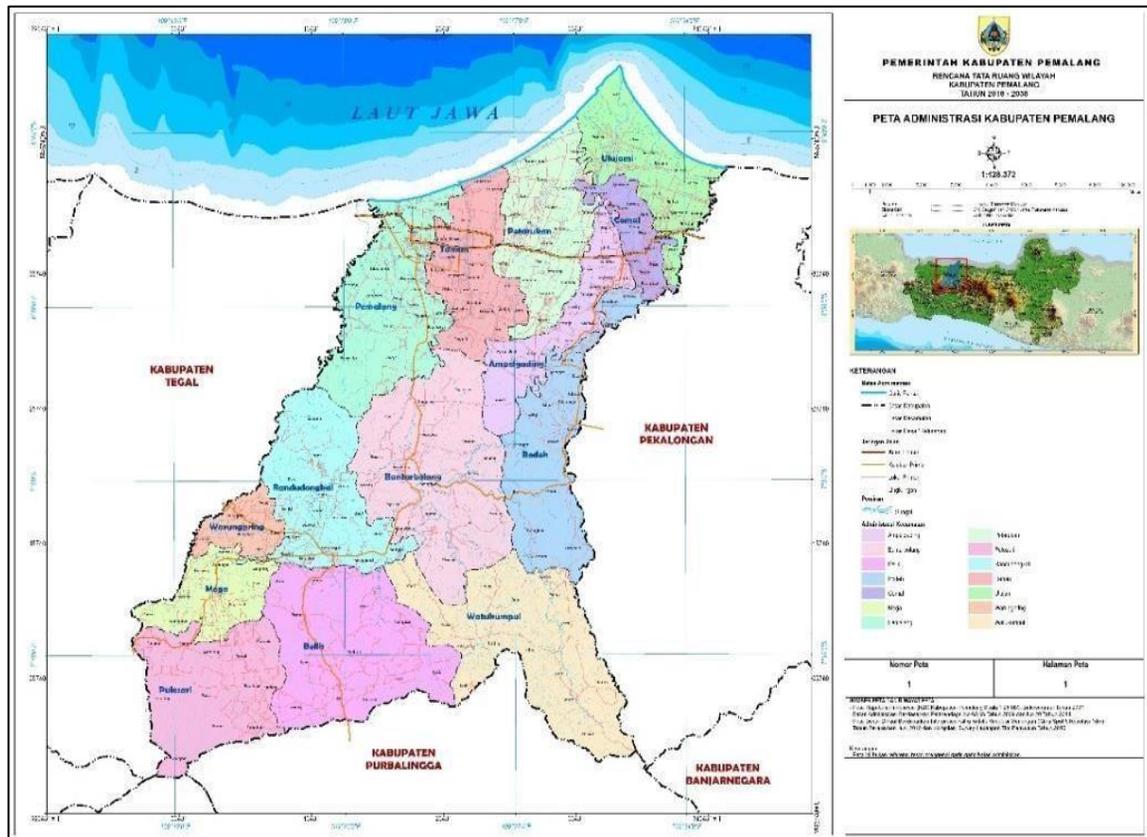
Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di jalur Pantai Utara (Pantura), dengan batas wilayah administratif sebagai berikut:

Tabel II.1
Batas Wilayah Administratif Kabupaten Pemalang

No	Batas Wilayah	Kabupaten Lain/Laut	Kecamatan yang Berbatasan
1	Sebelah Utara	Laut Jawa	Pemalang, Taman, Petarukan, Ulujami
2	Sebelah Timur	Kabupaten Pekalongan	Ulujami, Comal, Bodeh, Watukumpul
3	Sebelah Selatan	Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas	Watukumpul, Belik, Pulosari
4	Sebelah Barat	Kabupaten Tegal	Pemalang, Randudongkal, Warungpring, Moga, Pulosari

Sumber: Kabupaten Pemalang Dalam Angka 2023, BPS

Kabupaten Pemalang terdiri dari 14 kecamatan dan 223 kelurahan/desa, dengan luas 1.115,30 Km². Keempat belas kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Moga, Warungpring, Pulosari, Belik, Watukumpul, Bodeh, Bantarbolang, Randudongkal, Pemalang, Taman, Petarukan, Ampelgading, Comal, dan Ulujami.



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang tahun 2018 – 2038

Gambar II.1
Peta Administratif Wilayah Kabupaten Pemalang

Kecamatan yang memiliki wilayah administratif paling luas adalah Bantarbolang yaitu 139,19 Km² (12,48%) sedangkan yang paling sempit adalah Warungpring yaitu seluas 26,31 Km² (2,36%), sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel II.2
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pemalang (km²)
Tahun 2022

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase terhadap Luas Kabupaten (%)
1.	Moga	Moga	41,40	3,71
2.	Warungpring	Warungpring	26,31	2,36
3.	Pulosari	Pulosari	87,52	7,85
4.	Belik	Belik	124,54	11,17
5.	Watukumpul	Watukumpul	129,02	11,57
6.	Bodeh	Jraganan	85,98	7,71
7.	Bantarbolang	Bantarbolang	139,19	12,48
8.	Randudongkal	Randudongkal	90,32	8,10
9.	Pemalang	Saradan	101,93	9,14
10.	Taman	Banjardawa	67,41	6,04
11.	Petarukan	Petarukan	81,29	7,29
12.	Ampelgading	Ampelgading	53,30	4,78
13.	Comal	Purwoharjo	26,54	2,38
14.	Ulujami	Rowosari	60,55	5,43
Kabupaten Pemalang			1.115,30	100,00

Sumber: Kabupaten Pemalang Dalam Angka 2023, BPS

2. Letak Astronomis

Secara astronomis Kabupaten Pemalang terletak pada pada 109° 11' 13.452" – 109° 35' 45.969" Bujur Timur (BT) dan 6° 46' 22.17" – 7° 14' 55.879" Lintang Selatan (LS). Letak Kabupaten Pemalang terbilang strategis karena berada di jalur perekonomian utama di Indonesia, yaitu jalur Pantura Jawa. Luas Kabupaten Pemalang membentang dari pesisir, dataran rendah, perbukitan sampai pegunungan.

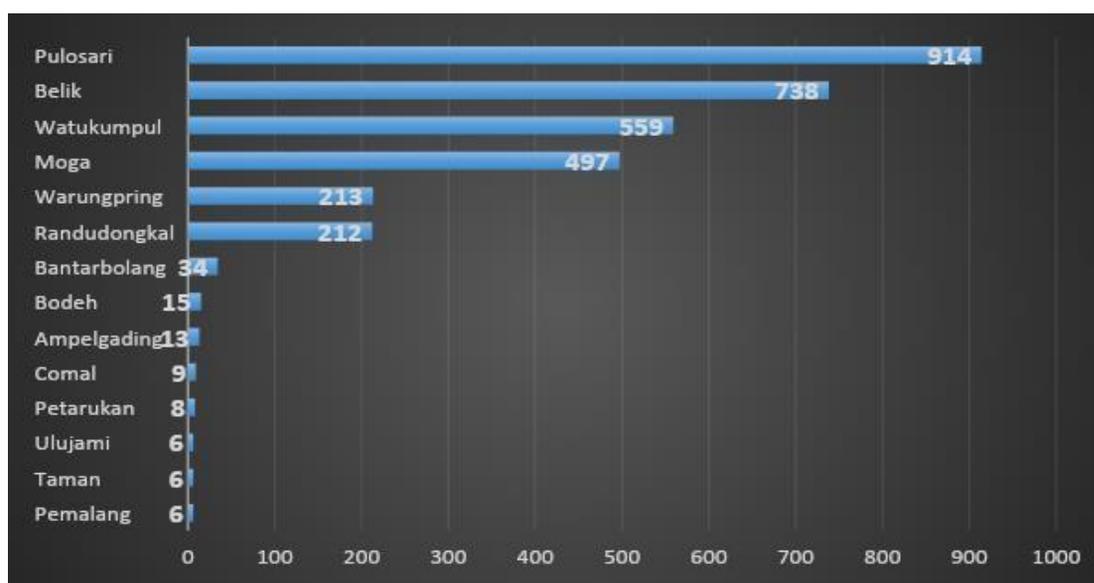
3. Topografi

Secara topografis, Kabupaten Pemalang memiliki keunikan wilayah, yang dapat dikelompokkan menjadi empat (4) kategori, yaitu daerah dataran pantai; daerah dataran rendah; daerah dataran tinggi dan daerah pegunungan:

- Daerah dataran pantai: daerah ini memiliki ketinggian rata-rata antara 1-5 meter di atas permukaan air laut (mdpl); meliputi 17 desa dan 1 kelurahan yang terletak di bagian utara yang termasuk kawasan pantai.
- Daerah dataran rendah: daerah ini memiliki ketinggian rata-rata antara 6-15 mdpl yang meliputi 69 desa dan 10 kelurahan di bagian selatan dari wilayah pantai.
- Daerah dataran tinggi: daerah ini memiliki ketinggian rata-rata antara 16-212 mdpl yang meliputi 76 desa, terletak di bagian tengah dan selatan.

- Daerah pegunungan: terbagi menjadi dua, yaitu:
 - Daerah dengan ketinggian antara 213 – 924 mdpl, meliputi 39 desa yang terletak dibagian selatan.
 - Daerah berketinggian 925 mdpl yang terletak di bagian selatan. Daerah ini meliputi 10 desa dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Purbalingga.

Secara rinci ketinggian wilayah tiap kecamatan di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: Pemalang Dalam Angka 2023, BPS

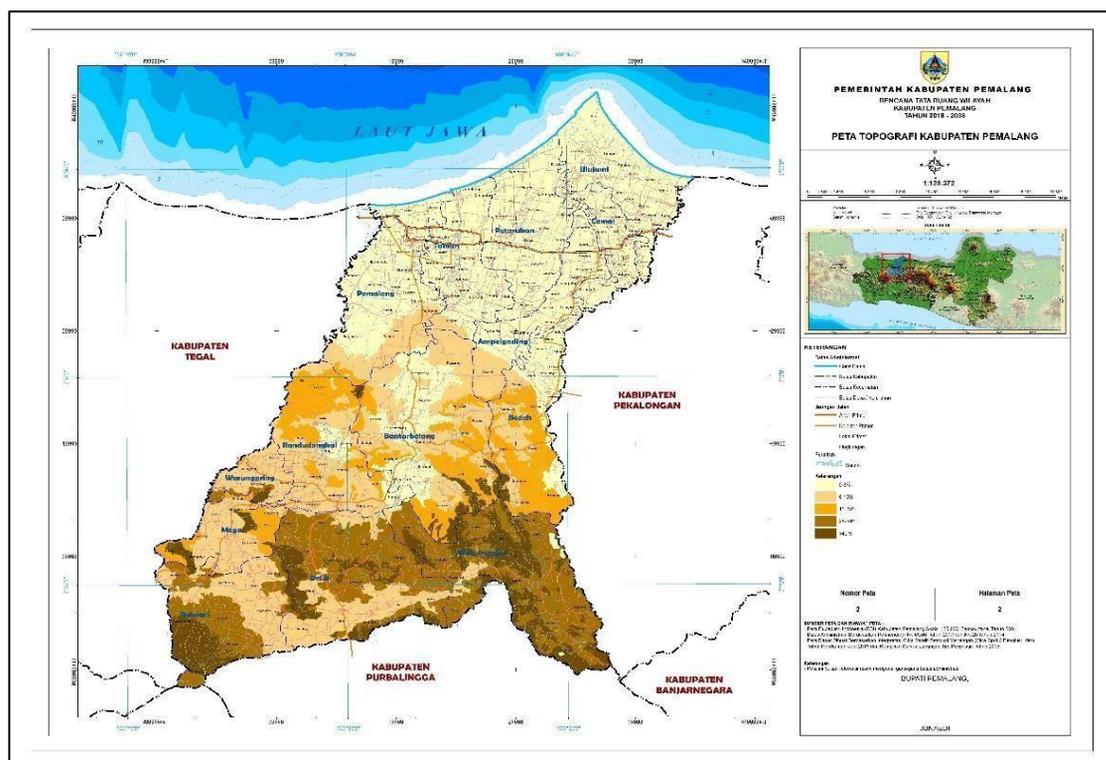
Gambar II.2
Ketinggian Wilayah Menurut Kecamatan di
Kabupaten Pemalang Tahun 2022

Berdasarkan gambar di atas, kecamatan dengan wilayah tertinggi adalah Kecamatan Pulosari yang terletak pada 914 mdpl. Sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Pemalang yang bentang wilayahnya berada pada ketinggian 6 mdpl. Kenampakan bentang alam wilayah Kabupaten Pemalang merupakan areal dataran, perbukitan dan pegunungan yang memiliki kemiringan lereng beragam mulai 0 % sampai lebih dari 40 % dengan penjelasan sebagai berikut:

- Kemiringan 0 – 8 % Berada di seluruh wilayah Kecamatan Petarukan, Ulujami dan Comal, sebagian besar wilayah Kecamatan Pemalang, Taman, Ampelgading dan sebagian wilayah Kecamatan Bodeh, Bantarbolang dan sebagian kecil di wilayah Kecamatan Randudongkal.
- Kemiringan 8 – 15% Tersebar di sebagian besar wilayah Kecamatan Moga, Warungpring, Randudongkal, dan Bantarbolang, sebagian di wilayah Kecamatan Pulosari dan Belik, sebagian kecil di Kecamatan Watukumpul, Bodeh, Ampelgading, Taman dan Pemalang.
- Kemiringan 15 – 25% Tersebar di sebagian wilayah Kecamatan Randudongkal, Bantarbolang, Bodeh dan Moga, sebagian kecil di Kecamatan Pemalang dan Ampelgading.

- Kemiringan 25 – 40% Tersebar di sebagian besar wilayah Kecamatan Watukumpul, Kecamatan Belik dan Kecamatan Pulosari, sebagian kecil di Kecamatan Warungpring.
- Lebih dari 40% Tersebar di sebagian wilayah Kecamatan Watukumpul, Kecamatan Belik dan Kecamatan Pulosari, sebagian kecil di Kecamatan Bantarbolang, Moga dan Warungpring.

Peta kemiringan lahan Kabupaten Pemalang sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang 2018 – 2038.

Gambar II.3
Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Pemalang

4. Geologi

Kondisi geologi Kabupaten Pemalang meliputi : jenis tanah, struktur geologi, dan gerakan tanah yang umumnya mempengaruhi lingkungan fisik di wilayah ini.

A. Jenis Tanah

Jenis tanah di Kabupaten Pemalang secara garis besar terbagi menjadi endapan aluvial, kelompok litosol, latosol, regosol, andosol, dan podsolik.

- 1) Jenis aluvial terdapat di wilayah Kecamatan Petarukan, Pemalang, Taman, Ampelgading, Bodeh, Comal, dan Ulujami.
- 2) Jenis tanah litosol dan kompleksnya terdapat di Kecamatan Pemalang, Randudongkal, Belik, Watukumpul, dan Bantarbolang.
- 3) Jenis latosol dan sejenisnya terdapat di Kecamatan Bantarbolang, Pemalang, Moga, Pulosari, Randudongkal dan Belik.

B. Struktur Geologi

Struktur geologi Kabupaten Pemalang terdiri dari struktur aluvium, tapak formasion, rambatan formasion, produk vulkanik, produk vulkanik lava dan formasi halang.

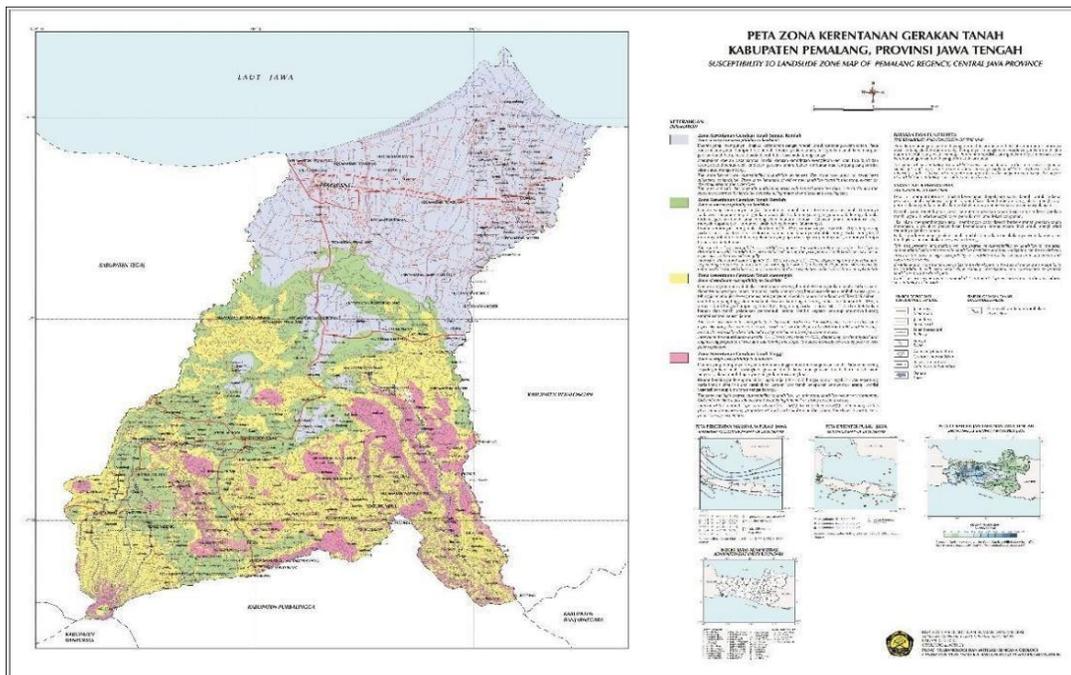
- 1) Struktur aluvium terdapat di Kecamatan Ulujami, Comal, Ampelgading, Petarukan, Taman, Pemalang, bagian utara dan Bodeh;
- 2) Formasi tapak terdapat di Kecamatan Pemalang bagian utara, Ampelgading, Bodeh dan bagian selatan Kecamatan Bantarbolang;
- 3) Formasi rambatan terdapat di sebagian besar Kecamatan Belik, Watukumpul, bagian utara Kecamatan Bodeh, dan sebagian Kecamatan Randudongkal;
- 4) Struktur batuan produk gunung api-tak terpisahkan terdapat disebagian besar Kecamatan Randudongkal;
- 5) Struktur batuan produk gunung api-lava terdapat di sebagian besar Kecamatan Belik dan Pulosari; dan
- 6) Formasi halang terdapat di sebagian besar Kecamatan Watukumpul, sebagian Kecamatan Bantarbolang, Randudongkal dan Pulosari.

C. Gerakan Tanah

Kabupaten Pemalang mempunyai potensi bencana geologi gerakan tanah yaitu:

- 1) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah: seluruh wilayah Kecamatan Petarukan, Comal dan Ulujami, sebagian besar wilayah Kecamatan Pemalang, Taman dan Ampelgading, sebagian wilayah Kecamatan Bantarbolang dan Bodeh dan sebagian kecil di wilayah Kecamatan Randudongkal;
- 2) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah: sebagian besar di wilayah Kecamatan Bantarbolang, Randudongkal, Warungpring dan Moga, sebagian kecil wilayah Kecamatan Pulosari, Belik, Pemalang, Taman dan Ampelgading;
- 3) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah: sebagian besar wilayah Kecamatan Watukumpul, Belik, Pulosari, sebagian di wilayah Kecamatan Bodeh, Bantarbolang dan Moga, sebagian kecil di wilayah Kecamatan Pemalang, Ampelgading dan Warungpring;
- 4) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi: sebagian di wilayah Kecamatan Watukumpul, Bodeh, Belik dan Pulosari, sebagian kecil di Kecamatan Randudongkal, Bantarbolang dan Moga.

Hal tersebut di atas disebabkan oleh struktur batuan/geologi, jenis tanah, gerakan vulkanis/aktifitas gunung berapi dan sesar. Sesar terdapat di Kecamatan Bodeh, Ampelgading, Bantarbolang dan Randudongkal. Disamping itu terdapat Sesar naik di Kecamatan Watukumpul dan sesar geser di Kecamatan Watukumpul dan Randudongkal. Berikut adalah Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Kabupaten Pemalang:



Sumber: Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

Gambar II.4

Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Kabupaten Pemalang

5. Hidrologi

Kondisi hidrologi Kabupaten Pemalang terbagi kedalam tiga kategori sumber air, yaitu:

A. Air Permukaan

Kabupaten Pemalang sebagian besar merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Comal yang memiliki anak sungai sekitar 85 buah yang mengalir dari hulu sungai di kaki Gunung Slamet sampai hilir bermuara di Laut Jawa. Sungai Comal merupakan sungai yang paling besar pengaruhnya di Kabupaten Pemalang dengan lebar lebih dari 15 meter dan panjang sekitar 91 Km. Wilayah yang dialiri Kecamatan Moga, Randudongkal, Bantarbolang, Bodeh, Ampelgading, Comal dan Ulujami. Sedangkan sungai besar lainnya yang cukup berpengaruh adalah :

- 1) Sungai Waluh: lebar lebih 15 meter panjang sekitar 56.1 Km di Kecamatan Randudongkal, Bantarbolang dan Taman;
- 2) Sungai Layangan: lebar lebih 15 meter panjang sekitar 8,9 Km di Kecamatan Bodeh;
- 3) Sungai Polaga: Lebar 10 – 15 meter panjang sekitar 33.3 Km di Kecamatan Belik, Watukumpul dan Bantarbolang;
- 4) Sungai Lumeneng: Lebar 10 – 15 meter panjang sekitar 20.4 Km di Kecamatan Watukumpul dan Bantarbolang;
- 5) Terdapat sekitar 85 sungai dengan lebar kurang dari 10 meter yang tersebar dari daerah hulu sampai hilir;
- 6) Disamping itu terdapat Sungai Rambut yang sebagian besar menjadi perbatasan Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten Tegal

B. Mata Air

Kabupaten Pemalang memiliki potensi sumber air berupa mata air yang tersebar di beberapa tempat. Beberapa sumber mata air yang selama ini telah dimanfaatkan oleh PDAM, antara lain:

- 1) Mata Air Telaga Gede yang terletak di Desa Sikasur/Desa Persiapan Sodong Besari Kecamatan Belik debit 1200 lt/detik, dimanfaatkan 400 lt/detik kondisi tidak terpengaruh musim;
- 2) Mata Air Moga lokasi di Desa Moga Kecamatan Moga dengan debit maksimal 750 lt/detik dimanfaatkan 200 lt/detik;
- 3) Mata Air Sumur Wadon Desa Kecepat Kecamatan Randudongkal debit maksimal 200 lt/detik dimanfaatkan 20 lt/detik;
- 4) Mata Air Suci di Desa Gendoang Kecamatan Moga debit maksimal 150 lt/detik dimanfaatkan 10 lt/detik;
- 5) Mata Air Cipete di Desa Gendoang Kecamatan Moga debit maksimal 75 lt/detik dimanfaatkan 35 lt/detik;
- 6) Mata Air Cipanas Desa Gambuhan Kecamatan Pulosari debit maksimal 75 Lt/Detik dimanfaatkan 37.50 lt/detik;
- 7) Mata Air Si Cipluk Desa Gambuhan Kecamatan Pulosari debit maksimal 30 Lt/detik dimanfaatkan 7.50 Lt/Detik;
- 8) Mata Air Bulakan Desa Gambuhan Kecamatan Pulosari debit maksimal 32 lt/detik dimanfaatkan 20 lt/detik;
- 9) Mata Air Kemiri Dukuh Sodong Desa Sikasur Kec Belik debit maksimal 30 lt/detik dimanfaatkan 20 lt/detik;
- 10) Mata Air Kebanggaan di Desa Kebanggaan Kecamatan Moga debit maksimal 300 lt/detik dimanfaatkan 150 lt/detik.

C. Air Tanah

Sumber air tanah di Kabupaten Pemalang dapat diklasifikasikan kedalam dua jenis, yaitu:

1) Air Tanah Dangkal

Tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang, pada daerah dekat pantai kualitas kurang baik karena bersifat payau. Ketersediaan air tanah dangkal sangat dipengaruhi air hujan.

2) Air Tanah Dalam berupa Cekungan Air Tanah (CAT)

Terdapat 2 CAT yaitu CAT Bumiayu meliputi sebagian wilayah Kecamatan Pulosari, Moga, Warungpring dan Randudongkal dan CAT Pekalongan – Pemalang meliputi daerah Pantura Pemalang sampai dengan sebagian wilayah Kecamatan Bodeh dan Bantarbolang.

6. Klimatologi

Kabupaten Pemalang mempunyai iklim tropis dengan dua musim silih berganti sepanjang tahun : yakni musim penghujan dan musim kemarau, dengan suhu rata-rata berkisar antara 24°C sampai dengan 31°C. Jumlah hari hujan di Kabupaten Pemalang pada tahun 2020 mencapai rata – rata 159 yang terpantau dari 18 stasiun pemantau hujan. Jumlah hari hujan terendah pada bulan Agustus nyaris tidak ada hari hujan, sedangkan tertinggi pada bulan Januari sejumlah 29 hari hujan.

Jumlah curah hujan di Kabupaten Pemalang pada tahun 2022 mencapai 2157,17 mm yang terpantau dari rata – rata 18 stasiun pemantau. Adapun bulan dengan curah hujan paling rendah adalah bulan Agustus yang terpantau nyaris tidak adanya hujan. Sedangkan curah hujan paling tinggi pada bulan Januari sebesar 680 mm. Jumlah hari hujan dan curah hujan per bulan di Kabupaten Pemalang dirinci berdasarkan masing-masing stasiun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.3

Banyaknya Hari Hujan Perbulan Dirinci Menurut Stasiun Pemantauan di Kabupaten Pemalang, Tahun 2022

No.	Stasiun	Hari Hujan												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Kejene	20	23	17	15	15	21	8	6	12	17	21	20	195
2	Warungpring	24	23	21	20	20	20	11	8	14	19	22	24	226
3	Kecepit	23	20	15	14	17	19	7	4	14	19	16	20	188
4	Randudongkal	26	25	19	17	19	23	8	6	16	19	21	22	221
5	Nambo	24	24	12	17	16	15	9	4	13	18	19	21	192
6	Moga	21	13	9	11	17	20	5	4	14	21	19	22	176
7	Pulosari	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	0
8	Belik	27	28	27	25	26	28	13	15	24	27	27	29	296
9	Banjardawa	21	20	17	14	7	13	7	4	11	11	17	15	157
10	Sungapan	24	21	17	13	15	13	11	3	11	12	19	19	178
11	Karangsuci	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	0
12	Klareyan	23	15	13	10	10	11	6	0	10	16	12	13	139
13	Karangtengah	24	15	18	16	8	9	9	0	8	11	3	12	133
14	Sokawati	19	20	22	17	16	15	12	4	13	17	14	14	183
15	Bantarbolang	22	22	21	15	15	15	19	5	13	21	14	20	202
16	Pedagung	25	24	20	14	16	15	10	4	15	21	18	21	203
17	Watukumpul	30	26	27	22	24	28	10	9	22	24	26	30	278
18	Sipedang	29	27	28	28	27	29	12	9	21	26	25	29	290
19	Bongas	28	27	28	28	27	29	14	9	23	26	25	29	293
Rata - Rata		24	22	19	17	17	19	10	6	15	19	19	21	187

Sumber: Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2023

Tabel II.4

Banyaknya Curah Hujan Perbulan Menurut Stasiun Pemantauan di Kabupaten Pemalang (mm), 2022

No.	Stasiun	Curah Hujan (mm)											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Kejene	574	512	356	315	244	337	178	143	153	275	279	406
2	Warungpring	629	295	318	413	346	372	159	91	249	274	455	470
3	Kecepat	1092	827	366	214	413	354	137	68	194	365	462	435
4	Randudongkal	858,7	753	456,5	330,5	399,5	344	160	62	261	409	553	557
5	Nambo	703	762	281	450	369	410	239	143	350	392	457	620
6	Moga	1229	301	241	283	364	649	354	156	294	486	637	526
7	Pulosari	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
8	Belik	983	748	760	649	887	348	549	306	370	1701	900	900
9	Banjardawa	296	298	200	271	66	137	139	19	45	196	200	226
10	Sungapan	313	339	220	270	238	173	160	23	109	218	232	250
11	Karangsuci	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
12	Klareyan	661	384	131	185	225	112	108	0	134	238	145	423
13	Karangtengah	290	350	164	205	138	82	101	0	94	198	8	276
14	Sokawati	206	418	359	270	210	267	140	26	90	280	199	216
15	Bantarbolang	418	435	227	232	201	354	173	41	168	416	287	361
16	Pedagung	422	682	307	274	305	324	205	45	305	712	370	325
17	Watukumpul	1127	624	606	579	418	232	222	207	414	298	381	657
18	Sipedang	892	785	669	634	471	313	278	187	447	492	438	653
19	Bongas	1056	851	716	757	552	370	298	215	477	564	525	760
Rata - Rata		680,7	550,8	370,1	375,1	340,4	304,6	211,8	101,9	244,4	447,9	384	474,2

Sumber: Kabupaten Pemalang Dalam Angka 2023, BPS

7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Pemalang sekitar 32 persen berupa sawah, lebih dari 80 persennya berupa sawah irigasi teknis. Hal ini menunjukkan bahwa pertanian lahan sawah menjadi salah satu aktifitas ekonomi masyarakat yang dominan. Adapun penggunaan lahan untuk bangunan dan pekarangan sekitar 20 persen dari luas lahan yang ada di Kabupaten Pemalang. Di samping itu terdapat penggunaan lahan berupa tambak di kawasan pesisir yang secara ekonomi cukup berpengaruh. Berikut rincian penggunaan lahan di Kabupaten Pemalang berdasarkan kecamatan:

Tabel II.5
Penggunaan Lahan Kabupaten Pemalang 2022 Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Luas Lahan (Km ²)							
	Sawah	Bangunan & Sekitarnya	Tegalan/ Kebun	Ladang/ Huma	Tambak/ Kolam	Kehutanan +hutan rakyat	Perkebunan	Lainnya
Moga	22,93	0	1.109.240	11.500	0	0	0	0
Warungpring	17,39	0	512.860	0	0	0	0	0
Pulosari	3,47	0	4.680.260	761.920	0	0	0	0
Belik	36,64	0	4.727.290	26.160	0	0	0	0
Watukumpul	31,69	0	5.568.540	173.230	0	0	0	0
Bodeh	25,81	0	1.229.430	286.530	0	0	0	0
Bantarbolang	30,79	0	1.896.020	7.180	0	0	0	0
Randudongkal	29,57	0	1.175.570	9.750	0	0	0	0
Pemalang	50,24	0	424.680	24.900	0	0	0	0
Taman	39,27	0	71.040	900.000	0	0	0	0
Petarukan	53,56	0	127.450	100.800	0	0	0	0
Ampelgading	26,10	0	48.790	33.940	0	0	0	0
Comal	12,78	0	12.080	5.800	0	0	0	0
Ulujami	22,56	0	460.600	462.300	0	0	0	0
Jumlah	402,80	0	22.043.750	2.804.010	0	0	0	0

Sumber: Kabupaten Pemalang Dalam Angka 2023, BPS

8. Emisi Gas Rumah Kaca

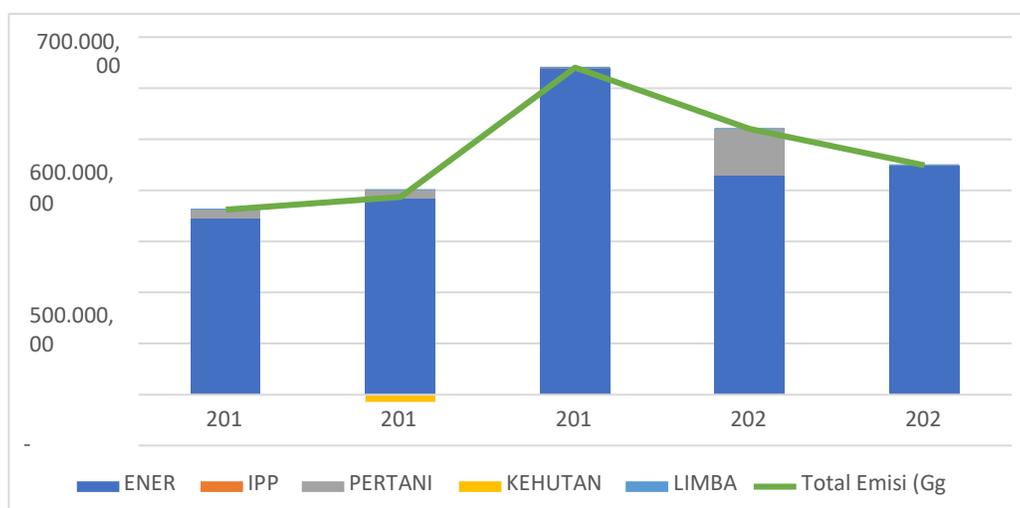
Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dihasilkan dari penggunaan energi untuk kegiatan transportasi, perubahan lahan, kegiatan pertanian, dan pengelolaan limbah. Pengelolaan GRK sangat penting dilakukan dalam rangka pengelolaan pembangunan rendah karbon yang menjadi bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan. Berikut tabel emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Pemalang:

Tabel II.6
Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Pemalang

NO.	SEKTOR	2017	2018	2019	2020	2021
1	ENERGI	346.395,05	385.227,73	639.328,42	428.545,92	448.579,09
2	IPPU	0,21	0,28	0,37	0,44	0,47
3	PERTANIAN	15.620,40	15.716,94	844,65	91.667,51	623,07
4	KEHUTANAN	-387,35	-14.354,18	-585,56	-632,15	-619,83
5	LIMBAH	212,43	225,95	260,94	239,82	275,83
Total Emisi (Gg CO ₂ e)		361.840,74	386.816,72	639.848,83	519.821,53	448.858,63

Sumber: Sign Smart, 2023

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu 2017-2021 mengalami tren yang fluktuatif dengan capaian tertinggi pada tahun 2019 sebesar 639.848,83 Gg CO₂e. Pada tahun 2021 emisi GRK yang dihasilkan mengalami penurunan mencapai 448.858,63 Gg CO₂e dengan kontribusi emisi GRK terbesar bersumber dari sektor energi sebesar 448.579,09 Gg CO₂eq. Hingga tahun 2021 sektor kehutanan masih bisa menyerap emisi, sehingga dapat disimpulkan masih terdapat tutupan hijau atau hutan di Kabupaten Pemalang.



Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045

Gambar II.5

Grafik Tren Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Pemalang

9. Kondisi Pengelolaan Sampah

Timbulan sampah di Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan sepanjang tahun 2020 – 2022. Timbulan sampah di Kabupaten Pemalang tahun 2022 mencapai 216.694,51 ton/tahun. Timbulan sampah tersebut meningkat dari tahun 2021.

Tabel II.7
Timbunan Sampah Kabupaten Pemalang

Tahun	Timbunan Sampah (ton/hari)	Timbunan Sampah (ton/tahun)
2020	391,70	142.970,65
2021	588,60	214.837,39
2022	593,68	216.694,51

Sumber: SIPSN, 2023

Pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan melalui 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), sedangkan penanganan sampah merupakan sampah yang terangkut ke TPA. Persentase pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang meningkat sepanjang tahun 2020 – 2022. Pada tahun 2022 pengurangan sampah mencapai 56.080,54 ton/tahun atau 25,88% dan penanganan sampah mencapai 128.933,23 ton/tahun atau 59,50% dari total timbunan sampah. Sehingga, sampah yang terkelola sebesar 185.013,77 ton/tahun atau 85,38% dari total timbunan sampah.

Tabel II.8
Realisasi Pengelolaan Sampah Kabupaten Pemalang

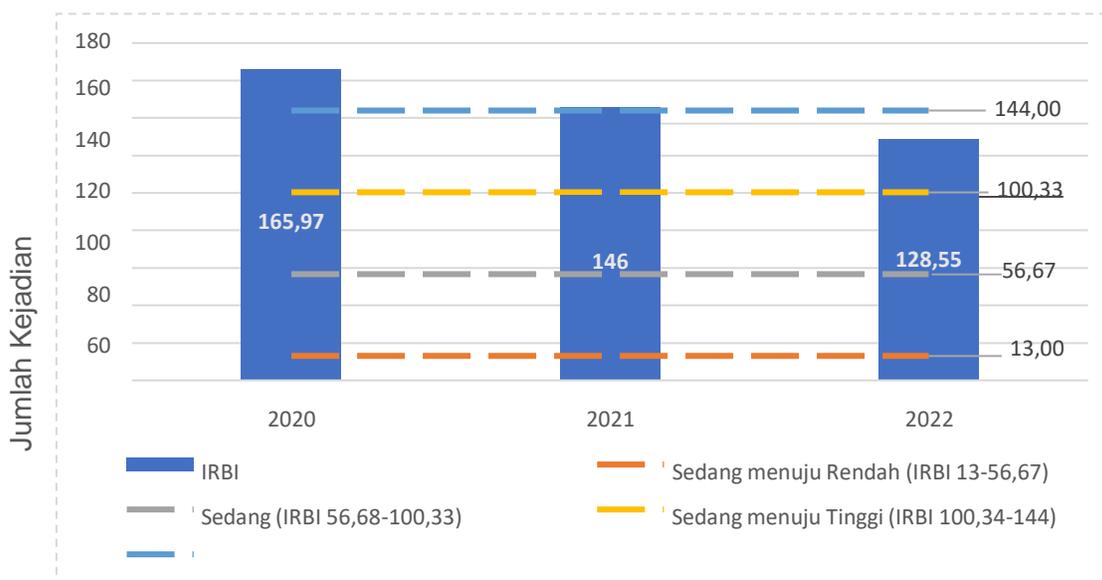
Keterangan	2020	2021	2022
Timbunan sampah (ton/tahun)	142.970,65	214.837,39	216.694,51
Sampah yang dikurangi (ton/tahun)	30.266,89	51.625,42	56.080,54
% sampah yang dikurangi	21,17%	24,03%	25,88%
Sampah yang tertangani (ton/tahun)	84.824,49	120.953,45	128.933,23
% sampah yang tertangani	59,33%	56,30%	59,50%
Total Pengelolaan Sampah (ton/tahun)	15.091,37	172.578,88	185.013,77
% sampah terkelola	80,50%	80,33%	85,38%

Sumber: SIPSN, 2023

10. Risiko Bencana

Untuk mengetahui tingkat risiko bencana di masing-masing kabupaten/kota dilakukan perhitungan indeks risiko bencana Indonesia (IRBI). Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat; dan kapasitas pemulihan.

Kelas nilai IRBI dikategorikan menjadi tiga yaitu kelas tinggi (nilai IRBI >144), kelas sedang (nilai IRBI 13- 144), dan kelas rendah (nilai IRBI <13). IRBI Kabupaten Pemalang tahun 2022 menunjukkan nilai 128,55 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, nilai tersebut menunjukkan kelas sedang. Apabila kelas sedang dibagi lagi menjadi tiga kelas yaitu kelas sedang menuju rendah (nilai IRBI 13-56,67), kelas sedang (nilai IRBI 56,68-100,33), dan kelas sedang menuju tinggi (nilai IRBI 100,34-144), maka nilai IRBI Kabupaten Pemalang tahun 2022 masuk dalam kelas tinggi.



Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045

Gambar II.6
Tren IRBI Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2022

Karakteristik geografi wilayah tidak hanya membentuk potensi bagi pengembangan wilayah namun juga menjadi potensi bagi terjadinya bencana. Bencana alam dan permasalahan lingkungan yang diperkirakan terjadi di wilayah Kabupaten Pemalang meliputi kebakaran, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan kekeringan. Pada tahun 2022 kejadian bencana di Kabupaten Pemalang mencapai 130 kejadian dengan tingkat kejadian paling banyak berupa tanah longsor dengan 43 kejadian.

Kebencanaan suatu wilayah dapat dilihat pula melalui ketahanan daerah. Ketahanan daerah yang dimaksud adalah kemampuan suatu wilayah, baik tingkat lokal maupun regional, untuk menghadapi, menanggulangi, dan beradaptasi terhadap berbagai risiko dan tantangan yang mungkin timbul, khususnya terkait kebencanaan. Kondisi tersebut merujuk pada kemampuan wilayah untuk mengidentifikasi, mengelola, dan merespons bencana alam atau buatan manusia. Ini mencakup perencanaan mitigasi bencana, tanggap darurat, dan pemulihan pasca-bencana. Adapun indikator yang merepresentasikannya adalah Indeks Ketahanan Daerah dimana Kabupaten Pemalang mengalami kenaikan di setiap periode pembangunannya hingga mencapai 0,76 pada tahun 2022.

Tabel II.9

Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2022

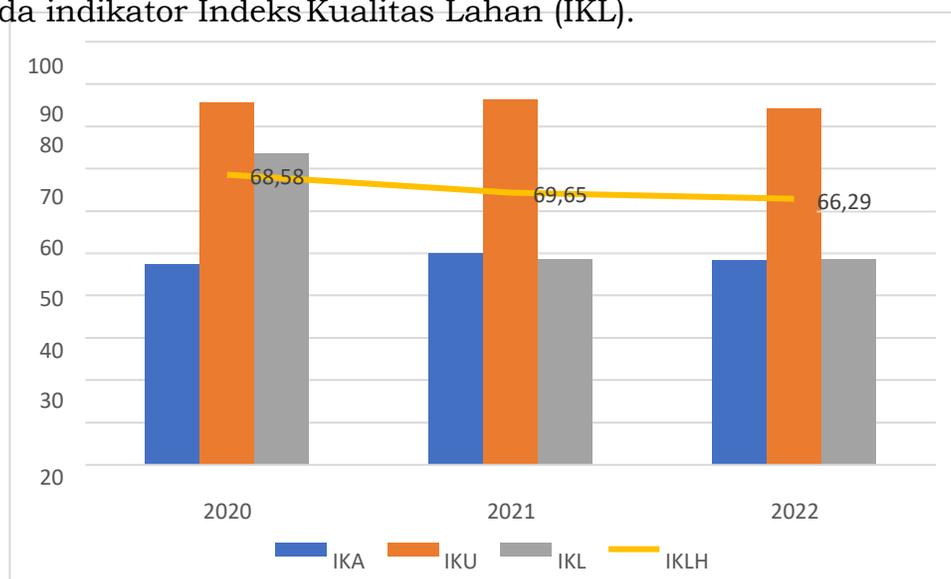
Indikator	2011	2016	2021	2022
Indeks Ketahanan Daerah	NA	0,25	0,66	0,76

Sumber: BPBD Kab. Pemalang

11. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan salah satu indikator kinerja sektor lingkungan yang terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Berdasarkan metodologi perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) maka masing-masing indikator mempunyai pembobotan yang berbeda dengan rincian Indeks Kualitas Air (0,376), Indeks Kualitas Udara (0,405), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (0,219).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang mengalami tren yang fluktuatif cenderung menurun pada tahun 2022. Pada tahun 2022 nilai IKLH kabupaten Pemalang menunjukkan angka 62,89 dan termasuk dalam kategori sedang. Penurunan IKLH terjadi karena adanya penurunan pada indikator Indeks Kualitas Lahan (IKL).



Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045

Gambar II.7

Tren Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

Pada tahun 2021 dan 2022 terjadi perubahan perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) sehingga pada tahun tersebut terjadi penurunan yang signifikan.

Tabel II.10

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

Tahun	IKA	IKU	IKL	IKLH	Kriteria
2020	47,33	85,62	73,56	68,58	Sedang
2021	50	86,26	48,54	69,65	Sedang
2022	48,33	84,16	48,54	66,29	Sedang

Sumber: Laporan IKLH Kabupaten Pemalang Tahun 2022 dan IKLH Online, 2023

12. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan kemampuan suatu wilayah untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, aman, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh penduduknya. Konsep ketahanan pangan melibatkan beberapa aspek yang saling terkait, termasuk produksi pangan, distribusi, aksesibilitas, dan konsumsi pangan. Pada analisis ketahanan pangan di Kabupaten Pemalang, dilakukan pendekatan dengan indikator skor pola pangan harapan.

Terlihat bahwa skor pola pangan harapan di Kabupaten Pemalang mengalami fluktuatif meskipun pada tahun 2022 mencapai 91,20. Angka ini menurun dari tahun sebelumnya (2021) yang mencapai 93,50. Capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pemalang memiliki susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.

Tabel II.11
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2022

Indikator	Indikator Proksi	2011	2016	2021	2022
Indeks Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	84,3	77,8	93,5	91,2

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2022

2.1.2 Demografi

Penduduk merupakan modal dasar pembangunan, namun di sisi lain juga merupakan beban untuk mencapai pembangunan. Jumlah penduduk yang semakin meningkat menuntut pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali juga berpotensi menghambat pencapaian kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk di suatu wilayah mempengaruhi taraf kehidupan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Jika suatu wilayah memiliki jumlah penduduk yang besar sementara pendapatan regional di wilayah tersebut relatif kecil akan mengakibatkan pendapatan per kapita wilayah tersebut rendah.

Tabel II.12
Data Kependudukan Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2022

Indikator	2011	2016	2021	2022
Jumlah Penduduk	1.271.157	1.292.573	1.484.209	1.500.754
Laju Pertumbuhan Penduduk	0,46	0,31	0,86	1,11
Komposisi Penduduk (laki-laki)	631.095	639.797	752.565	760.798
Komposisi Penduduk (perempuan)	640.062	652.776	731.644	739.956
Rasio Jenis Kelamin	98,6	98	102,86	102,82
Kepadatan Penduduk	1140	1158,95	1330,77	1345,61

Sumber: BPS Kabupaten Pemalang, 2011-2023; Disdukcapil Kabupaten Pemalang

Mengacu pada tabel tersebut, diketahui bahwa tahun 2022 Kabupaten Pemalang memiliki 1.500.754 jiwa penduduk. Angka ini meningkat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2011 yakni sebesar 1.271.0157 jiwa. Secara keseluruhan rasio jenis kelamin di Kabupaten

Pemalang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, pada tahun 2016 rasio jenis kelamin sebesar 98 selanjutnya meningkat hingga 102,82 di tahun 2022. Kepadatan penduduk juga semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Pemalang, tahun 2016 kepadatan penduduk sebesar 1.158,95 jiwa/km² dan meningkat menjadi 1.345,61 jiwa/km² di tahun 2022.

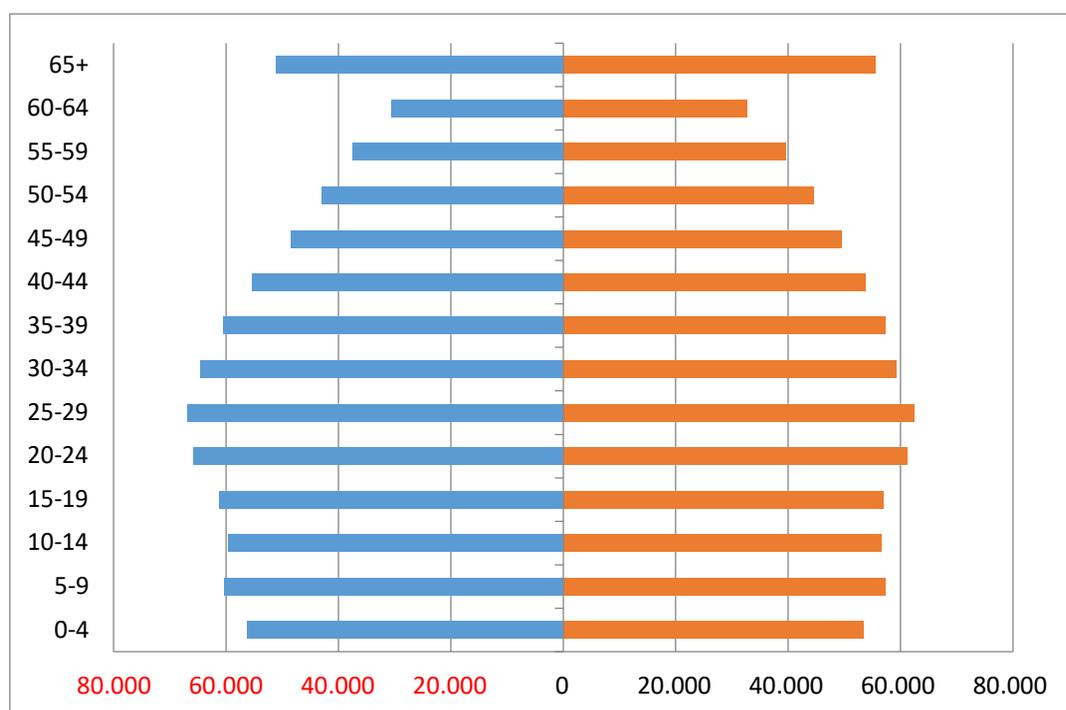
Kecamatan Pemalang sebagai ibu kota kabupaten memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu sebesar 204.524 jiwa atau sekitar 13,63 persen dari total penduduk Kabupaten Pemalang. Kepadatan penduduk di Kabupaten Pemalang mencapai 1.345 jiwa/km². Kecamatan Comal memiliki kepadatan terbesar yaitu sebesar 3.584 jiwa/km² yang artinya, setiap 1 km² didiami oleh sekitar 3.584 orang.

Dalam analisis demografi, terdapat analisis menurut karakteristik umur melalui piramida penduduk. Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran awal mengenai struktur umur penduduk berdasarkan kelompok umur, yang dapat digunakan, baik untuk dianalisis mengenai produktivitas umurnya maupun analisis keberhasilan program kependudukan selama ini (utamanya Keluarga Berencana). Dari piramida penduduk Kabupaten Pemalang didapatkan kondisi secara umum bahwa masyarakat di Kabupaten Pemalang memiliki cukup banyak penduduk usia muda namun sebagian besar berada pada usia produktif. Adapun penduduk usia tua juga turut mendominasi dengan usia 65 tahun ke atas.

Tabel II.13
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pemalang Tahun 2022

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	56.220	53.319	109.539
5-9	60.207	57.312	117.519
10-14	59.658	56.599	116.257
15-19	61.150	56.962	118.112
20-24	65.857	61.216	127.073
25-29	66.881	62.435	129.316
30-34	64.617	59.267	123.884
35-39	60.412	57.259	117.671
40-44	55.290	53.809	109.099
45-49	48.393	49.489	97.882
50-54	42.887	44.482	87.369
55-59	37.484	39.645	77.129
60-64	30.580	32.727	63.307
65+	51.162	55.435	106.597
Kabupaten Pemalang	760.798	739.956	1.500.754

Sumber: Pemalang dalam Angka, 2023



Sumber: Kabupaten Pemalang Dalam Angka 2023, BPS

Gambar II.8
Piramida Penduduk Kabupaten Pemalang Tahun 2022

Struktur umur penduduk Kabupaten Pemalang tahun 2022 masih menunjukkan komposisi penduduk muda, struktur tersebut ditandai dengan masih dominannya jumlah penduduk kelompok usia muda. 70,02 % penduduk termasuk usia produktif (15-64) tahun. 29,98 % penduduk usia tidak produktif (0-14 dan 65+) tahun. Dengan demikian rasio ketergantungan di Kabupaten Pemalang pada tahun 2022 sebesar 42,81. Hal ini berarti setiap 100 orang produktif di Kabupaten Pemalang harus menanggung sekitar 42-43 penduduk usia non produktif. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, rasio ketergantungan tahun 2022 ini sedikit lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena terjadi penurunan proporsi penduduk usia produktif yang diiringi peningkatan penduduk usia non produktif (kelompok 0-14 tahun). Peningkatan rasio ketergantungan ini perlu diwaspadai karena menunjukkan peningkatan beban ekonomi masyarakat. Kendati meningkat, namun rasio ketergantungan yang masih berada di bawah nilai 50 menandakan bahwa Kabupaten Pemalang sedang menikmati bonus demografi. Peluang ini perlu dioptimalkan agar mampu memberikan manfaat dalam pembangunan di Kabupaten Pemalang.

2.2 Aspek Kesejahteraan Sosial dan Budaya

Penyelenggaraan pembangunan daerah berpedoman pada perencanaan yang disusun secara baik, terpadu, sinergi, berkelanjutan, aspiratif dan tanggap terhadap perubahan. Aspek kesejahteraan masyarakat yang dikaji dalam sub bab ini meliputi gambaran kondisi terkait dengan ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Pembangunan makro Kabupaten Pemalang dapat dilihat dari aspek kesejahteraan masyarakat dimana terdapat indikator kinerja makro pembangunan pada analisisnya.

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Salah satu cara untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah dengan mengidentifikasi dan menganalisis perekonomian daerah tersebut. Selain itu, perekonomian menjadi modal pembangunan dengan mendorong komoditas potensi daerah.

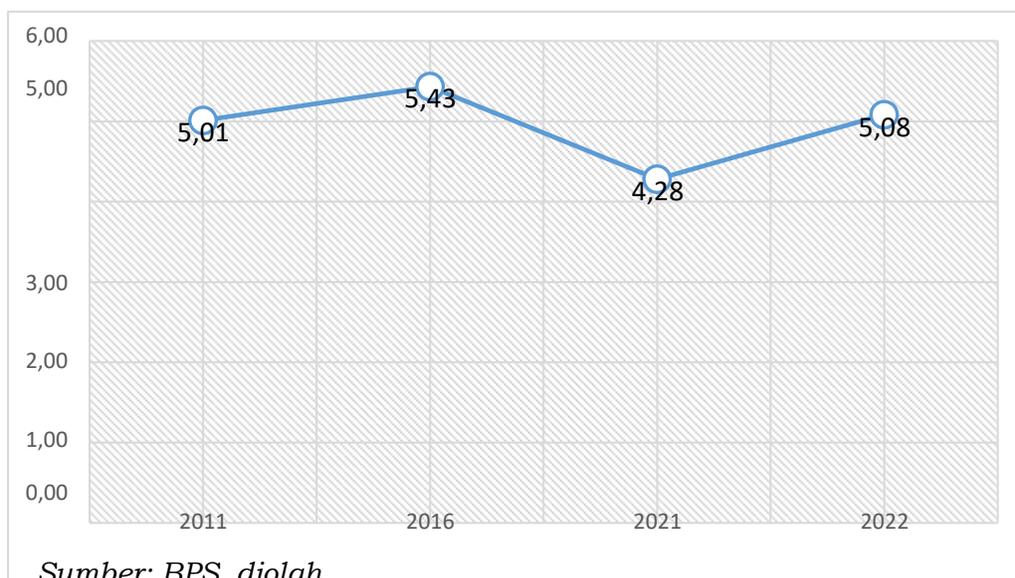
1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang dapat digunakan untuk melihat kinerja perekonomian di suatu wilayah. Indikator ini menggambarkan adanya pertambahan atau pengurangan nilai tambah (*value added*) dari seluruh aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Secara teknis, pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) periode berjalan terhadap PDRB ADHK periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang positif mengindikasikan perekonomian berjalan ekspansif sedangkan pertumbuhan yang negatif mengindikasikan perekonomian berkontraksi.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu wilayah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB dibedakan atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB ADHK menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun dasar tertentu. PDRB ADHK periode 2000-2010 dihitung menggunakan tahun dasar 2000 sedangkan periode 2011-2022 menggunakan tahun dasar 2010. PDRB ADHB atau sering juga disebut PDRB Nominal dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan PDRB ADHK atau sering disebut PDRB Riil dapat digunakan untuk mengetahui capaian pertumbuhan ekonomi pada periode tertentu.

Pada tahun 2022, PDRB nominal Kabupaten Pemalang mencapai 29,9 triliun rupiah. Dalam rentang waktu 12 tahun PDRB nominal meningkat 2,65 kali lipat jika dibanding capaian tahun 2010. Peningkatan tersebut sedikit lebih tinggi dibanding capaian Provinsi Jawa Tengah dalam rentang waktu yang sama, PDRB nominal Jawa Tengah hanya meningkat 2,50 kali lipat. Kendati demikian, PDRB nominal Kabupaten Pemalang tahun 2022 memberi kontribusi terhadap total perekonomian di Provinsi Jawa Tengah hanya sebesar 1,92 persen dari total PDRB nominal Jawa Tengah yang mencapai 1.560,89 triliun rupiah. Berdasarkan harga konstan tahun 2010, PDRB riil Kabupaten Pemalang tahun 2022 mencapai 19,89 triliun rupiah, setara dengan 1,76 kali lipat PDRB riil tahun 2010. Seperti halnya PDRB nominal, peningkatan PDRB riil selama 12 tahun terakhir di

Kabupaten Pemalang sedikit lebih tinggi dibanding peningkatan di Provinsi Jawa Tengah (1,68 kali lipat) selama periode yang sama.

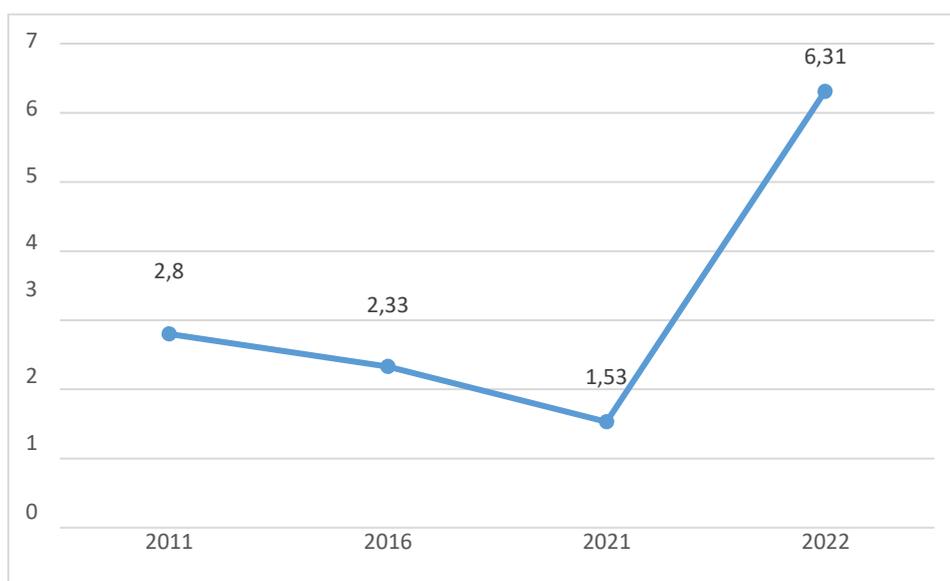


Gambar II.9
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2022

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pemalang selama periode pembangunan jangka menengah terlihat stabil di angka 5 persen dengan kecenderungan meningkat perlahan. Sebelum pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi sempat mencapai 5,80 persen pada tahun 2019. Setelah itu di tahun 2020 perekonomian mengalami kontraksi sebagai dampak dari Pandemi Covid-19. Adanya berbagai program pemulihan dampak Covid-19 mendukung percepatan pemulihan ekonomi di Kabupaten Pemalang, sehingga di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mampu berada di angka 4,28 persen dan meningkat kembali di tahun 2022 menjadi 5,08 persen.

2. Inflasi

Inflasi berkenaan dengan permintaan dan penawaran dari kegiatan ekonomi di suatu daerah. Inflasi menjadi indikator penting untuk dianalisis karena mampu menunjukkan bagaimana kemampuan daya beli masyarakat pada momen tertentu. Dengan begitu, analisis inflasi dapat dijadikan sebagai masukan bagi *policy makers* dalam mengendalikan inflasi daerah. Inflasi Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:



Sumber: BPS Kabupaten Pemalang, 2023 (diolah)

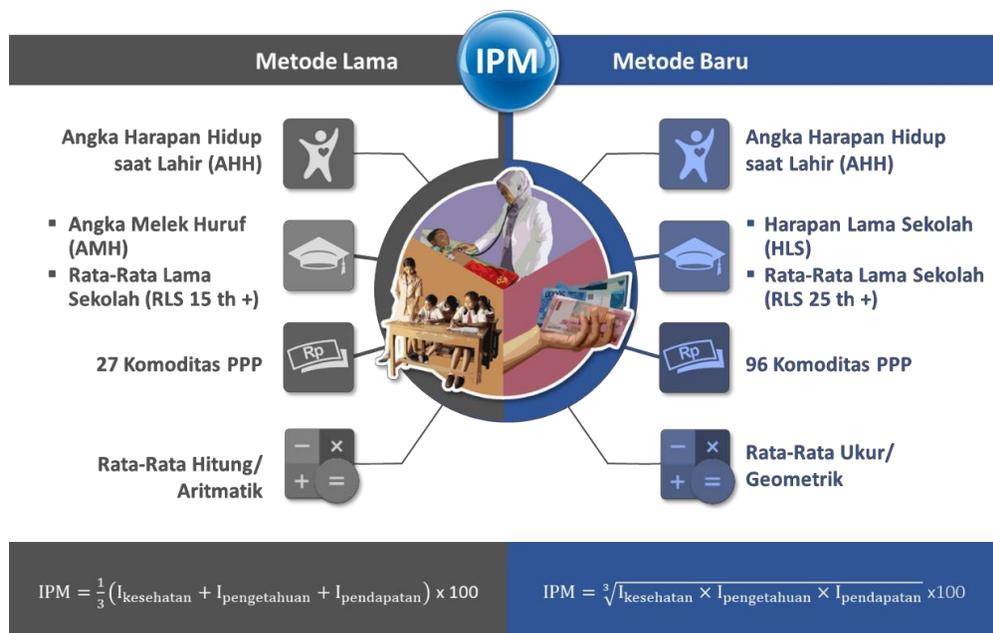
Gambar II.10

Inflasi di Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2022

Tingkat inflasi Kabupaten Pemalang selama kurun waktu Tahun 2011-2022 secara umum mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022 perkembangan laju inflasi di Kabupaten Pemalang cukup tinggi tercatat hingga menembus angka 6,31 persen. Pandemi yang melanda hampir di seluruh dunia membuat banyak negara melakukan lockdown sebagai upaya pengendalian penyebaran infeksi. Kebijakan tersebut membuat permintaan akan barang dan jasa, terutama kebutuhan pokok, di pasar meningkat signifikan. Di sisi lain jumlah pasokan masih terbatas karena kelangkaan tenaga kerja maupun faktor lainnya pascapandemi. Permintaan yang lebih tinggi inilah yang pada akhirnya menyebabkan kekurangan atau kelangkaan produk, yang kemudian menjadi penyebab terjadinya inflasi tinggi di tahun 2022.

3. Indeks Pembangunan Manusia

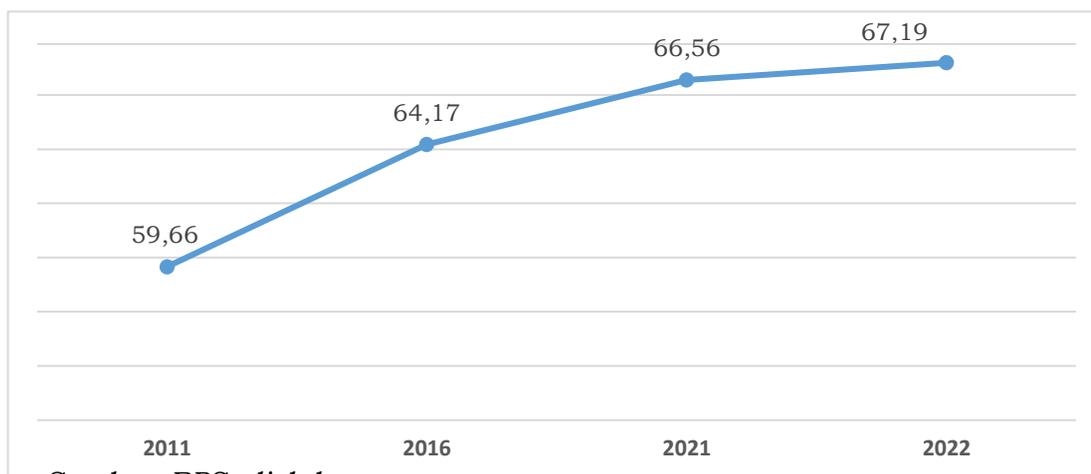
Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia/masyarakat di suatu wilayah. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu dimensi umur panjang dan sehat, dimensi pengetahuan, dan dimensi standar hidup layak. Setiap dimensi memiliki indeks tersendiri. Pengukuran dimensi umur panjang dan sehat menggunakan indikator usia harapan hidup (*expectancy of life at birth*) yang menghasilkan indeks kesehatan. Dimensi pengetahuan diukur dengan indikator rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas dan indikator harapan lama sekolah dari penduduk usia 7 tahun ke atas yang menghasilkan indeks pengetahuan. Dimensi standar hidup layak diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan yang menghasilkan indeks pendapatan.



Sumber: UNDP, 2010.

Gambar II.11
Perubahan Metodologi IPM

Perkembangan angka IPM di Kabupaten Pemalang selama periode 2011-2022 terus mengalami peningkatan sebagaimana terlihat di gambar berikut, di mana pada tahun 2022 IPM Kabupaten Pemalang meningkat menjadi 67,19.



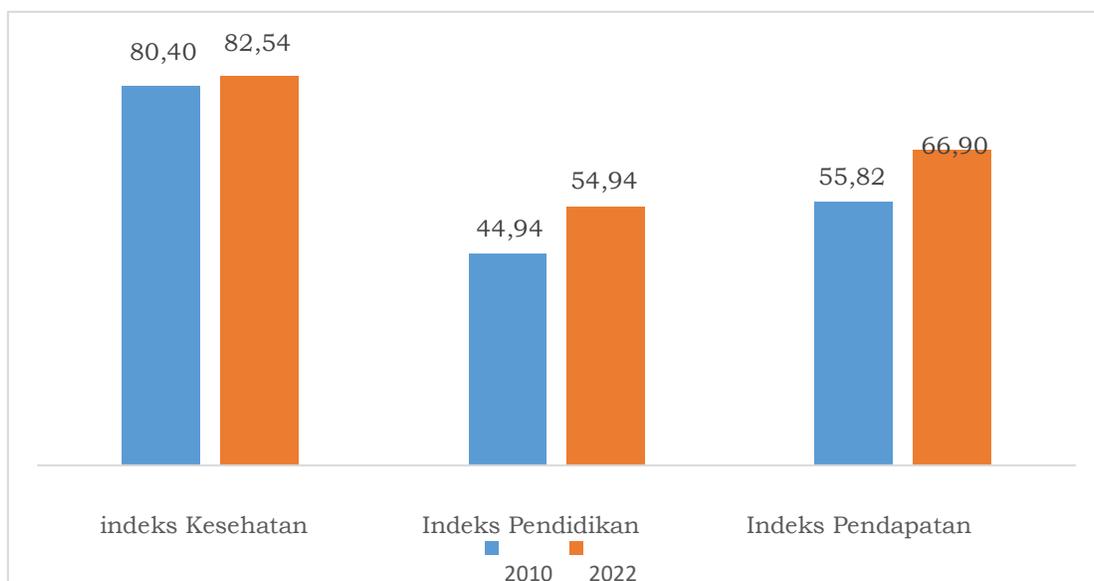
Sumber: BPS, diolah

Gambar II.12
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pemalang Tahun 2010 - 2022

Dilihat dari kategorinya, IPM Kabupaten Pemalang telah bertransformasi dari wilayah dengan tingkat pembangunan manusia kategori "rendah" (IPM antara 50-60) menjadi wilayah dengan tingkat pembangunan manusia kategori "sedang" (IPM antara 60-70).

Sebagai indeks yang bersifat komposit, evaluasi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia dapat dilihat berdasarkan capaian dari masing-masing komponen pembentuknya, yaitu indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pendapatan. Selama 12 tahun terlihat bahwa komposisi indeks tidak banyak berubah. Capaian indeks kesehatan menjadi indeks tertinggi sejak tahun 2010 (80,40) hingga tahun 2022 (82,54). Kendati demikian, indeks kesehatan hanya

tumbuh 2,66 persen yang menjadikan indeks paling lambat diantara indeks yang lain. Sementara indeks pendapatan menempati posisi pertengahan dengan pertumbuhan indeks sebesar 19,82 persen. Dimensi terendah dari pembangunan manusia di Kabupaten Pemalang adalah dimensi pengetahuan yang ditunjukkan oleh capaian indeks pendidikan yang paling rendah dibanding indeks yang lain. Indeks pendidikan mampu tumbuh 22,25 persen dan merupakan indeks yang tumbuh paling cepat dibanding indeks yang lain. Hal ini wajar karena semakin tinggi nilai indeks maka pertumbuhannya akan semakin lambat, begitu pula sebaliknya, nilai indeks yang rendah cenderung memiliki pertumbuhan yang lebih cepat.



Sumber: BPS, diolah.

Gambar II.13

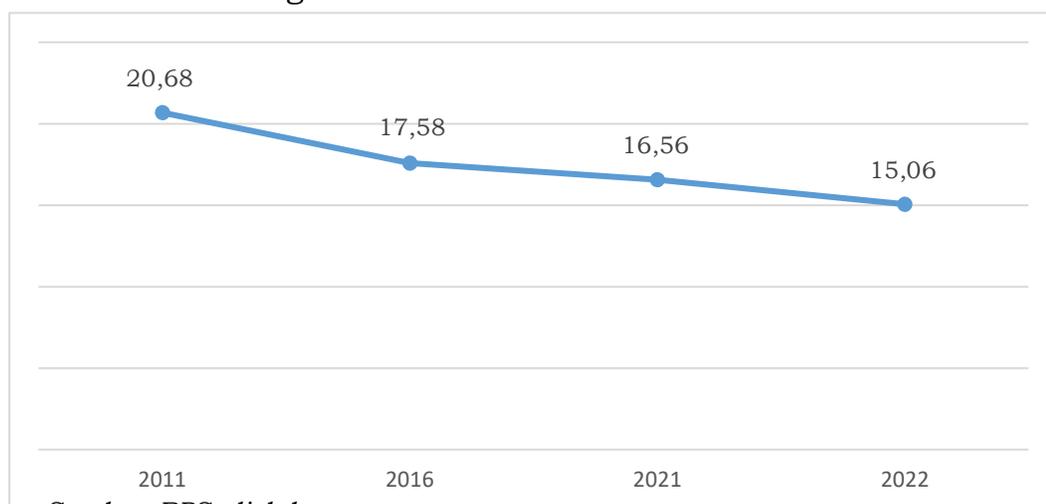
Perbandingan Indeks Pembentuk IPM Kabupaten Pemalang, Kondisi Awal Metode Baru (2010) dan Kondisi Saat Ini (2022)

Capaian pembangunan sumber daya manusia di suatu wilayah dapat dilihat dari perkembangan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) beserta seluruh unsur-unsur pembentuknya. Menurut UNDP, pembangunan manusia hanya dapat direalisasikan bila penduduk dalam suatu wilayah tertentu setidaknya memiliki peluang berumur panjang dan sehat, pengetahuan keterampilan yang memadai dan peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan produktif sehingga memiliki daya beli. Dengan kata lain, tingkat pemenuhan ketiga unsur tersebut (kesehatan, pendidikan dan daya beli) sudah dapat merefleksikan secara minimal tingkat keberhasilan pembangunan sumber daya manusia suatu wilayah.

4. Angka Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur tingkat kemiskinan dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Besarnya pengeluaran (dalam rupiah) yang merupakan nilai minimum kebutuhan dasar dinamakan garis kemiskinan. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.



Gambar II.14
Perkembangan Angka Kemiskinan
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2022

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Pemalang secara umum memiliki tren menurun. Tahun 2011 kemiskinan sebesar 20,68 persen dan tahun 2022 tingkat kemiskinan kembali menurun menjadi 15,06 persen.

Dari sisi jumlah penduduk miskin, sepanjang periode 2011-2022 penduduk miskin di Kabupaten Pemalang telah berkurang sekitar dari total penduduk miskin tahun 2011. Tahun 2022 di Kabupaten Pemalang jumlah penduduk yang pengeluaran perkapita per bulannya berada di bawah garis kemiskinan (Rp. 429.549,-) masih ada sekitar 195,84 ribu jiwa atau 15,06 persen dari total penduduk. Garis kemiskinan akan selalu meningkat setiap tahunnya dikarenakan ada faktor inflasi didalamnya.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa persen dan berapa banyak jumlah penduduk miskin, namun juga terkait seberapa dalam dan seberapa parah kemiskinan terjadi. Indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan kesenjangan rata-rata pengeluaran perkapita penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan semakin jauh jarak rata-rata pengeluaran perkapita penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan menunjukkan seberapa besar variasi pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin besar nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Sepanjang periode 2011-2022 terlihat bahwa indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan memiliki pola fluktuasi yang sama. Pada tahun 2022 indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Pemalang sebesar 2,43. Berikut perkembangan indikator kemiskinan di Kabupaten Pemalang selama periode 2011-2022.

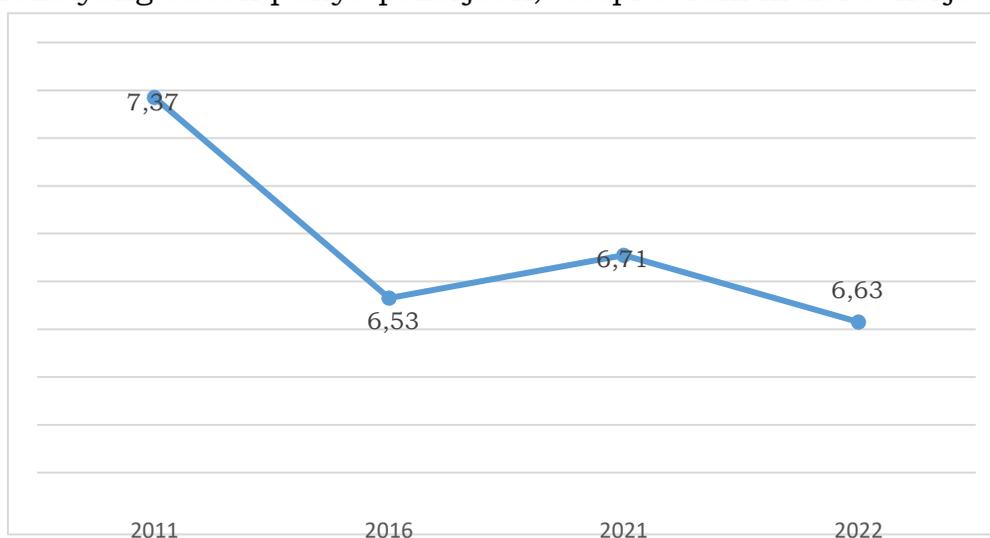
Tabel II.14
Perkembangan Indikator Kemiskinan di Kabupaten Pemalang
Tahun 2011-2022

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Tingkat Kemiskinan (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2011	235.316	261,20	20,68	3,09	0,71
2016	319.434	227,08	17,58	3,04	0,80
2021	401.857	215,08	16,56	2,92	0,77
2022	429.549	195,84	15,06	2,43	0,57

Sumber: BPS, diolah

5. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (a) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (b) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (c) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. (d) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Gambar II.15
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pemalang
Tahun 2011-2022

TPT Kabupaten Pemalang menunjukkan tren yang membaik selama kurun waktu 2011 sampai 2022, meskipun angkanya fluktuatif. Pada tahun 2011, TPT menunjukkan angka 7,37 persen dan berhasil mencapai 6,63 persen pada tahun 2022. Penurunan ini tentu perlu diperhatikan kembali terkait kualitas tenaga kerja dan angkatan kerja di Kabupaten Pemalang agar nantinya mampu menjadi tenaga kerja yang lebih produktif dan menyejahterakan keluarganya.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

Kesejahteraan sosial budaya merujuk pada kondisi kesejahteraan yang mencakup aspek-aspek sosial dan budaya dalam suatu masyarakat. Kondisi ini melibatkan kesejahteraan dan keberdayaan individu dalam konteks norma-norma, nilai-nilai, dan struktur sosial budaya. Pembangunan jangka panjang tentu saja menjadi salah satu titik vital bagi

perwujudan harmonisasi kesejahteraan masyarakat. Pendekatan kesejahteraan sosial budaya menekankan pentingnya memahami dan mempertimbangkan faktor-faktor budaya dalam merancang kebijakan dan program-program kesejahteraan. Ini mencerminkan pengakuan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial dan budaya.

1. Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan aspek integral dari pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada kesejahteraan dan hak-hak anak-anak. Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya mengacu pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melibatkan pencapaian kesejahteraan sosial, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak-hak anak. Pada dasarnya, perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat, sektor swasta, dan lembaga-lembaga internasional. Kolaborasi dan upaya bersama dari berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan dan perlindungan anak-anak secara holistik. Adapun indeks kekerasan anak yang menjadi salah satu indikator analisis perlindungan anak, mengalami fluktuasi dimana pada lima tahun terakhir sempat mengalami kenaikan di tahun 2021 dan kembali menurun menjadi 0,09 di tahun 2022.

Tabel II.15

Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2022

Indikator	Indikator Proksi	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Perlindungan Anak	Indeks Kekerasan Anak	(0,08)31	(0,08)34	(0,08)52	(0,15)62	(0,09)42

Sumber: DinsosKBPP, 2023

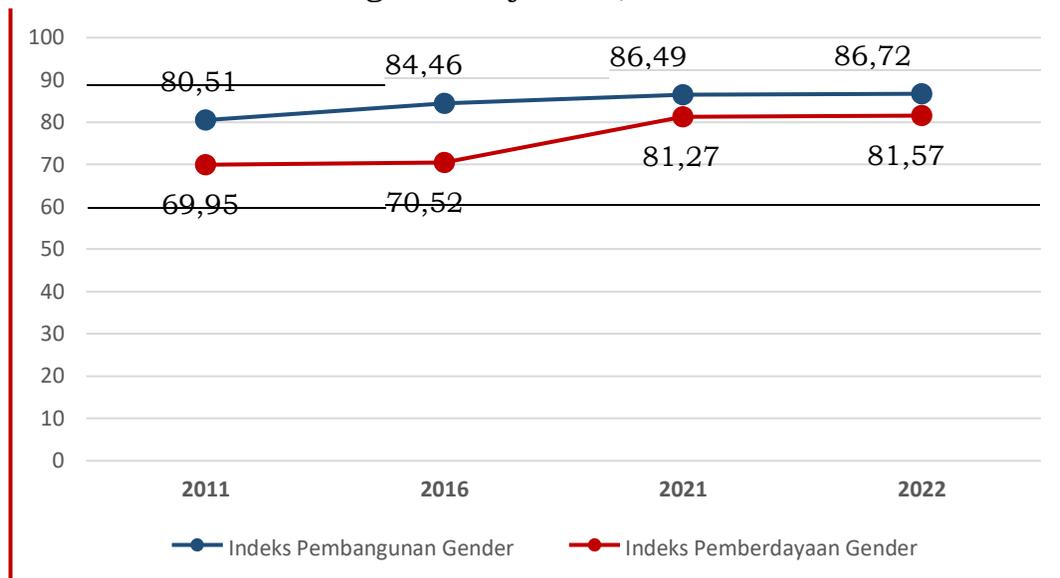
2. Pembangunan Gender

Pengarusutamaan gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender perlu menjadi perhatian dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Kesetaraan dan keadilan gender dapat terjadi apabila porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pelecehan dan tindakan salah lainnya.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender dalam suatu negara atau wilayah. IPG dirancang untuk memberikan gambaran tentang perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam beberapa dimensi kunci, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. Indeks pembangunan gender di Kabupaten Pemalang sudah cukup

tinggi dimana pada tahun 2011 memiliki capaian 80,51 dan meningkat hingga mencapai 86,72 di tahun 2022.

Adapun pada indeks pemberdayaan gender yang melihat sejauh mana perempuan aktif dalam pelaksanaan pembangunan, maka dari capaian yang ada masih jauh dari harapan. Terlihat indeks pemberdayaan gender pada tahun 2011 mencapai 69,95 dan pada saat ini di tahun 2022 meningkat menjadi 81,57.

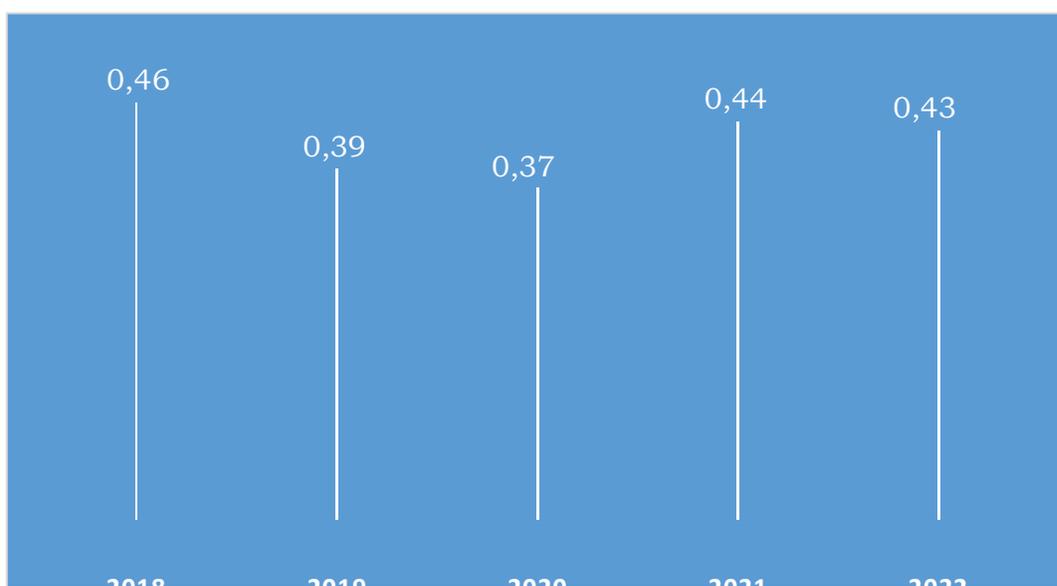


Sumber: BPS Kabupaten Pemalang, 2011-2023

Gambar II.16
Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2022

3. Ketimpangan Gender

Kesetaraan gender menjadi target pembangunan di banyak negara terutama yang mengalami disparitas pembangunan yang tinggi. Ketimpangan pembangunan menurut gender mengakibatkan pembangunan tidak dapat mencapai potensinya secara optimal. Kondisi yang ideal dalam pembangunan manusia yang diharapkan adalah kelompok penduduk laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama untuk berperan dalam pembangunan, memegang kendali atas sumber daya pembangunan yang ada, serta menerima manfaat dari pembangunan yang setara dan adil. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan kerugian/kegagalan (*loss*) dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. Indeks Ketimpangan Gender bernilai antara 0 dan 1. IKG sebesar 0 (nol) mencerminkan adanya kesetaraan gender yang sempurna yang menyebabkan pencapaian pembangunan ada pada tingkat optimalnya. IKG sebesar 1 (satu) mencerminkan kesenjangan gender yang sempurna yang menyebabkan kerugian total dalam pencapaian pembangunan akibat adanya ketidaksetaraan gender tersebut.



Sumber: BPS, diolah

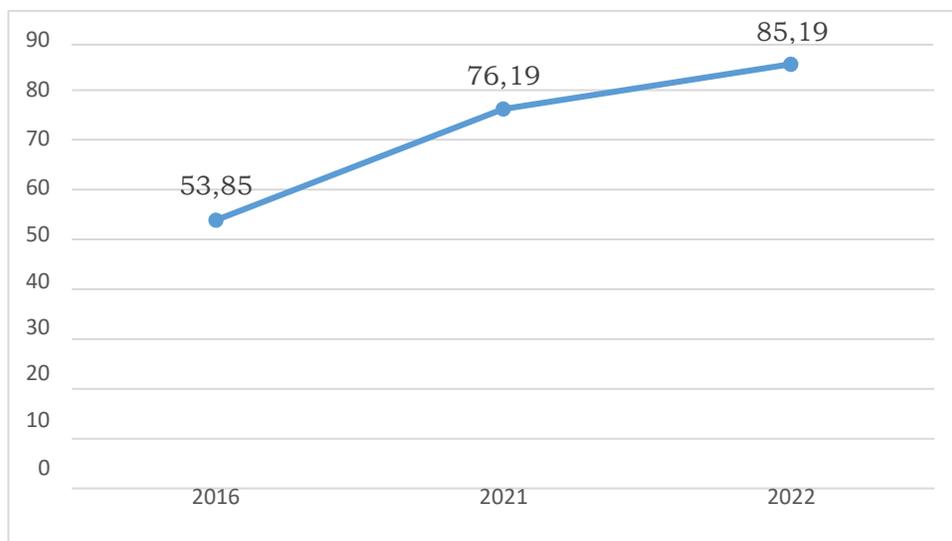
Gambar II.17

Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2022

Hasil penghitungan BPS menunjukkan bahwa nilai IKG Kabupaten Pemalang tahun 2022 sebesar 0,43. Nilai ini mencerminkan bahwa kerugian/ kegagalan pencapaian pembangunan manusia akibat dari adanya ketidaksetaraan gender adalah sebesar 43 persen. Perkembangan nilai IKG Kabupaten Pemalang sejak tahun 2018 cenderung fluktuatif. IKG sempat menurun hingga 0,37 (2020) kemudian kembali meningkat menjadi 0,44 (2021). Capaian IKG tahun 2022 meskipun turun menjadi 0,43, namun masih lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 lalu.

4. Pembangunan Pemuda

Pembangunan pemuda merupakan proses pemberdayaan dan pengembangan potensi generasi muda untuk menjadi anggota masyarakat yang aktif, produktif, dan berkontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan. Pembangunan pemuda tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga dimensi sosial, budaya, dan politik. Investasi dalam pembangunan pemuda di berbagai bidang akan menciptakan generasi yang lebih tangguh, berdaya saing, dan berkontribusi positif terhadap masyarakat dan pembangunan nasional. Salah satu indikator dalam melihat pembangunan kepemudaan adalah indeks pembangunan pemuda. Adapun pencapaian indeks pembangunan pemuda di Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan hingga mencapai 85,19 pada tahun 2022. Capaian ini tentu harus terus ditingkatkan dalam upaya akselerasi perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pemalang.



Gambar II.18
Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Pemalang
Tahun 2016-2022

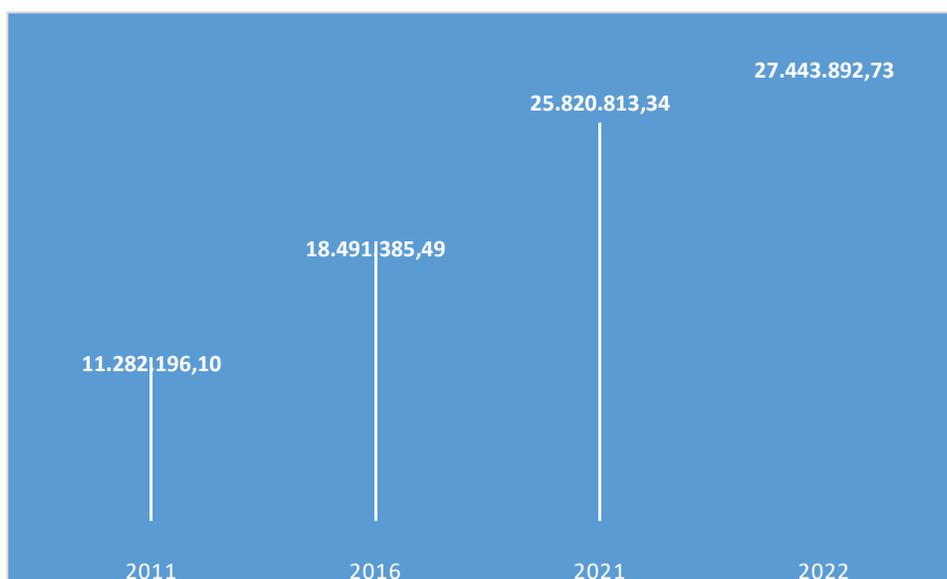
2.3 Aspek Daya Saing Daerah

Era globalisasi yang berkembang dengan sangat pesat menuntut suatu daerah untuk memiliki keunggulan posisional daerah. Keunggulan ini sangat ditentukan oleh adanya penguatan daya saing daerah. Dengan begitu, diperlukan penguatan daya saing yang mampu mengakselerasi pembangunan berkelanjutan demi mewujudkan visi dan misi pembangunan 2045. Guna memberikan gambaran tentang daya saing daerah, akan disajikan analisis terkait daya saing ekonomi daerah, daya saing sumber daya manusia, daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah, dan daya saing iklim investasi.

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

Suatu daerah memiliki karakteristik, pola, struktur masing-masing yang menjadi keunggulan daerah untuk menciptakan daya saing daerah. Keunggulan ini menjadi daya tarik atau potensi yang dapat mengangkat daya perekonomian. Hal inilah yang disebut sebagai potensi ekonomi.

Salah satu indikator yang menggambarkan daya saing ekonomi daerah adalah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku di setiap tahun sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada tahun tertentu sebagai dasar. Untuk melihat struktur serta pergeseran ekonomi menggunakan PDRB ADHB sedangkan ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu.



Sumber: BPS Kabupaten Pemalang, 2011-2023

Gambar II.19

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2022 (Juta Rupiah)

Nilai PDRB ADHB Kabupaten Pemalang memiliki pola peningkatan dari pada pelaksanaan pembangunan. Peningkatan tersebut secara berturut-turut sebesar Rp 11.282.196,10 pada tahun 2011; Rp 18.491.385,49 pada tahun 2016, Rp 25.820.813,34 pada tahun 2021, dan terakhir berada pada angka Rp 27.443.892,73 di tahun 2022 (dalam juta rupiah).

Distribusi PDRB ADHB menggambarkan struktur dan pergeseran jenis lapangan usaha yang sedang menonjol disuatu daerah. Kabupaten Pemalang selama ini memiliki keunggulan ekonomi di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Industri Pengolahan, dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Ketiga kategori lapangan usaha tersebut mendominasi dalam struktur ekonomi di Kabupaten Pemalang selama pelaksanaan pembangunan.

Tabel II.16

Distribusi Persentase PDRB (ADHB) Kabupaten Pemalang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 dan 2022

KATEGORI LAPANGAN USAHA	TAHUN	
	2010	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,79	26,49
B. Pertambangan dan Penggalian	4,60	3,76
C. Industri Pengolahan	17,67	21,96
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,11
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,07
F. Konstruksi	4,33	4,47
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi...	17,16	15,31
H. Transportasi dan Pergudangan	2,89	2,98
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,55	5,58
J. Informasi dan Komunikasi	1,97	2,41
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,93	3,13
L. Real Estate	1,73	1,62

KATEGORI LAPANGAN USAHA	TAHUN	
	2010	2022
M,N. Jasa Perusahaan	0,29	0,35
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan...	3,95	2,67
P. Jasa Pendidikan	4,04	5,4
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,89	1,06
R,S,T,U. Jasa lainnya	3,00	2,64
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100.00	100.00

Sumber: BPS, diolah

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita atas dasar harga berlaku diperoleh dari perhitungan total nilai PDRB atas dasar harga berlaku suatu wilayah dibagi dengan penduduk pertengahan tahun wilayah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor dan transfer yang mengalir ke luar (*transfer out*) sama dengan yang masuk (*transfer in*), maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita.



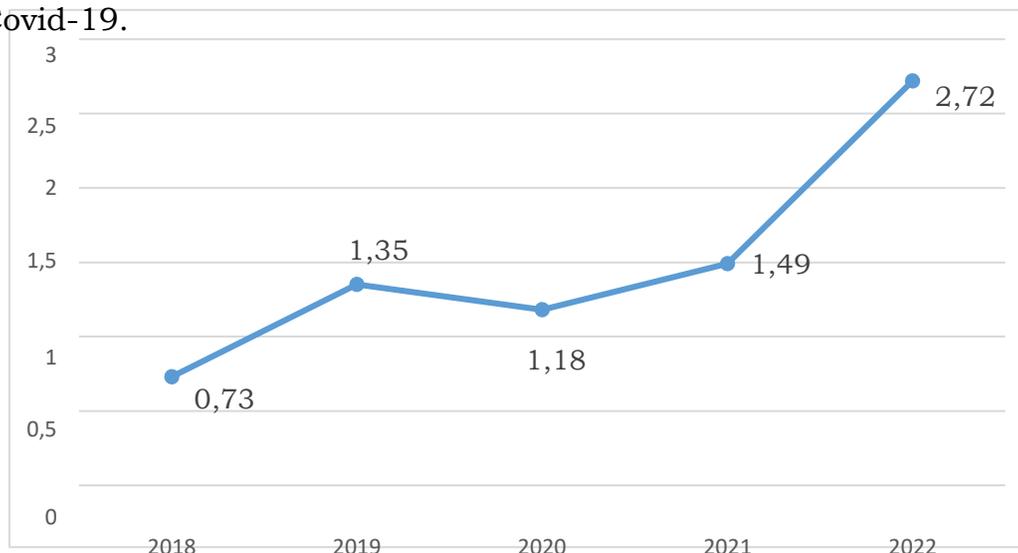
Sumber: BPS Kabupaten Pemalang, 2011-2023

Gambar II.20

PDRB per Kapita Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2022 (Ribuan Rp)

Pergerakan PDRB per kapita di Kabupaten Pemalang dapat dilihat melalui grafik di atas, diketahui bahwa PDRB per kapita selalu mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai 2022. Pada tahun 2011, PDRB per kapita sebesar 8,93 juta rupiah, kemudian di tahun 2016 meningkat menjadi sebesar 11,38 juta rupiah, dan pada tahun 2022 berada di angka 13,25 juta rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian khususnya pendapatan masyarakat di Kabupaten Pemalang sudah berjalan secara dinamis.

Rasio kewirausahaan adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat aktivitas kewirausahaan pada suatu wilayah. Rasio kewirausahaan dapat memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika kewirausahaan dalam suatu wilayah. Secara umum, rasio kewirausahaan di Kabupaten Pemalang mengalami kenaikan dimana pada tahun 2018 sebesar 0,73 meningkat menjadi 2,72 pada tahun 2022. Adapun penurunan di tahun 2020 menjadi 1,18 lebih dikarenakan dampak negatif dari pandemi Covid-19. Meskipun begitu, pada tahun 2021 dan 2022 rasio kewirausahaan kembali meningkat seiring pemulihan dampak pandemi Covid-19.



Sumber: BPS Kabupaten Pemalang

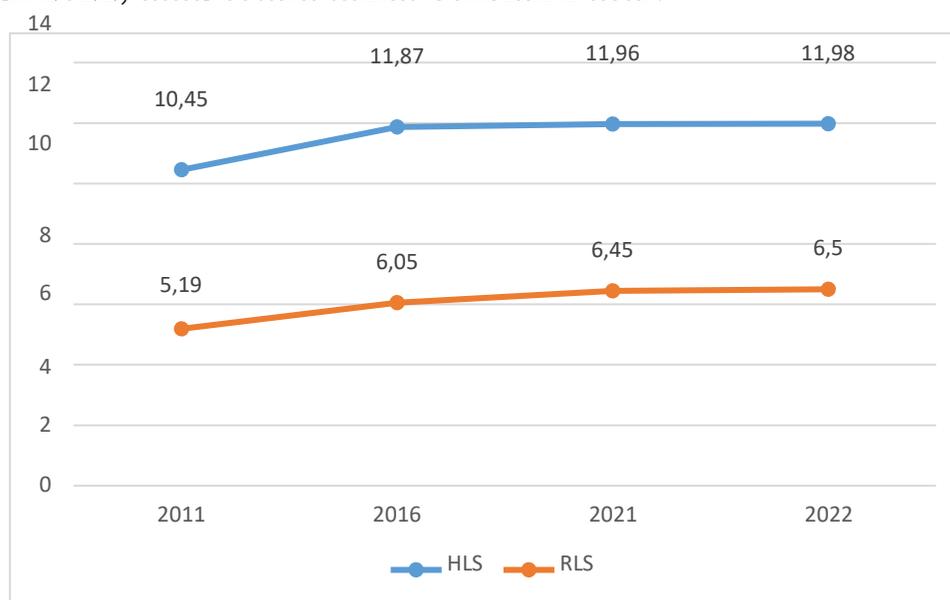
Gambar II.21

Rasio Kewirausahaan Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2022

2.3.2 Aspek Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

Daya saing SDM ini akan menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah dimana berfokus pada analisis terkait kompetensi masyarakat Pemalang. Salah satu indikator yang cukup relevan dalam melihat daya saing SDM adalah Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah sebagai komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Sedangkan harapan lama sekolah dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh).

Selama periode 2011-2022 angka RLS mampu tumbuh dari 5,19 menjadi 6,50 pada tahun 2022. Pada tahun 2011 penduduk usia 25 tahun ke atas rata-rata menjalani pendidikan formal hanya selama 5,19 tahun atau setara kelas 5 Sekolah Dasar. Angka ini terus meningkat hingga 6,50 tahun di tahun 2022, atau setara tamat Sekolah Dasar.



Sumber: BPS, diolah

Gambar II.22

Perkembangan Harapan Lama Sekolah Dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 - 2022

Indikator harapan lama sekolah juga mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah dengan pola yang hampir sama. Pada tahun 2022 penduduk usia 7 tahun ke atas di Kabupaten Pemalang memiliki harapan untuk mengenyam pendidikan formal selama 11,98 tahun atau setara kelas 3 SMA. Indikator yang dianalisis berikutnya adalah indeks pendidikan yang merupakan hasil perhitungan dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Adapun pencapaian indeks pendidikan di Kabupaten Pemalang meningkat seiring berjalannya program pendidikan oleh pemerintah daerah dimana capaian pada tahun 2022 mencapai 54,94. Kondisi ini tentu saja masih jauh dari harapan sehingga perlu perhatian khusus dalam penanganan layanan pendidikan.

Angka harapan hidup adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Indikator ini mengindikasikan tingkat kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Adapun capaian angka harapan hidup di Kabupaten Pemalang mencapai 73,65 tahun yang mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2022 akan memiliki harapan untuk hidup hingga usia 73-74 tahun. Pada analisis berikutnya, indikator ini digunakan untuk merumuskan indeks kesehatan dimana pada tahun 2022, indeks kesehatan di Kabupaten Pemalang juga mengalami peningkatan hingga mencapai 82,54.

Tabel II.17
Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan di
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2022

No	Indikator	2011	2016	2021	2022
1	Rata-rata Lama Sekolah	5,19	6,05	6,45	6,50
2	Harapan Lama Sekolah	10,45	11,87	11,96	11,98
3	Indeks Pendidikan	46,33	53,14	54,72	54,94
4	Angka Harapan Hidup	72,37	72,87	73,53	73,65
5	Indeks Kesehatan	80,57	81,34	82,35	82,54

Sumber: BPS Kabupaten Pemalang, 2011-2023

Literasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan memahami informasi. Namun, dalam konteks yang lebih luas, literasi juga mencakup kemampuan untuk memahami dan menggunakan berbagai bentuk informasi, termasuk literasi numerasi (kemampuan matematika) dan literasi digital (kemampuan menggunakan teknologi dan informasi digital). Adapun pembangunan literasi di Kabupaten Pemalang masih belum optimal. Namun progress dari pelaksanaan program pembangunan selama ini berdampak positif dimana budaya literasi masyarakat meningkat hingga mencapai 28,98 pada tahun 2022 dan indeks pembangunan literasi masyarakat juga meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 15,47 pada tahun 2022.

Tabel II.18
Indikator Literasi Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2022

Indikator	Indikator Proksi	2020	2021	2022
Angka Literasi/Numerasi	Budaya Literasi Masyarakat	NA	22,39	28,98
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	7,033	9,96	15,47

Sumber: Bappeda Kab. Pemalang, 2023

Angka tingkat partisipasi angkatan kerja memberikan gambaran tentang sejauh mana orang-orang di dalam rentang usia produktif aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Jika tingkat partisipasi angkatan kerja tinggi, ini dapat menunjukkan tingkat keterlibatan ekonomi yang kuat di antara penduduk usia produktif. Sebaliknya, tingkat yang rendah mungkin mencerminkan tantangan ekonomi atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi keterlibatan dalam angkatan kerja. Adapun penduduk yang merupakan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Adapun tingkat partisipasi angkatan kerja di Pemalang memiliki tren menurun pada beberapa tahun terakhir dimana pada tahun 2022 mencapai 69,91 lebih kecil bila dibandingkan dengan capaian tahun 2011 sebesar 70,25. Kondisi tingkat partisipasi angkatan kerja yang menurun menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi tidak semakin baik.

Tabel II.19
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Indikator	2011	2016	2021	2022
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,25	NA	65,8	69,91

Sumber: BPS Kabupaten Pemalang

2.3.3 Aspek Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur merupakan semua fasilitas berbentuk fisik maupun non fisik yang dibangun guna mendukung kegiatan masyarakat. Infrastruktur berkaitan dengan fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras maupun perangkat lunak. Pembangunan infrastruktur diperlukan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat serta mendukung jaringan struktur dasar agar pembangunan daerah tercapai. Gambaran terkait infrastruktur di Kabupaten Pemalang menyajikan data tentang infrastuktur pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar lainnya.

1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

IKLI merupakan Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap 12 jenis layanan infrastruktur diantaranya jalan, irigasi, air minum, drainase, persampahan, RTH, LPJU, rumah susun, APILL, perpustakaan, terminal, hotspot.

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pemalang. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan dan menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik infrastruktur merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat.

Sebagai bagian dalam sistem pelayanan masyarakat, penyediaan infrastruktur yang memadai sudah menjadi keharusan hal ini di dorong oleh permintaan masyarakat akan layanan infrastruktur yang harus semakin baik. Sebaliknya penyediaan infrastruktur yang kurang optimal dapat menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menjadi berkurang, tingginya biaya ekonomi serta mempunyai implikasi sulitnya daerah Kabupaten Pemalang dalam berkompetisi menarik investor dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki kualitas infrastruktur lebih baik.

Peran infrastruktur yang sangat strategis tersebut menjadikan pembangunan infrastruktur bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana infrastruktur yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan sosial dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah.

IKLI sebagai salah satu indikator tujuan daerah dalam jangka menengah yang ditargetkan untuk terus meningkat sampai dengan tahun 2026 menjadi 71,33. Terdapat 12 (dua belas) layanan infrastruktur yang menjadi pengukuran kepuasan masyarakatnya yaitu irigasi, jalan, air minum, drainase, persampahan, RTH/Taman Kota, LPJU, Rumah Susun, APILL, perpustakaan, terminal dan hotspot. Capaian IKLI yaitu

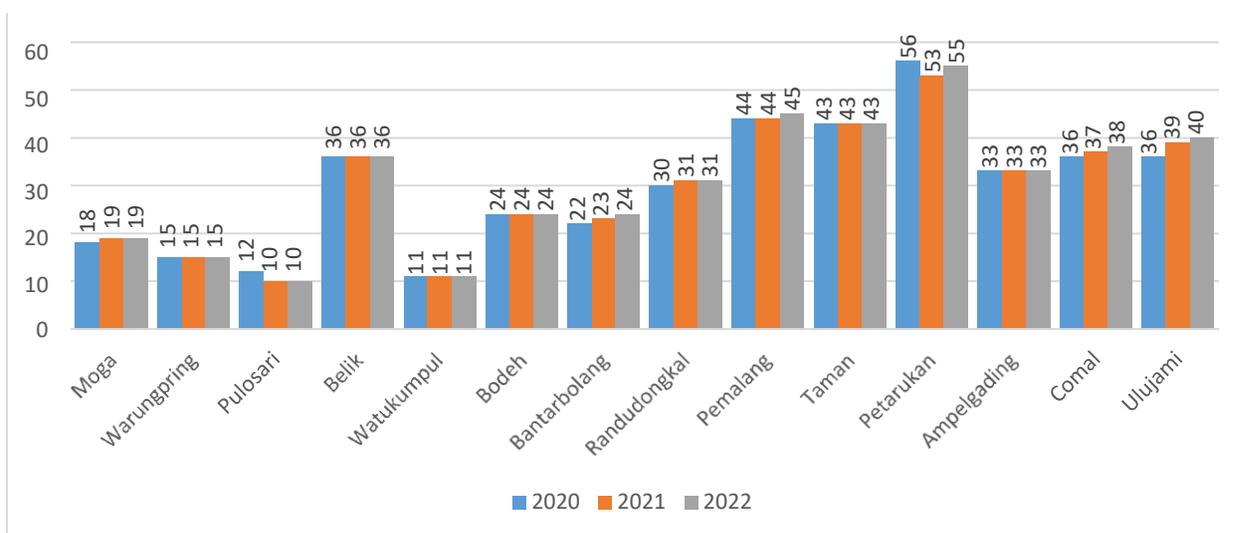
Tabel II.20
Capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten
Pemalang Tahun 2018-2022

No	Tahun	Target	Capaian
1	2018	-	75,06
2	2019	-	73,88
3	2020	71,03	71,03
4	2021	71,08	74,87
5	2022	71,13	74,02

Sumber: Bappeda Kabupaten Pemalang, 2023

2. Infrastruktur Pendidikan

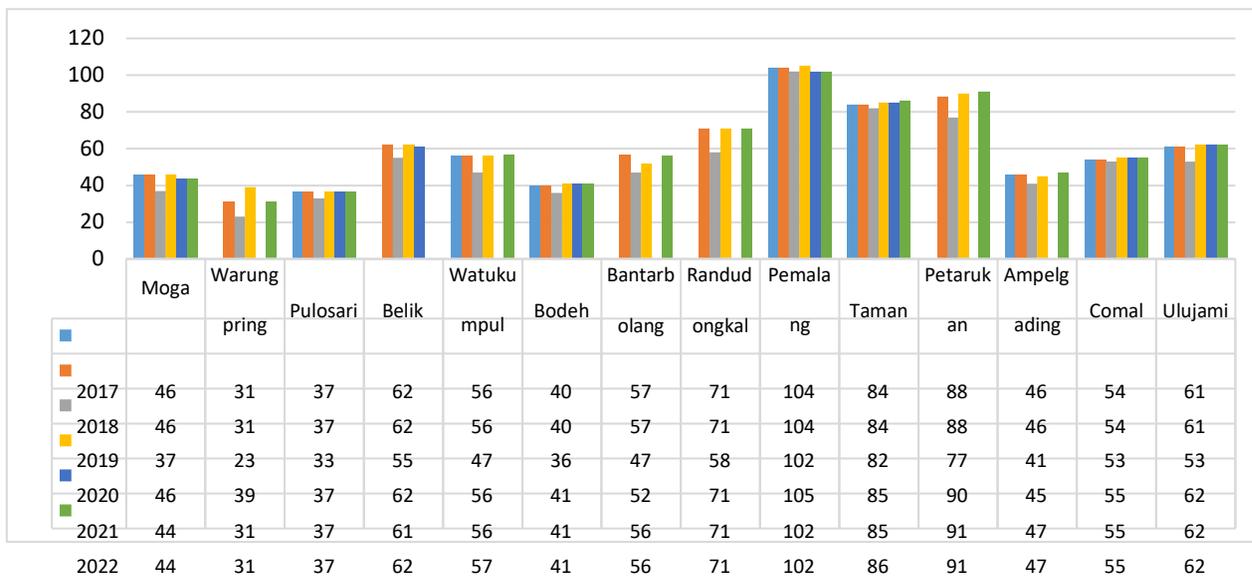
Jumlah TK/ sederajat di Kabupaten Pemalang menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 sampai 2022. Pada tahun 2020, jumlah TK/ sederajat secara keseluruhan sejumlah 416 unit dan bertambah menjadi 424 di tahun 2022. Jumlah TK/ sederajat di tiap kecamatan di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada diagram berikut.



Sumber: Kabupaten Pemalang dalam Angka, 2023

Gambar II.23
Jumlah TK/ Sederajat Menurut Kecamatan di Kabupaten Pemalang
Tahun 2020-2022

Jumlah SD/ sederajat di Kabupaten Pemalang juga menunjukkan kenaikan. Bangunan SD/ sederajat yang pada tahun 2017 berjumlah 837 unit bertambah menjadi 842 unit di tahun 2022. Jumlah SD/ sederajat tiap kecamatan dari tahun 2017 sampai 2022 disajikan pada diagram berikut.

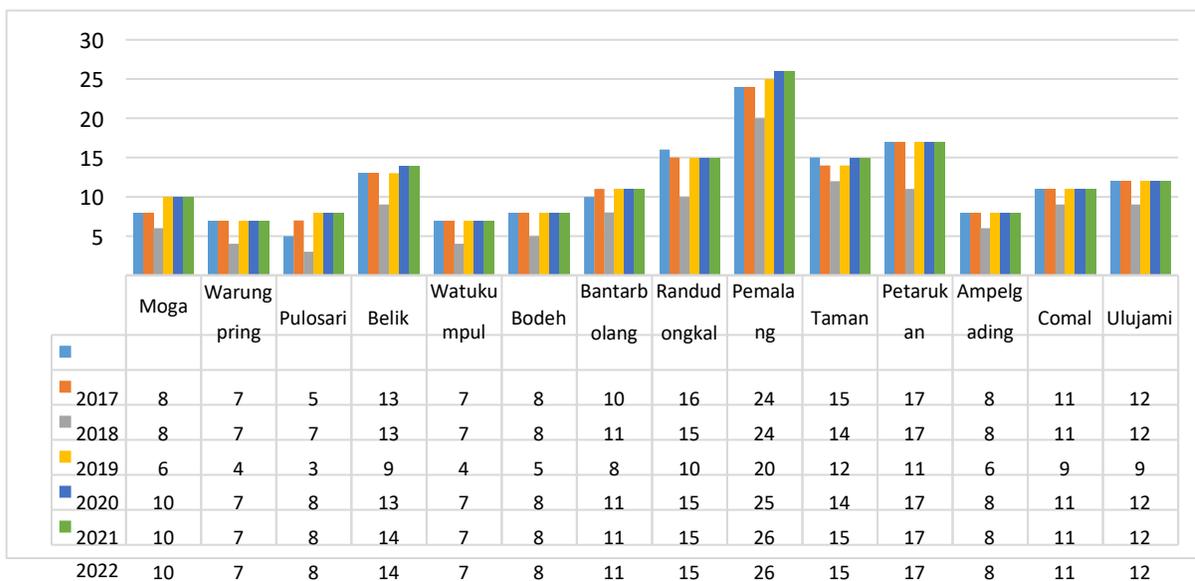


Sumber: Kabupaten Pemalang dalam Angka

Gambar II.24

Jumlah SD/Sederajat Menurut Kecamatan di Kabupaten Pemalang, Tahun 2017-2022

Jumlah SMP/ sederajat di Kabupaten Pemalang juga mengalami peningkatan dalam waktu 6 tahun terakhir. Pada tahun 2017, jumlah SMP/ sederajat sebanyak 161 unit yang meningkat menjadi 169 unit di tahun 2022. Perkembangan jumlah SMP/ sederajat masing-masing kecamatan dalam kurun waktu 2017 sampai 2022 dapat dilihat pada diagram berikut.

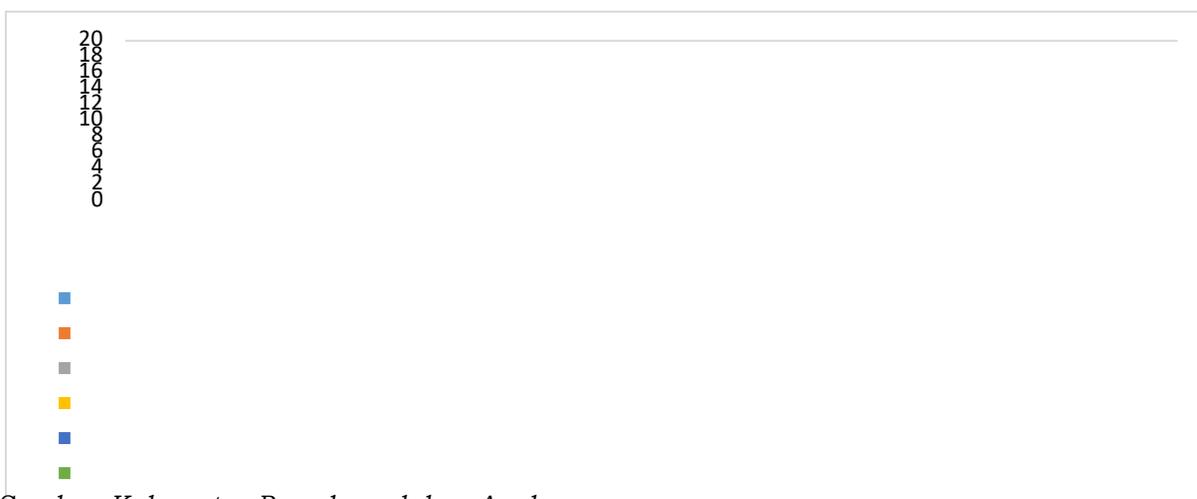


Sumber: Kabupaten Pemalang dalam Angka

Gambar II.25

Jumlah SMP/Sederajat Menurut Kecamatan di Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2022

Selama kurun waktu 2017 sampai dengan tahun 2022, jumlah SMA/ sederajat di Kabupaten Pemalang hanya bertambah 1 unit sekolah. Pada tahun 2017, terdapat 93 unit sekolah dan pada tahun 2022 menjadi 94 unit sekolah. Data perkembangan jumlah sekolah SMA/ sederajat tiap kecamatan disajikan pada diagram berikut.



Sumber: Kabupaten Pemalang dalam Angka.

Gambar II.26

Jumlah SMA/Sederajat Menurut Kecamatan di Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2022

3. Infrastruktur Kesehatan

Infrastruktur kesehatan adalah rangkaian fasilitas, sumber daya, dan sistem yang dibangun untuk menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat. Infrastruktur ini mencakup berbagai elemen yang membentuk dasar penyelenggaraan layanan kesehatan dan membantu mencapai tujuan kesehatan masyarakat. Infrastruktur kesehatan yang baik merupakan prasyarat untuk memberikan layanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan berkualitas kepada masyarakat. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kesehatan memerlukan investasi yang berkelanjutan dari pemerintah dan pihak terkait guna memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat konsisten meningkat.

Tabel II.21

Fasilitas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,006 17	0,005 37	0,005 43	0,006 92	0,006 69
Rasio Puskesmas per satuan penduduk	0,019	0,017	0,017	0,017	0,019
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	-	92	100	100	100
Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	84,36	83,05	84,83	83,53	Na
Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (puskesmas)	72,73	92	92	92	92
Persentase rumah sakit terakreditasi	87,5	87,5	87,5	77,78	100
Persentase sarana kefarmasian dan alkes yang memenuhi standar	97	98	98	98	98
Persentase PIRT yang memenuhi syarat keamanan pangan	60	70	75	80	82

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa di Tahun 2022 capaian rasio rumah sakit per satuan penduduk sebesar 0,069 masih sama dengan di Tahun 2021. Hal ini sama dengan rasio puskesmas persatuan penduduk yang capaiannya tahun 2022 sebesar 0,019 masih sama dengan capaian tahun 2021. Selain itu ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas tahun 2022 sudah mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan jenis obat esensial dan vaksin imunisasi dasar lengkap di puskesmas sudah

terpenuhi. Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan tahun 2022 sebesar 86,7 persen, dimana yang terdaftar JKN (aktif/non aktif) dari 1.337.332 jiwa (86,72 persen), belum terdaftar sekitar 204.720 jiwa (13,28 persen). Untuk menuju UHC syarat kepesertaan 95 persen keaktifan 75 persen.

Selama Tahun 2017-2022, terjadi peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan, meliputi Puskesmas yang terakreditasi sebesar 27,27 persen di Tahun 2017 dan pada tahun 2022 naik menjadi sebesar 92 persen. Sarana farmasi dan alat kesehatan yang sesuai standart di Tahun 2017 sebesar 87 persen naik menjadi sebesar 98 persen di Tahun 2022. Persentase PIRT yang memenuhi syarat keamanan pangan sebesar 50 persen di Tahun 2017 naik menjadi sebesar 82 persen di Tahun 2022. Sedangkan untuk rumah sakit yang terakreditasi mengalami peningkatan dari sebesar 87,5 persen di Tahun 2017 naik menjadi sebesar 100 persen di Tahun 2022 yang menunjukkan seluruh rumah sakit yang ada di Kabupaten pemalang telah terakreditasi dengan baik.

4. Prasarana dan Sarana Lainnya

Persentase penduduk yang memiliki akses air minum menunjukkan penurunan dari 90,66 persen di tahun 2021 menjadi 88,01 persen pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan keterbatasan intervensi program Pamsimas dilaksanakan pada tahun 2022 yang hanya 5 desa/kelurahan serta jaringan PDAM yang belum mampu berkembang secara maksimal. Namun demikian persentase penduduk yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik menunjukkan peningkatan dari 94,61 persen di Tahun 2021 menjadi 99,45 persen di Tahun 2022. Selanjutnya, persentase drainase dalam kondisi baik juga menunjukkan peningkatan dari 75,20 persen di Tahun 2021 menjadi 76,06 persen di Tahun 2022.

Terkait dengan infrastruktur konektivitas wilayah, persentase panjang jalan kondisi mantap di Kabupaten Pemalang mengalami kenaikan dimana pada tahun 2022 mencapai 73,00 persen. Kondisi ini meningkat dari tahun sebelumnya yakni 2021 yang hanya mencapai 68,28 persen. Selain itu, pemanfaatan tata ruang wilayah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mencapai 100 persen.

Dari sisi pengentasan kawasan kumuh, maka terlihat berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh, dimana di Tahun 2017 seluas 2,43 persen wilayah Kabupaten Pemalang merupakan kawasan permukiman kumuh dan di Tahun 2021 hanya tinggal seluas 0,97 persen wilayah Kabupaten Pemalang yang masih merupakan kawasan permukiman kumuh. Adapun Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tertangani di Kabupaten Pemalang di Tahun 2022 sebesar 29,09 meningkat dari Tahun 2021 sebesar 25,51 persen meningkat dari Tahun 2020 yang sebesar 21,67 persen. Dimana jumlah RTLH yang ditangani di Tahun 2022 sebanyak 2.686 rumah (3,84 persen).

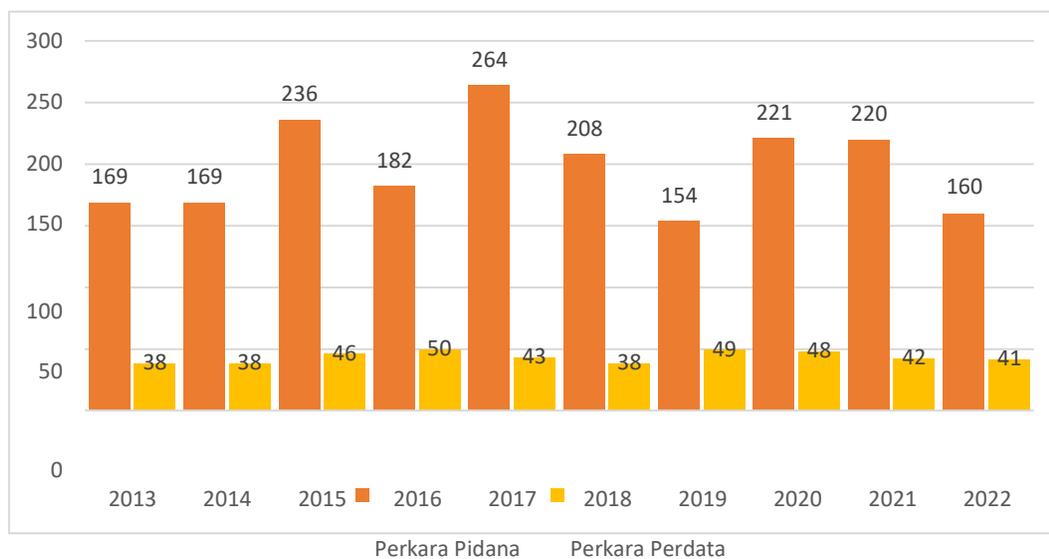
2.3.4 Aspek Daya Saing Iklim Investasi

Aspek daya saing iklim investasi mencakup sejumlah faktor yang mempengaruhi kemampuan suatu wilayah untuk menarik investasi. Daya

saing iklim investasi menjadi krusial karena dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan perkembangan sektor bisnis. Oleh karena itu, memahami dan memperbaiki aspek tersebut dapat membantu suatu wilayah untuk meningkatkan daya saing iklim investasinya, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi yang berkelanjutan.

1. Keamanan dan Ketertiban

Kondisi keamanan dan ketertiban mendukung dalam penciptaan iklim investasi. Ketika suatu daerah aman dan tertib, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi di daerah tersebut. Salah satu indikator keamanan dan ketertiban adalah kasus kejahatan.



Sumber: Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2014-2023

Gambar II.27

Jumlah Perkara Pidana (Biasa) dan Perkara Perdata (Gugatan) yang Masuk Pengadilan Negeri Kabupaten Pemalang, 2013-2022

Jumlah perkara pidana dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2022 menunjukkan tren yang fluktuatif. Jumlah tertinggi terjadi di tahun 2017 sebanyak 264 perkara, dan pada tahun 2022 menunjukkan angka terendah (160 perkara) dalam kurun waktu tersebut. Kondisi yang fluktuatif ini juga terlihat dari jumlah perkara perdata. Pada tahun 2013, terdapat 38 perkara perdata yang masuk dan meningkat terus sampai mencapai angka 50 perkara di tahun 2016. Selanjutnya, terjadi penurunan jumlah perkara perdata yang masuk sampai dengan tahun 2018 yang menunjukkan angka 38 perkara. Pada 2019 meningkat lagi menjadi 49 perkara yang kemudian terus turun menjadi 41 perkara perdata di tahun 2022.

2. Kemudahan Perijinan

Beberapa komponen dalam mendukung kemudahan perijinan adalah regulasi dan pelayanan perijinan. Dari segi regulasi, beberapa regulasi yang mendukung, yaitu Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang yang dirubah melalui Peraturan Bupati Pemalang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.

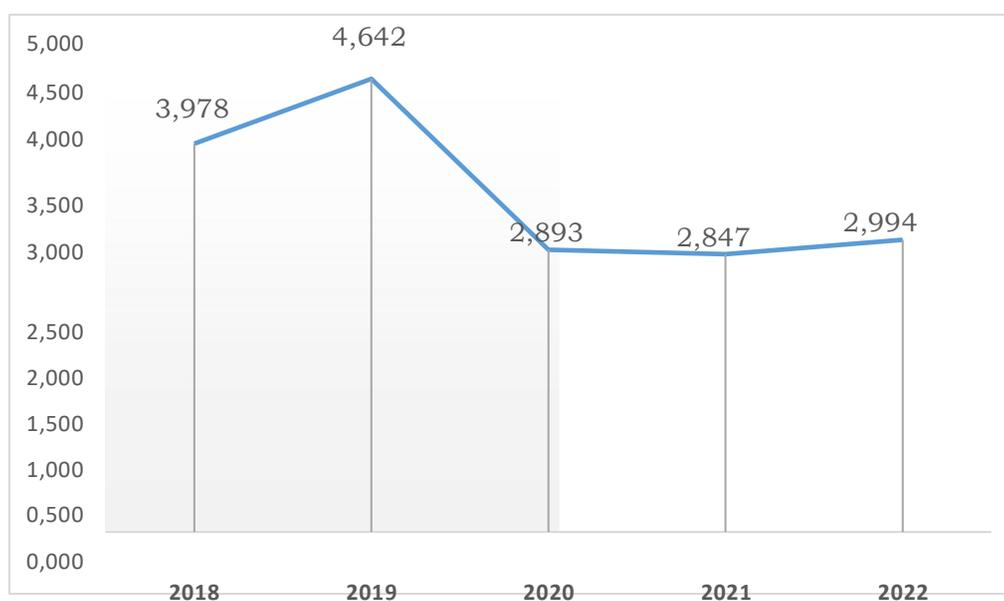
Selain regulasi, pelaksanaan pelayanan perijinan yang efektif diperlukan untuk lebih menarik investor. Penerapan aplikasi *Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS-RBA) akan lebih mempermudah dalam pengurusan perijinan. Dalam perkembangannya, aplikasi ini akan diintegrasikan dengan data spasial, yaitu peta Rencana Detil Tata Ruang Kota.

3. Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merujuk pada kemampuan suatu wilayah, baik tingkat lokal maupun regional, untuk bersaing dan berhasil dalam menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Daya saing daerah mencakup sejumlah faktor yang memengaruhi kemampuan suatu wilayah untuk menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Daya saing daerah bukan hanya tentang keunggulan ekonomi, tetapi juga melibatkan aspek-aspek sosial, lingkungan, dan keberlanjutan. Upaya untuk meningkatkan daya saing daerah biasanya melibatkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan inovasi. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan matang dan kolaborasi dalam mewujudkan daya saing daerah yang mumpuni.

Daya saing daerah dapat terlihat dari indikator indeks daya saing daerah. Adapun indeks daya saing daerah di Kabupaten Pemalang secara umum mengalami penurunan dibandingkan beberapa tahun yang lalu dimana pada tahun 2019 sempat mencapai 4,642 dan menurun hingga tahun 2022 menjadi sebesar 2,994. Pencapaian nilai daya saing daerah Kabupaten Pemalang di setiap tahun masih termasuk kategori tinggi, dengan beberapa dukungan beberapa komponen komposit pembentuk nilai daya saing daerah. Komponen-komponen Daya Saing Daerah adalah satu kesatuan sistem yang membentuk daya saing daerah secara keseluruhan. Indikator membentuk nilai komposit dimensi. Dimensi membentuk nilai komposit Pilar. Pilar membentuk nilai komposit faktor/aspek utama. Aspek utama inilah yang membentuk nilai komposit Daya Saing Daerah Kabupaten.

Di tahun 2022 aspek pembentuk utama yang mendukung tingginya nilai daya saing daerah adalah di aspek Faktor Penguat / *enabling environment*, hal ini menggambarkan bahwa saat ini Kabupaten Pemalang memiliki kekuatan di pilar kelembagaan, infrastruktur dan perekonomian daerah yang menjadi komposit pembentuk aspek Faktor penguat/ *Enabling environment* tersebut. Namun Kabupaten Pemalang memiliki kelemahan di aspek pasar/ market, ekosistem inovasi dan sumber daya manusia, hal ini tergambar dari rendahnya nilai beberapa pilar pendukungnya antara lain, efesiensi pasar, pendidikan dan ketrampilan, dan kapasitas inovasi.



Sumber: BRIN, 2018-2022

Gambar II.28
Indeks Daya Saing Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2022

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum akan menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1. Penunjang Pemerintahan

Kinerja utama urusan perencanaan pembangunan dapat dilihat dari nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), adalah komponen perencanaan dan persentase dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang baik. Reformasi Birokrasi merupakan salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arah Reformasi Birokrasi berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Pada Tahun 2022, IRB Kabupaten Pemalang sebesar 61,76 (kategori B).

Indeks Persepsi Anti Korupsi mengalami penurunan capaian apabila dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan pada tahun 2022 terdapat bukti penyimpangan kebijakan rotasi mutasi ASN dan pengadaan barang dan jasa.

Dari sisi pelayanan publik kepada masyarakat, terlihat adanya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pemalang dimana indeks pelayanan publik meningkat menjadi 82,22 di tahun 2022. Capaian tersebut didukung dengan adanya peningkatan indeks inovasi daerah yang meningkat di tahun 2022 menjadi 48, dimana pada tahun sebelumnya hanya mencapai 30,32.

Tabel II.22

Penunjang Pemerintahan Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2022

Indikator	Tahun		
	2020	2021	2022
SAKIP	67,7	68,88	68,93
IRB	61,09	62,91	61,76 (kategori B)
Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,5	79,78	79,41
SPBE	NA	2,49	2,23
Indeks Kepuasan layanan Kelitbangan	85	82,91	83,34
Indeks Pelayanan Publik	81,75	81,99	82,22
Indeks Inovasi Daerah	796	30,32	48

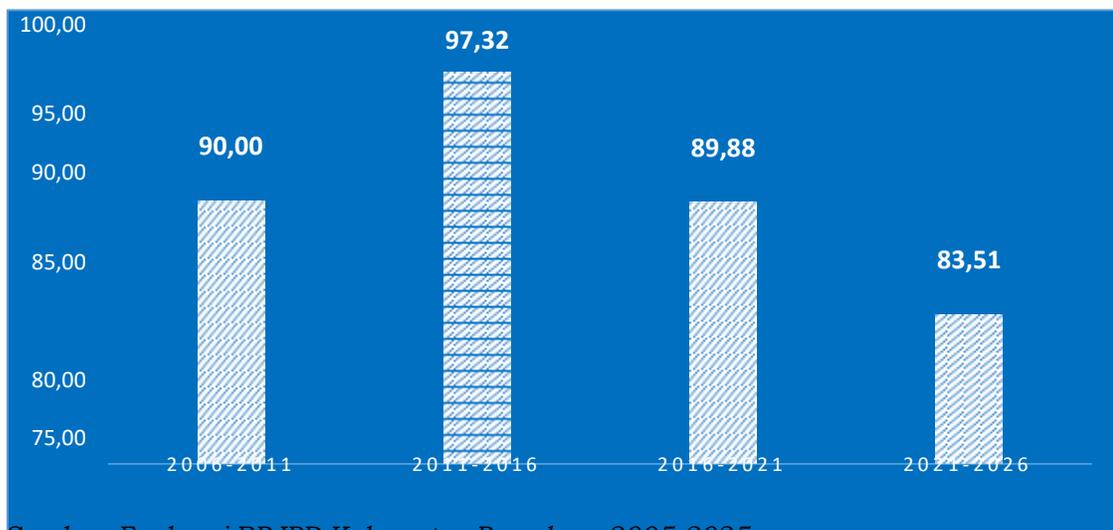
Sumber: RKPD Kabupaten Pemalang, 2024

2.5 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025

Pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Pemalang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang 2005-2025. RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari kehendak masyarakat dengan tetap memperhatikan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Adapun dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, Kabupaten Pemalang memiliki visi yaitu “Kabupaten Pemalang Yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera”. Dalam mewujudkan visi tersebut, pembangunan jangka panjang dibagi menjadi empat tahapan pembangunan jangka menengah yaitu:

1. RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2011 yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2011;
2. RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016 yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016;
3. RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.
4. RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.



Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Pemalang 2005-2025

Gambar II.29

Capaian Hasil Pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa tingkat capaian kinerja RPJPD Kabupaten Pemalang pada RPJMD Periode I (2006-2011) adalah Tinggi (90 persen). Sementara itu, tingkat capaian kinerja RPJPD Kabupaten Pemalang pada RPJMD Periode II (2011-2016) adalah Sangat Tinggi (97,32 persen) dan tingkat capaian kinerja RPJPD Kabupaten Pemalang pada RPJMD Periode III (2016-2021) dan Periode IV (2021-2026) adalah tinggi dengan skor berturut-turut 89,88 persen dan 83,51 persen.

Jika dijabarkan, maka tingkat capaian kinerja pada sasaran pembangunan RPJMD periode I (2006-2011) sebesar 90 persen dengan Predikat kinerja Tinggi. Hal ini dikarenakan dari 10 sasaran RPJMD dengan 72 indikator sasaran yang rata-rata bersifat kualitatif, hanya ada 7 indikator sasaran yang bersifat kuantitatif. Sehingga perhitungan capaian kinerja berdasarkan 7 indikator sasaran yang memiliki target capaian kinerja. Sedangkan dari pembangunan RPJMD periode II, dari 37 sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016, terdapat total 68 indikator sasaran. Dari indikator sasaran tersebut ditemukan indikator sasaran yang tidak memiliki target yaitu sejumlah 19. Tingkat capaian kinerja pada sasaran pembangunan RPJMD periode II (2011-2016) ialah sebesar 97,32 persen atau Sangat Tinggi.

Pembangunan jangka menengah periode III terlihat dari 25 sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021, dimana terdapat total 56 indikator sasaran. Dari indikator sasaran tersebut ditemukan indikator sasaran yang tidak memiliki nilai yaitu Indeks Gini dikarenakan indeks tersebut hanya sampai di tingkat Provinsi, tidak sampai ke level kabupaten dan tidak tersedianya data PDRB di tingkat Kecamatan. Tingkat capaian kinerja pada sasaran pembangunan RPJMD periode III (2016-2021) adalah sebesar 89,88 persen atau tinggi. Sedangkan pada RPJMD tahap terakhir dengan menggunakan dasar hitung pencapaian tahun 2022, dari 21 sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, terdapat total 34 indikator sasaran. Data capaian/realisasi indikator sasaran menggunakan data tahun 2022 sementara target pencapaian yang digunakan tetap tahun 2026 sehingga masih banyak ditemukan tingkat capaian yang rendah. Secara

umum, tingkat capaian kinerja pada sasaran pembangunan RPJMD periode IV (2021-2026) adalah sebesar 83,51 persen atau Tinggi.

Sebagai salah satu masukan untuk penyusunan kebijakan pembangunan ke depan, maka perlu ditelaah faktor penghambat dan faktor pendorong pembangunan jangka panjang Kabupaten Pemalang. Pada pencapaian target RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025, dapat ditemui 4 (empat) aspek faktor pendorong yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Pemerintahan

Secara garis besar faktor-faktor dalam aspek pemerintahan dalam pelaksanaannya berkaitan dengan kapasitas sumber daya aparatur dalam pelaksanaannya, program-program apa saja yang dicanangkan dan dilaksanakan, regulasi atau kebijakan yang diambil, dan anggaran pemerintah dalam menunjang kegiatan tersebut. Beberapa dari hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2005-2025 yang tercapai didukung oleh aspek pemerintahan. Contoh faktor pendorong ini yaitu adanya kebijakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan yang mewajibkan semua perangkat daerah mempunyai minimal satu desa dampingan. Namun pada perkembangannya, dalam rangka pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Pemalang, Satu Perangkat Daerah melakukan pendampingan terhadap tiga sampai empat desa. Selain itu, faktor tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 dari aspek pemerintah yaitu adanya faktor pendorong dari segi perencanaan dan penganggaran sudah menggunakan aplikasi yang terintegrasi yaitu SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) sesuai amanat Permendagri Nomor 70 tahun 2019 sehingga terdapat konsistensi dan integrasi program dalam dokumen RPJMD, RKPD dan APBD.

Faktor pendorong lainnya di bidang pemerintahan dapat dilihat dari persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan indeks inovasi daerah. Indeks inovasi daerah di Kabupaten Pemalang diukur mulai tahun 2019 dengan nilai 170 dan meningkat pada tahun 2020 dengan nilai 796 masuk kategori inovatif. Di Tahun 2021, metode pengukuran berubah dan tidak dapat disetarakan, Kabupaten Pemalang mendapat nilai sebesar 30,32 tetap masuk dalam kategori inovatif. Untuk meningkatkan nilai Indeks Inovasi Daerah, perangkat daerah, kecamatan, pemerintahan desa, dan masyarakat telah didorong untuk melakukan inovasi. Di antaranya melalui lomba Kreativitas dan Inovasi tingkat Kabupaten Pemalang, maupun lomba inovasi pelayanan publik, dan inovasi-inovasi tersebut telah diterapkan. Inovasi-inovasi tersebut diantaranya adalah :

- a. E-Commerce AMANDEWI (Disparpora);
- b. Si Bolang Mahir Plus Plus (Si Buah Hati Lahir Pulang Membawa Akta Kelahiran Plus KK & KIA Plus JKN-KIS – Puskesmas Rowosari);
- c. Gebrak Kaki (Gerakan Bersama Baca Buku KIA untuk Menekan Kematian Ibu – Puskesmas Kalimas);
- d. SITIRTA (Sistem Informasi Terpadu Tirta Mulia – PDAM Kabupaten Pemalang);
- e. PIMPRO (Pengendalian Multi Proyek – DPU TR Kab. Pemalang);
- f. Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD – Disdukcatpil

- Kab. Pemalang);
- g. SIEMAS (Sistem Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan - Bakesbangpol kab. Pemalang);
 - h. Batu Akik (bayar non tunai uji KIR Kendaraan – Dishub Kab. Pemalang);
 - i. Sambatsung (Sistem Aduan Masyarakat Berbasis Elektronik Langsung – DPMPTSP Kb. Pemalang);
 - j. Aplikasi www.gelanganting.com (Gerakan penanggulangan Stunting – Desa Losari Kec. Ampelgading);
 - k. Aplikasi Anak Bunda (Aplikasi anak balita untuk data antropometri dengan kartu – Desa Bulakan kec. Belik);
 - l. Gemari Ceting Kayu (Gerakan Makan Ikan Cegah Stunting Kakang Mbakyu – Desa Kalirandu Kec. Petarukan);
 - m. Nasi Ceting (Nutrisi untuk cegah stunting – Desa Surajaya kec. Pemalang)
 - n. Klanting (Kelompok Laki-laki anti Stunting – Desa Tumbal Kec. Comal);
 - o. Buka Cawet (Basis Terpadu Keterbukaan Data Desa Cawet – desa Cawet Kec. Watukumpul);
 - p. SIPILKETOS (Sistem Pemilihan Ketua Osis – SMPN 1 Randudongkal);
 - q. POC TENNAS (pupuk organic cair tempe nasi nanas – Siti Rokhamah desa Gunungtiga Kec. Belik);
 - r. WEDUS SI DALANG (WISATA EDUKASI SENI DAN BUDAYA PEMALANG – Anggi Supriyono desa Gombong Kec. Belik);
 - s. FAN PLASMODIUM FLINDER AIR (Kipas Pembasmi Kuman Di Dalam Ruang – Maghfiroh & Muchsolih Desa Moga Kec. Moga);
 - t. TEPABINGLE (Teknologi Paving Biopori Single - Dias Fajar Fathan Al Azka siswa SMAN 2 Pemalang);
 - u. Salep Ketajamer (Limbah Daun Ketapang Gugur & Rimpang Jahe Merah - Susyatun Amanah, Kun Mustafid, Rofiatun Ikhsaniah siswa SMK PGRI 3 Randudongkal).

Adanya kerja sama dengan perguruan tinggi, beberapa UMKM di Kabupaten Pemalang telah diberikan fasilitasi dalam pengelolaan usahanya, dari kepemilikan perizinan, manajemen, bahkan digitalisasi pemasaran melalui *marketplace*.

Selain itu, faktor pendorong dari aspek pemerintahan tidak selalu membuat capaian hasil 100% dalam pelaksanaan kinerja RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2005-2025. Hal ini sangat wajar terjadi. Adanya dukungan pendanaan dari APBN melalui program bantuan stimulasi perumahan swadaya (BSPS), dukungan DAK fisik bidang perumahan (DAK Perumahan), bantuan keuangan pemerintahan desa (Bankeu Pemdes) dari APBD Provinsi, rehabilitasi RTLH dari APBD Kabupaten, program pembangunan rumah susun baik dari APBN membuktikan aspek pemerintah sudah banyak mempengaruhi capaian target kinerja. Juga pada indikator peningkatan sanitasi masyarakat didukung adanya faktor pendorong komitmen yang tinggi dari Pemerintah Kabupaten Pemalang dimana Kabupaten Pemalang sudah memperoleh sertifikasi *Open Defecation Free* (ODF) tingkat Kabupaten pada tahun 2022. Beberapa upaya yang dilakukan diantaranya mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur bidang sanitasi, melaksanakan promosi kesehatan terkait PHBS,

melaksanakan kampanye publik/advokasi (*public campaign/advocacy*) terkait sanitasi serta pembentukan Forum Pemalang Sehat (FPS).

2. Aspek Infrastruktur

Aspek ini meliputi kondisi fisik, lingkungan dan sarana prasarana pendukung agar sebuah target terlaksana dan tercapai. Terdapat beberapa faktor pendorong dimaksud yaitu adanya dukungan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas dan fungsi mendorong tercapainya indikator Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat. Hal ini dibuktikan pada bulan September 2021 Pemerintah Kabupaten Pemalang menambah satu mobil pemadam kebakaran (damkar) dan satu mobil water supply sebagai sarana dan infrastuktur. Sebab, bertambahnya armada baru damkar akan menambah akselerasi damkar karena dua armada baru tersebut mempunyai teknologi terbaru. Mobil tersebut dapat melakukan penyemprotan sambil berjalan serta dilengkapi dengan *body spray* yang dapat melindungi mobil jika menembus api atau terkepung api. Sedangkan *water supply* bisa untuk menyediakan cadangan air ke mobil tempur serta bisa juga digunakan sebagai mobil tempur karena sistemnya sama dengan mobil damkar tempur. Mobil damkar *double cabin* memiliki daya pancar 25 bar, dengan kapasitas 4.000 liter, dengan sistem penggerak, dan sistem *pump and roll*.

Selain itu, contoh faktor pendorong lainnya dari aspek infrastruktur, lingkungan dan fisik yaitu dalam meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun di tingkat lanjutan. Didukung pembiayaan kesehatan masyarakat meningkat, baik dari kepesertaan jaminan kesehatan maupun dari program jaminan kesehatan daerah, serta meningkatnya kerja sama lintas program dan lintas sektor dimana faktor-faktor pendorong tersebut dapat tercapainya indikator Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Pemalang. Hal ini juga diperkuat dari data Usia Harapan Hidup (AHH) tahun 2022 sebesar 73,65 tahun yang terus meningkat tiap tahunnya dari 66,38 tahun pada tahun 2005. Serta menurut data dari Dinas Kesehatan, fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Pemalang sebagai penunjang dalam fasilitas dalam bidang kesehatan tahun 2022 mencakup 9 rumah sakit, 25 puskesmas, 1.220 posyandu yang jumlahnya terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, dan 141 poskesdes yang terus meningkat.

Faktor pendorong selanjutnya yaitu dapat menyediakan infrastruktur yang memadai sehingga menarik investor dalam mewujudkan industri, jasa, dan perdagangan guna mendorong kemajuan daerah menjadi prioritas di Kabupaten Pemalang. Hal ini ditunjukkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 yang mengatur peruntukan ruang di Kabupaten Pemalang. Ditunjang dengan capaian tahun 2022 persentase panjang jalan kondisi mantap (baik dan sedang) sebesar 73 persen atau sekitar 558,98 km dari total panjang jalan kabupaten sebesar 765,72 km yang terbagi ke dalam 305 ruas jalan. Aspek infrastruktur ini tidak bisa dilepaskan dari dukungan anggaran pembangunan melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) dari Pusat dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah.

3. Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi ini sendiri berkaitan dengan kondisi makroekonomi dan mikroekonomi di luar pemerintahan. Pada faktor pendorong aspek ekonomi yaitu adanya kolaborasi pendanaan dari swasta atau CSR (*Corporate Social Responsibility*). Pemerintah Kabupaten Pemalang membuka kesempatan bagi pihak swasta untuk melakukan gotong royong dalam pendanaan dalam berbagai termasuk di bidang perumahan dan merupakan gagasan yang sangat inovatif. Namun ketercapaian dari faktor pendorong ini kurang maksimal. Hal ini dibuktikan dari indikator presentase permukiman layak huni di Kabupaten Pemalang belum tercapai. Dari total rumah di Kabupaten Pemalang sebanyak 317.947 unit yang merupakan RTLH sebanyak 54.833 unit. Menurut data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2022 tercatat mencapai 2.686 unit rumah. Berarti kondisi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pemalang masih relatif tinggi.

Contoh lain faktor pendorong pada aspek ekonomi yaitu adanya pendapatan yang naik karena daya beli masyarakat yang tinggi sehingga menyebabkan distribusi perdagangan lancar/tersalurkan dengan baik, produk UMKM meningkat, produk diminati pembeli, dan adanya kebijakan pemerintah yang mendukung UMKM. Faktor pendorong tersebut dapat tercapainya indikator persentase pertumbuhan koperasi. Menurut data dari Diskoperindag Kabupaten Pemalang, per tahun 2022 jumlah UMKM di Kabupaten Pemalang meningkat pesat. Sebelumnya berjumlah sekitar 15.664 kini meningkat menjadi 16.550. Serta dapat diketahui bahwa jumlah koperasi di Kabupaten Pemalang tahun 2005- 2020 terus berfluktuasi yang cenderung stabil direntang nilai 280 koperasi non KUD dan jumlah yang tetap 22 KUD. Hal ini berarti UMKM dan koperasi terdapat hubungan, koperasi berperan dalam penyelenggaraan UMKM dimana sebagai penyedia modal dalam kegiatan UMKM. Modal adalah salah satu unsur utama dalam menyelenggarakan kegiatan usahawan, dengan adanya modal yang cukup banyak atau besar, para usahawan dapat mengembangkan usahanya lebih besar lagi.

Pemerintah Kabupaten Pemalang juga melakukan kegiatan dengan adanya pendataan warga untuk mendapatkan BPUM (Banpres Produktif Usaha Mikro). Pemerintah Kabupaten Pemalang tercatat pada tahun 2021 mengusulkan 150 ribu calon penerima. Program ini telah diberikan oleh pemerintah sejak tahun 2020 yang dapat berguna bagi pelaku bisnis agar meningkatnya perekonomian dari sektor perdagangan. Selain itu, diadakan pula pasar murah oleh pemerintah agar dapat mendorong perekonomian serta menstabilkan harga dan pasokan barang. Operasi pasar murah tersebut merupakan kerjasama Diskoperindag Kabupaten Pemalang dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Pemalang.

4. Aspek Sosial Budaya

Aspek sosial budaya meliputi partisipasi masyarakat, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan sebagainya. Salah satu contoh aspek sosial budaya yaitu adanya faktor pendorong meningkatnya proporsi wanita yang bekerja di sektor pemerintahan, menduduki posisi yang strategis di Pemerintahan Daerah serta jumlah anggota DPRD dari wanita yang semakin

meningkat sehingga indikator dalam Indeks Pembangunan Gender dapat tercapai. Hal ini tercatat pada dua tahun terakhir Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pemalang sebesar 86,49 pada tahun 2021 dan 86,72 pada tahun 2022.

Contoh selanjutnya yaitu adanya etos kerja yang tinggi dari tenaga/relawan kebencanaan dan dukungan moral yang tinggi dari unsur pimpinan dan sarpras dari BNPB. Seperti pada bencana banjir rob yang berlokasi di kawasan Pesisir Kabupaten Pemalang serta bencana tanah longsor yang berlokasi di wilayah pegunungan yang langsung diadakannya evakuasi yang melibatkan petugas BPBD Pemalang dibantu Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos KBPPP) Kabupaten Pemalang, warga, dan relawan kemanusiaan. Upaya dalam penanganan banjir rob serta evakuasi terus dilakukan BPBD Pemalang saat terjadi bencana alam agar masyarakat yang terdampak bencana dapat terselamatkan. Adanya dukungan seperti diadakannya pelatihan kemampuan evakuasi banjir dan tanah longsor juga telah dilakukan. Pelatihan tersebut merupakan permintaan dari relawan Kabupaten Pemalang, dimana relawan tersebut berkomunikasi dengan BPBD Pemalang tentang keinginan dan mendapat pelatihan teknis kebencanaan. Kemudian BPBD Kabupaten Pemalang menanggapi usulan tersebut dengan baik, dan kemudian merealisasikan dalam bentuk pelatihan.

Faktor pendorong lain dari aspek sosial budaya adalah adanya sosialisasi yang intensif kepada masyarakat terkait dokumen kependudukan. Salah satunya adanya kegiatan jemput bola dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pemalang mengunjungi langsung lokasi di beberapa kecamatan dan melakukan pertemuan dengan Petugas Desa yang ada di Kecamatan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk urgensi dalam penerapan pelayanan permohonan *online* yang dapat memutus rantai percaloan. Warga masyarakat yang gagap teknologi atau juga yang tidak bisa mengoperasikan HP difasilitasi oleh Petugas Desa dengan adanya link khusus berbasis google form untuk pengurusan dokumen administrasi kependudukan. Kegiatan tersebut dapat menunjang dari indikator Persentase kepemilikan dokumen kependudukan sebesar 79,61 persen, dimana hasil kinerja menunjukkan tercapainya indikator tersebut.

Pada aspek sosial budaya yaitu indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat tercapai karena karakteristik sosial yang berpengaruh pada partisipasi politik, meskipun status pemilih berbeda satu dengan lainnya, terdapat banyak yang peduli terhadap hak politiknya. Hal ini dapat dibuktikan dari tingkat partisipasi pemilih masyarakat Pemalang dalam pemilu seperti pilkada dan pileg mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2015 sebesar 59,36 persen dan tahun 2020 tercatat sebesar 69,10 persen. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Pemalang yang didukung dengan kegiatan Pendidikan Politik Bagi Warga Negara.

Dari sisi faktor penghambat yang nantinya akan menjadi tantangan bagi perumusan penyusunan kebijakan pembangunan periode selanjutnya, dapat dilihat pada penjabaran berikut:

1. Aspek Pemerintahan

Dalam aspek pemerintahan terdapat beberapa faktor penghambat, seperti belum optimalnya penggalan dan pendataan inovasi yang sudah dilakukan di perangkat daerah, masih banyaknya inovasi yang telah dilaksanakan tapi belum mempunyai payung hukum, belum tersosialisasikan kepada masyarakat, masih adanya hasil inovasi dari hasil pendidikan/pelatihan yang berhenti di perjalanan seiring dengan selesainya ASN melaksanakan diklat. Faktor penghambat lainnya adalah pada awal penggunaan aplikasi SIPD masing sering terjadi gangguan akibat aplikasi masih dalam proses pengembangan sehingga beberapa kali terjadi kesalahan dan harus dilakukan input ulang. Oleh karena itu, pada November 2020 yang lalu Inspektorat Kabupaten Pemalang mengikuti kegiatan Pendampingan Aplikasi SIPD dengan Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan terkait Implementasi aplikasi SIPD yang harus diterapkan oleh seluruh Pemda di Indonesia. Sebab, adanya kendala seperti masih adanya gangguan aplikasi dan sering terjadi kesalahan merupakan salah satu perhatian yang harus segera diselesaikan. Karena aplikasi SIPD merupakan aplikasi yang harus diterapkan oleh seluruh Pemda di Indonesia tidak hanya pada Kabupaten Pemalang, apabila tidak dilaksanakan maka akan berpengaruh pada penundaan/tidak disetujuinya pengajuan anggaran APBD. Namun faktor penghambat tersebut tidak menghambat dalam tercapainya indikator Persentase kesesuaian program dalam RKPD terhadap RPJMD, dan program APBD terhadap RKPD karena indikator tersebut dapat tercapai 100 persen.

Salah satu faktor penghambat lainnya yang mempengaruhi pada kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2005-2025 belum tercapai sampai 100% yaitu masih adanya tenaga kesehatan yang habis masa berlaku sertifikatnya atau belum memiliki sertifikat, pembacaan hasil rontgen tidak bisa dilakukan di luar jam kerja radiologi, unit transfusi darah belum dapat memenuhi kebutuhan pasien, belum terpadunya aplikasi BPJS dengan pendaftaran di rumah sakit. Faktor-faktor tersebut belum dapat tercapainya dalam indikator Persentase capaian standar pelayanan minimal di RSUD Dr. M. Ashari pada bidang kesehatan masih belum terpenuhi. Seperti pada unit transfusi darah di Kabupaten Pemalang masih belum memenuhi kebutuhan pasien. Unit PMI Kabupaten Pemalang mengatakan ada 2 sumber utama pasokan darah di PMI, yakni pendonor yang aktif mendatangi PMI dan *mobile unit* atau pendonor serta kelompok-kelompok yang mendatangi PMI. Jumlah pendonor aktif hanya sekitar 30% dari jumlah keseluruhan, hal ini yang menyebabkan kebutuhan pasien belum terpenuhi. Apalagi masalah BPJS yang belum terpadu dengan pendaftaran rumah sakit. Menurut Disdukcapil Kabupaten Pemalang, adanya masalah verifikasi dan validasi anggota BPJS. Sebanyak 8.943 NIK yang terdaftar tidak ada di database BPJS Kesehatan.

2. Aspek Infrastruktur, Fisik dan Lingkungan

Pada aspek infrastruktur, fisik dan lingkungan terdapat faktor

penghambat yang berdampak pada tidak tercapainya kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2005-2025. Banyak desa di Kabupaten Pemalang yang secara tipologi, kualitas air bakunya tidak memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, misalnya banyak mengandung bakteri *e-coli*, banyak mengandung Fe dan sebagainya, sehingga harus menggunakan sumber air dari wilayah lain sehingga tidak tercapainya indikator Persentase cakupan air bersih. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh (Bhaskoro, 2016) yang menyatakan bahwa Kabupaten Pemalang secara umum mengalami defisit air baku untuk air minum. Ketersediaan air di wilayah Kabupaten Pemalang sebagian besar tidak memenuhi Daya Dukung Lingkungan Air (DDL-air) dalam rangka pemenuhan Kebutuhan Air untuk Hidup Layak (KAHL). Lalu jumlah penduduk Kabupaten Pemalang pada tahun 2022 yang sebesar 1.542.052 jiwa memerlukan air untuk Kebutuhan Air untuk Hidup Layak (KAHL) sebesar 2.673.607.838 m³/tahun. Hal itu menunjukkan bahwa masih perlu banyak tambahan *supply* air baku untuk KAHL untuk wilayah Kabupaten Pemalang.

3. Aspek Ekonomi

Pada aspek ekonomi terdapat beberapa faktor penghambat. Contohnya yaitu pendanaan masih mengandalkan dana dari DAK (Dana Alokasi Khusus) dan belum adanya kolaborasi pendanaan untuk percepatan pelayanan jaringan irigasi sehingga indikator dalam cakupan jaringan irigasi dalam kondisi baik belum tercapai. Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pemalang selama tahun 2020-2022 mengalami fluktuasi dimana tahun 2020 sebesar Rp 3.819.289.000,- menurun di tahun 2021 menjadi Rp 1.792.343.000,- lalu meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi Rp 2.252.039.000,-. Sebab, Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, dimana pemerintah daerah hanya tingkat tertentu masih mungkin dapat mempengaruhi jumlah penerimaannya walaupun kebijakan sepenuhnya tergantung pusat. Sehingga dalam penanganan Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik jika hanya mengandalkan DAK (Dana Alokasi Khusus) kurang efektif dalam pelaksanaannya.

Selain itu, pada indikator persentase pertumbuhan koperasi di Kabupaten Pemalang. Faktor penghambat tersebut yaitu banyak karyawan yang di PHK sehingga beralih ke UKM. Hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang berdampak pada perekonomian sehingga perusahaan memperhentikan/PHK karyawan. Jumlah UKM yang sebelumnya berjumlah sekitar 15.664 unit kini meningkat menjadi 16.550 unit. Aspek ekonomi dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi di Kabupaten Pemalang dimana nilainya cenderung berfluktuasi, nilai tertinggi pada tahun 2005 yaitu 17,25 persen sementara nilai terendah pada tahun 2021 yaitu sebesar 1,53 persen. Adapun di tahun 2020 Kabupaten Pemalang sudah tidak menghitung angka inflasi, maka yang digunakan adalah angka inflasi *sister city* yaitu Kabupaten Tegal. Pada tahun terakhir, tahun 2022 laju inflasi meningkat secara signifikan menjadi 6,31 persen.

Selain dari tingkat inflasi, faktor penghambat dari aspek ekonomi

dapat ditinjau dari kondisi perekonomian melalui PDRB yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD. Nilai PDRB menurut lapangan usaha selama periode pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2005-2025, dari tahun 2005 sampai pada data terakhir tahun 2021 rata-rata mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini juga merupakan salah satu penghambat dalam ketercapaian RPJPD Kabupaten Pemalang dimana adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada multidimensi salah satunya yaitu membuat lesunya perekonomian sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat.

4. Aspek Sosial Budaya

Pada aspek sosial budaya terdapat faktor penghambat diantaranya beberapa masyarakat yang kurang kesadarannya untuk mengurus dokumen kependudukan. Hal ini yang menjadikan perhatian agar menunjang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Penduduk (GISA). Hal ini bertujuan untuk sadar kepemilikan dokumen kependudukan, sadar pemutakhiran data kependudukan, sadar pemanfaatan data kependudukan untuk semua urusan, dan sadar pelayanan Adminduk yang membahagiakan masyarakat. Kesadaran penduduk untuk mengurus dokumen kependudukan di Kabupaten Pemalang harus terus ditingkatkan. Walaupun dalam indikator Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil telah tercapai. Faktor penghambat lain adalah masih adanya keengganan untuk melaksanakan tugas ke luar kota/menginap pada sebagian wanita yang bekerja di pemerintahan sehingga menyebabkan berkurangnya kesempatan untuk pengembangan diri pegawai yang bersangkutan walaupun dalam ketercapaian Indeks Pemberdayaan Gender dapat tercapai. Faktor penghambat lain dari aspek sosial budaya yang belum tercapainya nilai capaian kinerja sampai 100 persen yaitu kurangnya habits/kebiasaan dari masyarakat untuk menjalankan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

5. Aspek Waktu

Aspek waktu merupakan aspek terakhir yang mempengaruhi capaian kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2005- 2025. Maksud dari waktu ini adalah jangka waktu dimana dalam pelaksanaan dari RPJPD tersebut apakah sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan atau tidak. Terdapat hanya ada satu faktor penghambat dari aspek waktu dan hanya terdapat pada faktor penghambat, yaitu ketidaktepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah sebagai penunjang ketercapaian indikator opini hasil audit BPK. Sebab Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). Pada periode pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2005-2025 rata-rata memiliki hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

dengan sekali mendapatkan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada RPJMD tahun 2020-2025.

Adapun evaluasi pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Pemalang ini memiliki kesimpulan dan rekomendasi yang akan menjadi acuan perumusan kebijakan pembangunan jangka panjang ke depan. Adapun kesimpulan pada evaluasi RPJPD Kabupaten Pemalang sebagai berikut:

1. Pada evaluasi RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2005-2025 yang telah dilakukan, diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 90%. Nilai tersebut mendapat predikat penilaian rata-rata realisasi kinerja “TINGGI”. Pencapaian ini bermakna bahwa capaian kinerja RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 hampir memenuhi target persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2. Dokumen RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan telah berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Juga sebagai sebuah dokumen perencanaan jangka panjang yang dapat mengarahkan rencana pembangunan jangka menengahnya yaitu RPJMD selama 4 periode.
3. Namun demikian dokumen RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 yang disusun secara kualitatif, membuat proses evaluasi yang dilakukan sangat kompleks, dan multi tafsir sehingga harus menggali data dan informasi yang multisource, multiyears dan multistakeholders. Penyajian data dan target di dalam dokumen RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 kurang memperhatikan asas sistematis, terarah dan terukur.
4. Terdapat 5 (lima) aspek yang dapat diidentifikasi dalam pencapaian target kinerja pembangunan jangka panjang. Aspek pemerintahan mencakup kapasitas aparatur, dukungan regulasi dan juga pembiayaan bersumber dari pemerintah. Aspek sosial budaya meliputi partisipasi masyarakat, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan sebagainya. Aspek Infrastruktur terkait dengan sarana prasarana yang dibutuhkan, dan juga kondisi fisik serta lingkungan yang ada. Aspek ekonomi terkait dengan peran serta sektor non pemerintah dalam mendukung pembiayaan berbagai kegiatan. Yang terakhir adalah aspek waktu yaitu keterbatasan waktu yang tersedia untuk penyelesaian sebuah kegiatan dan pelaporannya.
5. Aspek-aspek pendorong yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 adalah aspek pemerintahan, aspek ekonomi, aspek infrastruktur dan aspek sosial budaya. Aspek yang mendominasi adalah aspek pemerintahan.
6. Aspek-aspek penghambat yang dominan menjadi kendala pencapaian target kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 adalah aspek pemerintahan, aspek ekonomi, aspek infrastruktur dan aspek sosial budaya dan juga aspek waktu.
7. Kedua kondisi ini bermakna bahwa dalam pencapaian kinerja sebagian sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten Pemalang

Tahun 2005-2025 telah diupayakan secara maksimal dengan dukungan faktor pendorong yang ada, meski pada sebagian sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten Pemalang berbagai aspek tersebut muncul menjadi faktor penghambatnya. Sementara, diantara aspek-aspek penghambat sendiri saling berkaitan. Demikian juga diantara aspek-aspek pendorong yang ada saling berkaitan dalam mendukung pencapaian target kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025.

Secara umum, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan dari hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 ialah sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 harus sepenuhnya mengacu pada regulasi yang berlaku. Orientasi, overview dan bimtek kepada seluruh tim penyusun tentang dokumen perencanaan daerah sangat diperlukan dalam rangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional demi tercapainya satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Di samping itu untuk tercapainya tujuan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah maupun antar Pusat dan Daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Sesuai dengan asas SPPN, penyusunan RPJPD dalam rangka pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan memenuhi prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.
2. Penyusunan rancangan awal RPJPD paling lambat dilaksanakan 1 tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir. Adapun kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN.
3. Penyusunan dokumen RPJPD yang andal membutuhkan data dan informasi yang lengkap, akurat dan akuntabel. Untuk itu sangat penting dilakukan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam sebuah perencanaan ditunjukkan dengan keberadaan data awal yang menjadi baseline sehingga akan memudahkan menentukan target capaian sasaran pokok yang terukur dengan memperhatikan dukungan kapasitas SDM dan juga keuangan daerah.
4. Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045 ditetapkan oleh kepala daerah dan disampaikan kepada seluruh stakeholders, khususnya bagi calon kepala daerah sebelum tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah dimulai.
5. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah,

terpadu menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Untuk itu dokumen RPJPD nantinya harus terus adaptif dengan memperhatikan dinamika yang ada sehingga perlu dilakukan evaluasi minimal 5 tahun sekali, sehingga dokumen RPJPD selalu akomodatif terhadap situasi dan kondisi yang ada

6. Terkait aspek pendorong dan penghambat, perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah di semua bidang melalui berbagai pelatihan dan bimtek. Di samping itu penting untuk menempatkan SDM sesuai kompetensinya. Kinerja SDM yang sesuai kompetensinya dan kapasitasnya sangat berpengaruh terhadap pencapaian target bidang terkait. Penggalan pembiayaan dari sektor private dengan melakukan Public Private Partnership dalam berbagai sektor pembangunan terkait dengan pemenuhan sarana prasarana serta pelayanan publik, sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya di luar pemerintah demi tercapainya kesejahteraan bersama. Peningkatan peran CSR dalam banyak bidang juga sangat mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat. Gotong royong sebagai karakteristik bangsa Indonesia dapat menjadi instrumen dalam mencapai keadilan sosial. Pemberdayaan masyarakat demi meningkatkan peran serta masyarakat dalam berbagai aspek, sehingga masyarakat mempunyai sense of belonging terhadap program-program pemerintah dan mempunyai kepedulian terhadap keberlangsungan dan pemeliharaan hasil program dan kegiatan yang telah berjalan termasuk perlunya peningkatan kesadaran masyarakat akan dokumen kependudukan dan kecerdasan dalam berpolitik. Mendorong kewirausahaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan sehingga tercapai kemandirian, keswadayaan dan kestabilan ekonomi masyarakat secara umum. Pada akhirnya perencanaan yang baik dapat menyediakan alokasi waktu pelaksanaan program kegiatan yang cukup, tepat, dan efisien sehingga diperoleh hasil yang optimal.

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Demografi merupakan ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran, teritorial dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya dan sebab-sebab perubahan tersebut, yang biasanya timbul karena peristiwa kelahiran, kematian dan migrasi (gerak teritorial) dan mobilitas status. Dalam analisisnya, demografi mengedepankan analisis deskriptif dan komparatif berkesinambungan terhadap tren yang ada, pada setiap proses yang terjadi dan hasil yang ditimbulkan, dengan tujuan utama untuk mengembangkan bagian dari teori untuk menjelaskan peristiwa yang dibandingkan dan direncanakannya.

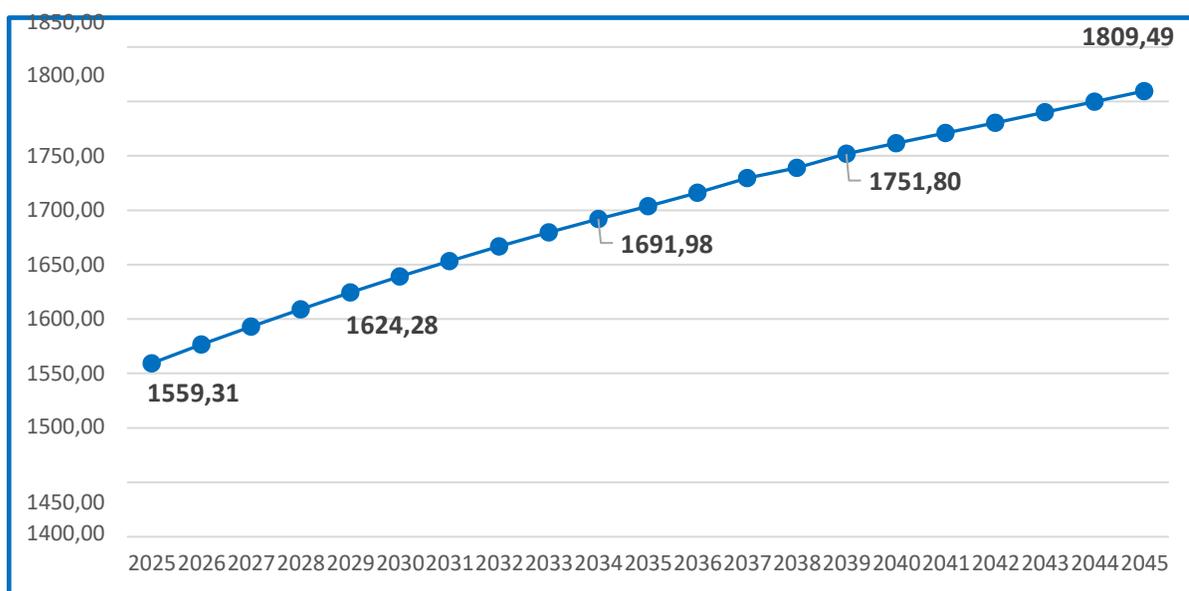
Dalam demografi terdapat aspek kependudukan yang statis dan dinamis sifatnya. Aspek statis ditunjukkan oleh komposisi penduduk misalnya. Komposisi penduduk merupakan gambaran kondisi penduduk pada suatu titik tertentu, yaitu pada saat dilaksanakan sensus atau survei. Sesudah tanggal atau hari tersebut, komposisi penduduk akan berubah. Perubahan komposisi ini terjadi karena perubahan kelahiran, kematian dan

migrasi. Jadi dalam demografi juga dipelajari aspek statis dan aspek dinamis, yang keduanya saling mempengaruhi.

Demografi memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan dan pengembangan sarana (infrastruktur) suatu wilayah atau negara. Dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas masyarakat tidak lepas dari penggunaan sarana pembangunan baik transportasi, perumahan hingga air minum. Oleh karena itu, perencanaan kebutuhan sarana pembangunan menjadi salah satu domain utama perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

2.6.1 Proyeksi Demografi

Kabupaten Pemalang memiliki jumlah penduduk eksisting saat ini mencapai 1.500.754 jiwa, dimana angka ini merupakan jumlah penduduk secara *de-facto* yang mengalami peningkatan seiring pembangunan Pemalang berjalan. Penduduk Kabupaten Pemalang diproyeksikan mencapai 1.809,49 ribu jiwa pada tahun 2045. Angka ini meningkat kisaran 304,36 ribu jiwa dibandingkan jumlah penduduk saat ini. Peningkatan jumlah penduduk setiap tahun ini menjadi salah satu modal dasar bagi pembangunan Kabupaten Pemalang jika dapat dikelola secara optimal dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusianya. Berbagai kebutuhan harus dipenuhi baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya sehingga aksesibilitas dan kompetitivitas akan menjadi bagian dari kemudahan masyarakat Kabupaten Pemalang dalam menyejahterakan kehidupannya.



Sumber: Proyeksi Penduduk BPS Kab Pemalang 2025-2035 (Olahan angka sementara 2036-2045)

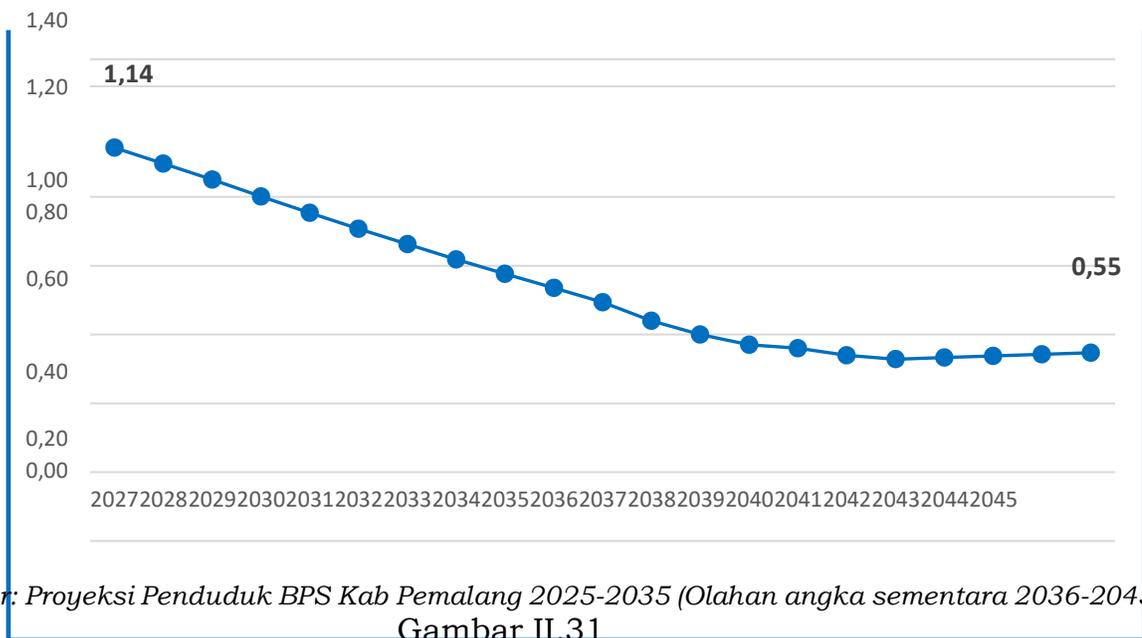
Gambar II.30

Proyeksi Penduduk Kabupaten Pemalang 2025-2045

Laju pertumbuhan penduduk adalah ukuran untuk menggambarkan perubahan jumlah penduduk suatu wilayah atau negara dalam periode waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk diukur sebagai persentase pertumbuhan jumlah penduduk selama periode tertentu. Dalam perencanaan pembangunan jangka panjang, rumusan laju pertumbuhan penduduk menggunakan laju pertumbuhan tahunan agar terlihat bagaimana kondisi pertumbuhan penduduk di setiap tahunnya.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pemalang diprediksikan memiliki pola menurun secara landai. Hal ini terlihat dari laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2025 sebesar 1,14 persen dan menurun hingga

mencapai 0,55 persen di tahun 2045. Hal ini menjadi salah satu poin penting dalam perencanaan pembangunan keluarga dimana keluarga sejahtera menjadi tujuan utama dari program pengendalian penduduk yang selama ini telah dilaksanakan.



Sumber: Proyeksi Penduduk BPS Kab Pemalang 2025-2035 (Olahan angka sementara 2036-2045)

Gambar II.31

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pemalang 2025-2045

Tabel II.23
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Pemalang
Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Ribu Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Ribu Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-Laki	772,03	789,56	828,21	858,96	882,49	899,78
Perempuan	751,59	769,75	810,81	844,76	871,67	892,18
Rasio	102,72	102,57	102,15	101,68	101,24	100,85

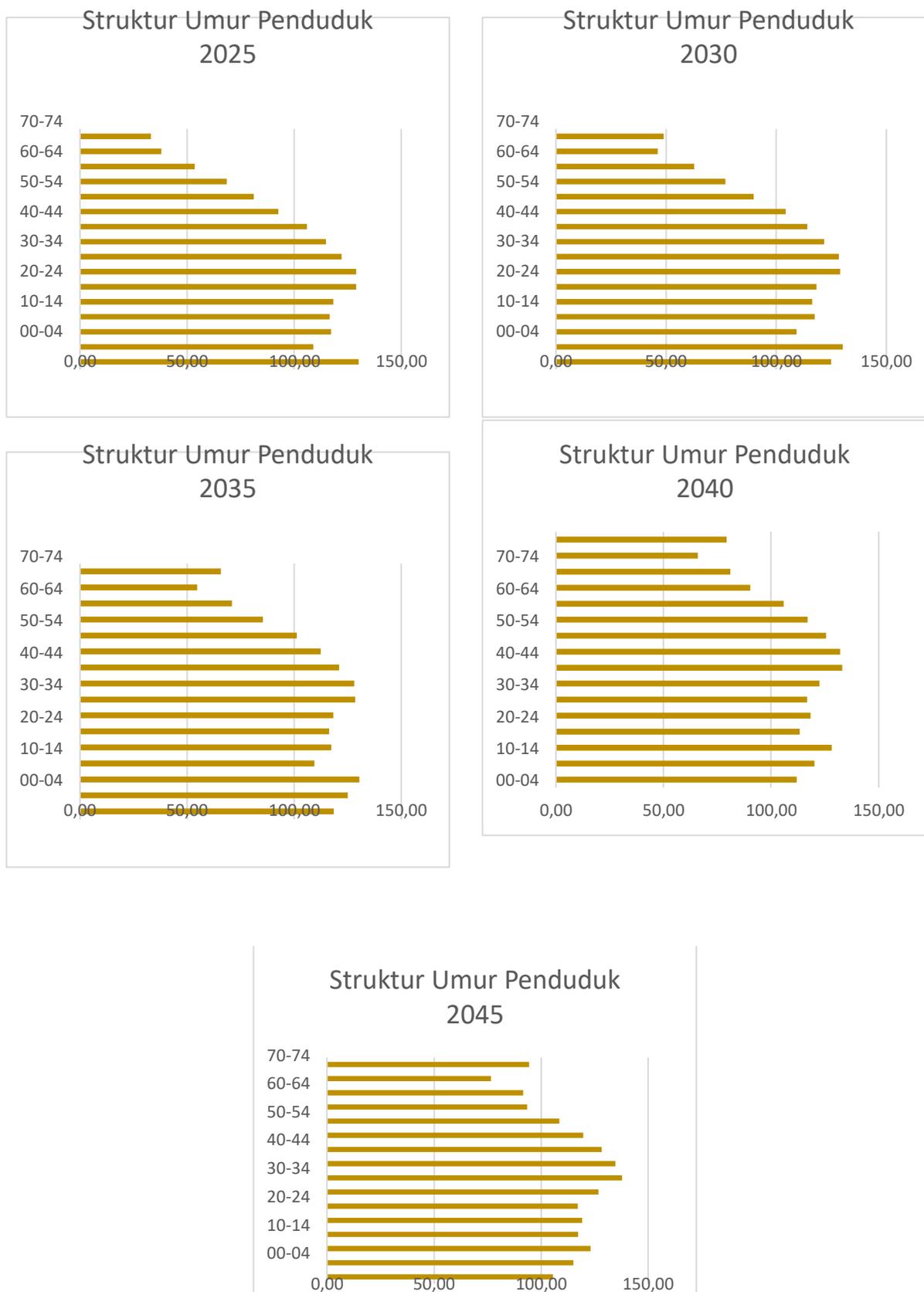
Sumber: BPS, data diolah

Jika dilihat dari jenis kelaminnya, maka terlihat bahwa penduduk di Kabupaten Pemalang didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki. Pada tahun 2023, rasio jenis kelaminnya diproyeksikan mencapai 102,72 dan terus menurun hingga tahun 2045 rasio jenis kelaminnya diproyeksikan mencapai 100,85. Angka ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2045 nanti, diantara 100 perempuan, terdapat 101 penduduk laki-laki.

Struktur umur penduduk menggambarkan distribusi usia penduduk dalam suatu wilayah atau negara pada suatu titik waktu tertentu. Informasi ini penting dalam demografi karena dapat memberikan wawasan tentang karakteristik dan dinamika populasi khususnya terkait potensi produktivitas penduduk.

Pada grafik struktur umum penduduk, terlihat bagaimana pergerakan struktur umur di Kabupaten Pemalang. Salah satu fenomena yang terlihat pada proyeksi penduduk adalah peningkatan penduduk usia tua yang pada momen tertentu akan menjadi aging population. Fenomena ini terlihat dari

semakin melebarnya struktur umur pada piramida bagian atas yang mengindikasikan usia harapan hidup masyarakat semakin tinggi. Adapun penduduk usia muda juga semakin mengalami peningkatan meskipun secara komposisi mengalami penurunan.



Sumber: Proyeksi Penduduk BPS Kabupaten Pemalang 2025-2035
 Olahan angka sementara 2036-2045

Gambar II.32
 Struktur Umur Penduduk Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045

Tabel II.24

Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Ribu Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Ribu Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-14 Tahun	351,41	356,45	364,49	374,07	357,21	341,99
15-64 Tahun	1060,21	1078,19	1116,62	1138,18	1172,15	1189,80
> 65 Tahun	112,02	124,67	157,93	191,48	224,81	260,17
Angka Ketergantungan	43,71	44,62	46,79	49,69	49,65	50,61

Sumber: Proyeksi Penduduk BPS Kabupaten Pemalang 2025-2035; data diolah

Pada proyeksi kondisi awal pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Pemalang yakni tahun 2023, angka ketergantungan terlihat cukup rendah di angka 43,71 yang mengindikasikan diantara 100 penduduk usia produktif menanggung 43-44 masyarakat usia non produktif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Pemalang berada pada jendela kesempatan bonus demografi yang diperkirakan akan masih berlanjut hingga tahun 2040. Optimalisasi berbagai program pembangunan yang tepat dalam menyongsong kondisi ini tentu menjadi solusi tepat dalam akselerasi pencapaian visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pemalang.

Beberapa kebijakan strategis yang dapat dioptimalkan dalam rangka memanfaatkan kondisi bonus demografi seperti investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas angkatan kerja. Ini termasuk program pendidikan berkualitas, pelatihan vokasional, dan pembangunan keterampilan. Selain itu, perlunya menciptakan peluang kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal ini dapat mencakup pembangunan sektor-sektor ekonomi yang berkembang, promosi kewirausahaan, dan dukungan untuk bisnis kecil dan menengah.

Dari sisi kesehatan dan kesejahteraan, maka pemerintah perlu meningkatkan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas dan mendukung program kesejahteraan yang mencegah dan mengatasi masalah kesehatan yang mungkin muncul akibat pertambahan usia penduduk. Adapun dalam kemiskinan yang timbul maka perlu adanya pengentasan program kemiskinan dan ketidaksetaraan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dalam hal pengendalian penduduk, perlu menggalakkan program keluarga berencana untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yang berlebihan dan memastikan bahwa jumlah kelahiran sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

2.6.2 Kebutuhan Sarana Prasarana

Sarana (infrastruktur) adalah komponen penting dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah, negara, atau proyek. Sarana mencakup berbagai elemen fisik yang diperlukan untuk mendukung kehidupan dan aktivitas manusia, termasuk transportasi, perumahan, air minum, sanitasi, listrik, komunikasi, dan sebagainya. Dalam perencanaan pembangunan, kebutuhan sarana perlu diperhitungkan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Pemalang, termasuk sebagai hasil dari pembangunan yang dilaksanakan.

Kebutuhan sarana yang dibutuhkan masyarakat hingga tahun 2045 ini nantinya akan menjadi salah satu barometer keberhasilan pembangunan. Kebutuhan sarana pembangunan yang akan digunakan masyarakat dalam kesehariannya, memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan ekonomi daerah. Infrastruktur yang baik menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk bisnis, industri, dan masyarakat umum. Selain ekonomi, sarana pembangunan akan meningkatkan kapasitas SDM baik kesehatan maupun pendidikan, peningkatan iklim investasi, hingga kenyamanan dan keasrian masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan.

1. Listrik dan Energi

Infrastruktur energi mencakup pasokan listrik, sumber energi terbarukan, dan distribusi energi. Ini diperlukan untuk menjalankan rumah tangga, bisnis, dan industri. Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan, dijabarkan bahwa kebutuhan daya listrik minimum 450 VA per jiwa untuk setiap unit rumah tangga. Pada tahun 2025 diproyeksikan kebutuhan listrik sebesar 982,37, tahun 2030 diproyeksikan sebesar 1032,58, tahun 2035 diproyeksikan sebesar 1073,34, tahun 2040 diproyeksikan sebesar 1105,12, dan tahun 2045 diproyeksikan sebesar 1128,93.

Tabel II.25
Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Pemalang
Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	1523,62	1559,31	1639,02	1703,72	1754,16	1791,96
Jumlah Rumah	304.724	311.862	327.804	340.744	350.833	358.391
Proyek Kebutuhan Listrik	959,88	982,37	1.032,58	1.073,34	1.105,12	1.128,93

Sumber: Analisis, 2023

2. Air Minum

Penyediaan air minum untuk masyarakat adalah salah satu aspek penting dalam tata kota dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan. Akses yang memadai dan aman terhadap pasokan air minum adalah hak dasar manusia dan merupakan komponen kunci dalam menciptakan kondisi hidup yang sehat dan berkualitas bagi penduduk.

Berdasarkan SNI 19-6728.1-2002 tentang penyusunan neraca sumber daya air spasial, dijabarkan bahwa kebutuhan air minum dengan batasan sebesar 120 liter per hari per jiwa. Pada tahun 2025 diproyeksikan kebutuhan air minum sebesar 68.297,78, tahun 2030 diproyeksikan sebesar 71.789,08, tahun 2035 diproyeksikan sebesar 74.622,94, tahun 2040 diproyeksikan sebesar 76.832,38, dan tahun 2045 diproyeksikan sebesar 78.487,72.

Tabel II.26
Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Pemalang
Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Minum				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	1523,62	1559,31	1639,02	1703,72	1754,16	1791,96
Proyeksi Kebutuhan Air Minum	66.734,56	68.297,78	71.789,08	74.622,94	76.832,38	78.487,72

Sumber: Analisis, 2023

3. Perumahan Tempat Tinggal

Infrastruktur perumahan mencakup pembangunan hunian yang aman, sehat, dan terjangkau. Ini adalah aspek penting dalam memenuhi kebutuhan dasar penduduk dan menciptakan komunitas yang berkelanjutan. Dari Asumsi Dasar dijabarkan bahwa jumlah penghuni rata-rata dengan batasan sebanyak 5 jiwa tiap rumah. Pada tahun 2025 diproyeksikan kebutuhan rumah/tempat tinggal sebesar 311.862 unit, tahun 2030 diproyeksikan sebesar 327.804 unit, tahun 2035 diproyeksikan sebesar 340.744 unit, tahun 2040 diproyeksikan sebesar 350.833 unit, dan tahun 2045 diproyeksikan sebesar 358.391 unit.

Tabel II.27
Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	1523,62	1559,31	1639,02	1703,72	1754,16	1791,96
Proyeksi Kebutuhan Rumah	304.724	311.862	327.804	340.744	350.833	358.391

Sumber: Analisis, 2023

4. Fasilitas Pendidikan

Investasi dalam pendidikan dan pelatihan menciptakan tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan. Infrastruktur pendidikan mencakup sekolah, perguruan tinggi, dan pusat pelatihan. Tenaga kerja yang terdidik dan terlatih cenderung lebih produktif dan dapat mengakses pekerjaan yang lebih baik. Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Ambang Batas Penduduk dan Standar Kebutuhan Ruang Minimal Pada Fasilitas Pelayanan dijabarkan seperti pada tabel berikut:

Tabel II.28
Ambang Batas Penduduk dan Standar Kebutuhan Ruang Minimal Pada Fasilitas Pelayanan Dalam SNI 03-1733-2004

No.	Kelompok Fasilitas dan Jenis Fasilitas	Ambang Batas Penduduk Pendukung	Standar Kebutuhan Ruang Minimal
		Jiwa	m ²
A.	PENDIDIKAN		
1.	TK	1.250	1.200
2.	SD	1.600	1.500
3.	SMP	4.800	10.000
4.	SMA	4.800	20.000

Pada tahun 2025 diproyeksikan kebutuhan fasilitas pendidikan untuk jenjang TK sebanyak 1.247, tahun 2030 diproyeksikan sebanyak 1.311, tahun 2035 diproyeksikan sebanyak 1.363, tahun 2040 diproyeksikan sebanyak 1.403, dan tahun 2045 diproyeksikan sebanyak 1.434. Proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan untuk jenjang SD/MI pada tahun 2025 sebanyak 975, tahun 2030 sebanyak 1.024, tahun 2035 sebanyak 1.065, tahun 2040 sebanyak 1.096, dan tahun 2045 sebanyak 1.120. Proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan untuk jenjang SMP/MTs pada tahun 2025 sebanyak 325, tahun 2030 sebanyak 341, tahun 2035 sebanyak 355, tahun 2040 sebanyak 365, dan tahun 2045 sebanyak 373. Proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan untuk jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2025 sebanyak 325, tahun 2030 sebanyak 341, tahun 2035 sebanyak 355, tahun 2040 sebanyak 365, dan tahun 2045 sebanyak 373.

Tabel II.29
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	1523,62	1559,31	1639,02	1703,72	1754,16	1791,96
Proyeksi Fasilitas Pendidikan						
•TK	1219	1247	1311	1363	1403	1434
•SD/MI	952	975	1024	1065	1096	1120
•SMP/MTs	317	325	341	355	365	373
•SMA/MA/SMK	317	325	341	355	365	373

Sumber: Analisis, 2023

5. Fasilitas Kesehatan

Infrastruktur kesehatan, termasuk rumah sakit, klinik, dan pusat kesehatan, penting untuk kesejahteraan masyarakat dan produktivitas tenaga kerja. Kesehatan yang baik mendukung tenaga kerja yang kuat. Berdasarkan SNI 03-1733-1989 tentang Ambang Batas Penduduk Dan Standar Kebutuhan Ruang Minimal Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan maka terlihat jumlah fasilitas kesehatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan sejumlah penduduk.

Pada tahun 2025-2045 diproyeksikan kebutuhan fasilitas kesehatan untuk jenis sarana rumah sakit sebanyak 9 unit. Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan untuk jenis sarana puskesmas pada

tahun 2025-2045 sebanyak 25 unit. Baik proyeksi kebutuhan sarana rumah sakit dan puskesmas tersebut merupakan jumlah eksisting rumah sakit dan puskesmas saat ini. Sedangkan karena jumlah hitungan dari SNI 03-1733-1989 lebih rendah, maka tidak dipergunakan.

Proyeksi kebutuhan klinik bersalin dari tahun 2025 sebanyak 52 unit, tahun 2030 sebanyak 55 unit, pada tahun 2035 sebanyak 57 unit, pada tahun 2040 sebanyak 58 unit, dan tahun 2045 sebanyak 60 unit. Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan untuk jenis sarana praktek dokter pada tahun 2025 diproyeksikan sebanyak 312 unit, tahun 2030 di proyeksikan sebanyak 328 unit, tahun 2035 diproyeksikan sebanyak 341 unit, tahun 2040 diproyeksikan sebanyak 351 unit, dan tahun 2045 diproyeksikan sebanyak 358 unit. Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan untuk jenis sarana apotek/rumah obat tahun 2025 sebanyak 52 unit, pada tahun 2030 sebanyak 55 unit, pada tahun 2035 sebanyak 57 unit, pada tahun 2040 sebanyak 58 unit dan pada tahun 2045 diproyeksikan sebanyak 60 unit.

Tabel II.30
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Pemalang
Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	1523,62	1559,31	1639,02	1703,72	1754,16	1791,96
Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
▪ Rumah Sakit	9	9	9	9	9	9
▪ Puskesmas	25	25	25	25	25	25
▪ Klinik Bersalin	51	52	55	57	58	60
▪ Praktek Dokter	305	312	328	341	351	358
▪ Apotek/Rumah Obat	51	52	55	57	58	60

Sumber: Analisis, 2023

6. Lingkungan Hidup

Infrastruktur lingkungan seperti pengelolaan limbah, perlindungan lingkungan, dan sumber daya alam yang berkelanjutan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan SNI 3242-2008 dijelaskan bahwa untuk memperkirakan timbulan sampah: Kota Besar sebanyak 3 liter/orang/hari dan Kota Kecil 2,5 liter/orang/hari. Sedangkan untuk berat jenis sampah, menggunakan asumsi 200-300 kg/m³ (0,2 – 0,3 kg/liter). Pada tahun 2025 diproyeksikan timbulan sampah sebesar 1422,87, tahun 2030 diproyeksikan sebesar 1495,61, tahun 2035 diproyeksikan sebesar 1554,64, tahun 2040 diproyeksikan sebesar 1600,67, dan tahun 2045 diproyeksikan sebesar 1635,16.

Tabel II.31
Proyeksi Timbulan Sampah Kabupaten Pemalang
Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Timbulan Sampah				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	1523,62	1559,31	1639,02	1703,72	1754,16	1791,96
Proyeksi Timbulan Sampah	1.390,30	1.422,87	1.495,61	1.554,64	1.600,67	1.635,16

Sumber: Analisis, 2023

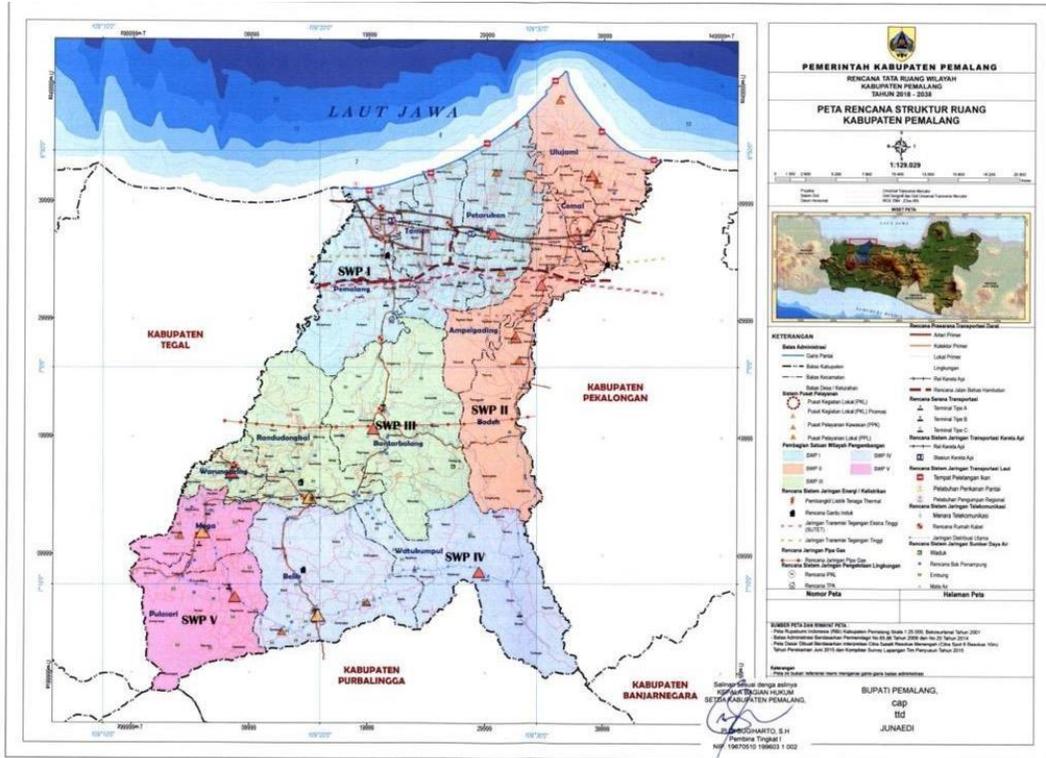
2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Pemalang dilakukan melalui beberapa kebijakan penataan ruang, salah satunya yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038.

Perencanaan pembangunan dapat dikatakan sangat identik dengan ekonomi pembangunan. Apabila sekiranya ruang gerak ekonomi pembangunan berusaha mencari strategi pembangunan, perencanaan pembangunan merupakan alat yang ampuh untuk menerjemahkan strategi pembangunan tersebut dalam berbagai program kegiatan yang terkoordinasi.

Pada tingkat daerah, perencanaan pembangunan geografis-ekonomi bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia di daerah tersebut. Diharapkan bahwa perekonomian wilayah dapat mencapai keadaan yang lebih baik pada masa yang akan datang dibandingkan keadaan sekarang ini, atau minimal sama dengan keadaan ekonomi sekarang. Pusat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu alternatif untuk menggerakkan dan memacu pembangunan guna meningkatkan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi manakala diarahkan pada daerah-daerah yang memiliki potensi dan fasilitas wilayah akan mempercepat terjadinya kemajuan ekonomi karena secara tidak langsung kemajuan daerah akan membuat masyarakat mencari kehidupan yang lebih layak di daerahnya.

Rencana sistem pusat pelayanan merupakan representasi spasial kawasan yang potensial sebagai kutub pertumbuhan di Kabupaten Pemalang. Hal ini secara normatif tertuang dalam rencana struktur ruang Kabupaten Pemalang yang terdiri atas orde pusat pertumbuhan wilayah sebagaimana tertuang dalam Perda RTRW Kabupaten Pemalang sebagai berikut :



Sumber: RTRW Kab. Pemalang Tahun 2018-2038

Gambar II.33

Peta Struktur Tata Ruang sebagai kesatuan Sistem Pusat Pertumbuhan Wilayah di Kabupaten Pemalang.

Adapun secara terperinci, sistem pusat pelayanan di Kabupaten Pemalang, terdapat 2 lingkup besar kegiatan perencanaan yaitu:

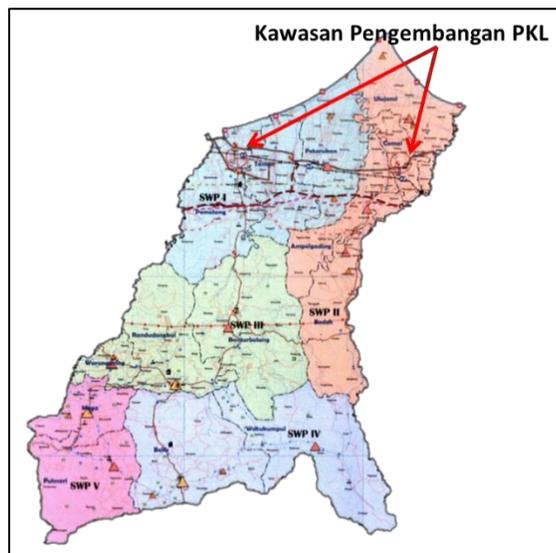
1. Rencana Sistem Pusat Kegiatan

a. Sistem Perkotaan

1) Pengembangan PKL (Pusat Kegiatan Lokal)

Terdapat 2 kawasan yang berstatus sebagai PKL di Kabupaten Pemalang, yaitu:

- Kawasan Perkotaan Pemalang
- Kawasan Perkotaan Comal



Sumber: RTRW Kab. Pemalang Tahun 2018-2038

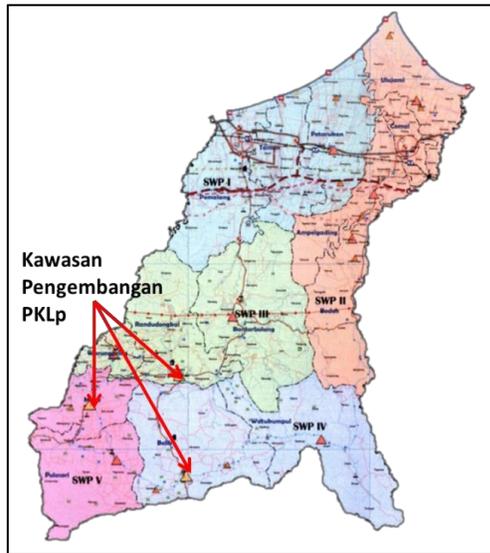
Gambar II.34

Kawasan Pengembangan PKL

2) Pengembangan PKLp (Pusat Kegiatan Lokal Promosi)

Terdapat 3 kawasan yang memiliki peran sebagai kawasan pengembangan PKLp di Kabupaten Pemalang, yaitu:

- Kawasan Perkotaan Randudongkal
- Kawasan Perkotaan Belik
- Kawasan Perkotaan Moga



Sumber: RTRW Kab. Pemalang Tahun 2018-2038

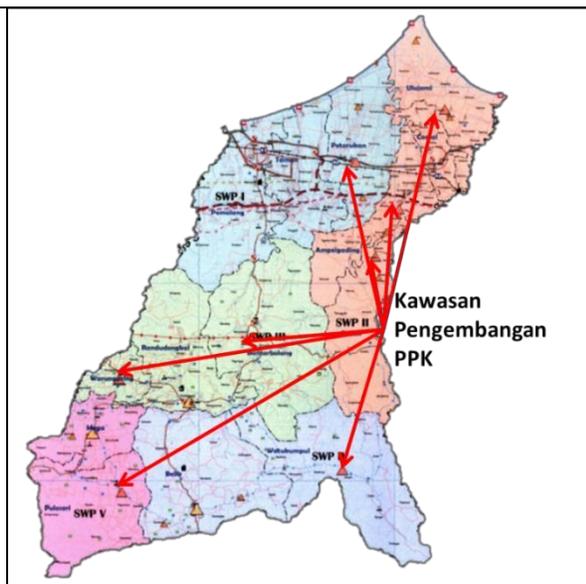
Gambar II.35

Kawasan Pengembangan PKLp

3) Pengembangan PPK (Pusat Pelayanan Kawasan)

Dalam perencanaan pengembangan PPK di Kabupaten Pemalang, terdapat 8 kawasan yang termasuk di dalamnya, yaitu:

- Kawasan Perkotaan Ulujami
- Kawasan Perkotaan Ampelgading
- Kawasan Perkotaan Petarukan
- Kawasan Perkotaan Bantarbolang
- Kawasan Perkotaan Bodeh
- Kawasan Perkotaan Warungpring
- Kawasan Perkotaan Watukumpul
- Kawasan Perkotaan Pulosari



Sumber: RTRW Kab. Pemalang Tahun 2018-2038

Gambar II.36

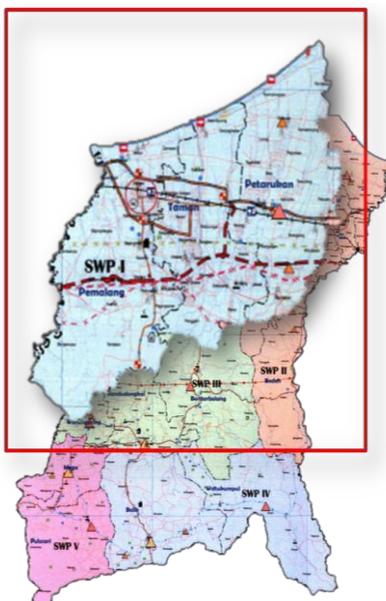
Kawasan Pengembangan PPK

2. Rencana Sistem Wilayah

Rencana sistem wilayah yang ada di Kabupaten Pemalang merupakan kegiatan perencanaan yang berupa pembagian SWP (Satuan Wilayah Pengembangan) beserta fungsi dari masing – masing SWP.

a. SWP Pemalang dengan pengembangan fungsi meliputi:

- 1) Pusat Pemerintahan Daerah
- 2) perdagangan dan jasa,
- 3) industri,
- 4) transportasi,
- 5) pariwisata,
- 6) pertanian tanaman pangan, dan
- 7) perikanan



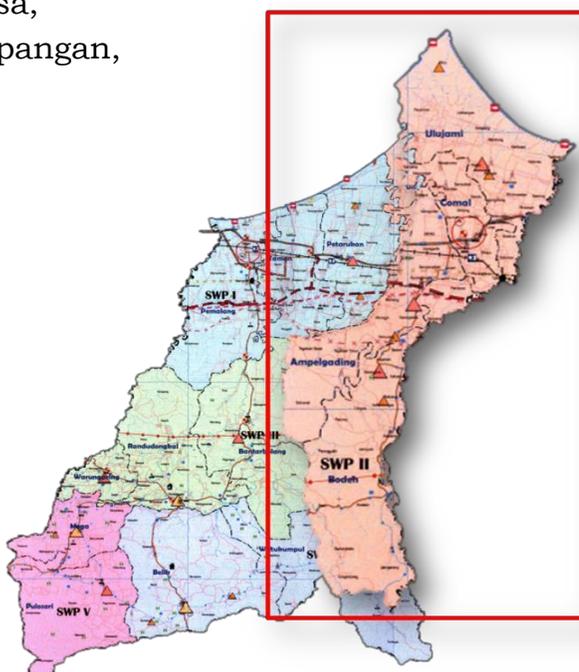
Sumber: RTRW Kab. Pemalang Tahun 2018-2038

Gambar II.37

SWP I – Pemalang

b. SWP Comal dengan pengembangan fungsi meliputi

- 1) perdagangan dan jasa,
- 2) pertanian tanaman pangan,
- 3) pariwisata,
- 4) industri
- 5) pertambangan, dan
- 6) perikanan

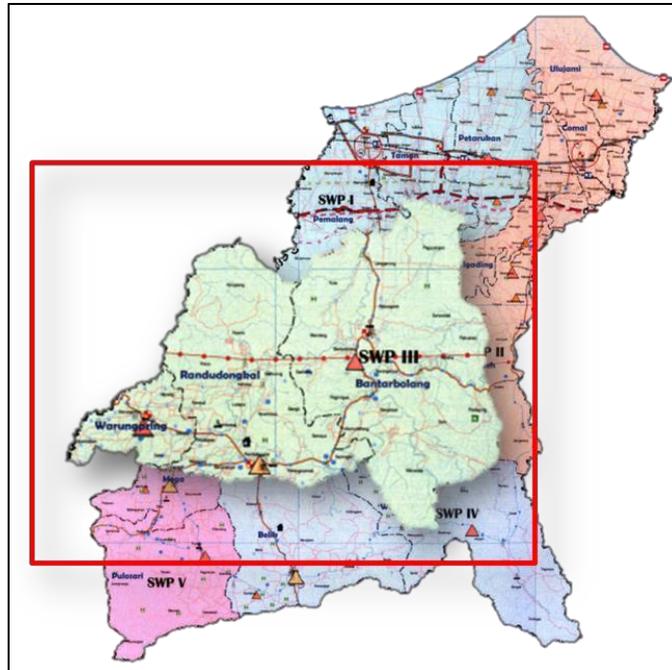


Sumber: RTRW Kab. Pemalang Tahun 2018-2038

Gambar II.38

SWP II- Comal

- c. SWP Randudongkal dengan pengembangan fungsi meliputi
- 1) pertanian hortikultura,
 - 2) pertanian tanaman pangan,
 - 3) industri,
 - 4) kehutanan,
 - 5) perikanan,
 - 6) perdagangan dan jasa,
 - 7) pariwisata,
 - 8) pertambangan, dan
 - 9) pengelolaan kawasan lindung

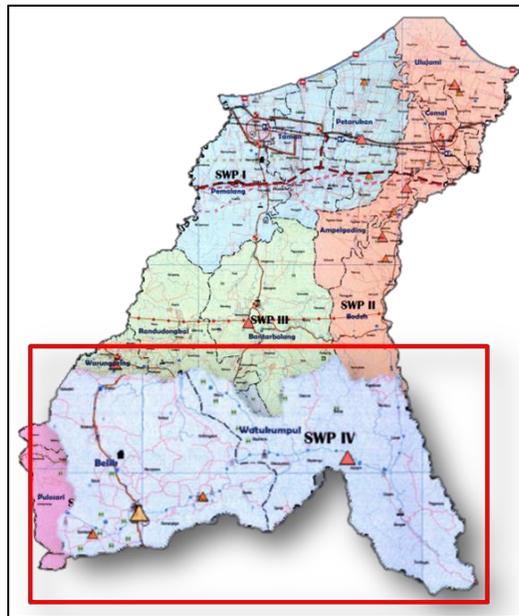


Sumber: RTRW Kab. Pemalang Tahun 2018-2038

Gambar II.39

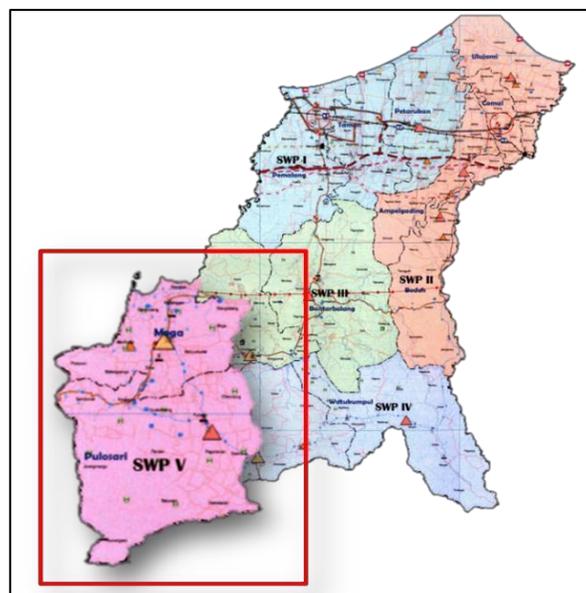
SWP III - Randudongkal

- d. SWP Belik dengan pengembangan fungsi meliputi
- 1) pertanian hortikultura,
 - 2) pertanian tanaman pangan,
 - 3) agroindustri,
 - 4) kehutanan,
 - 5) perdagangan dan jasa,
 - 6) pariwisata,
 - 7) pertambangan, dan
 - 8) pengelolaan kawasan lindung



Sumber: RTRW Kab. Pemalang Tahun 2018-2038
 Gambar II.40
 SWP IV – Belik

- e. SWP Moga dengan pengembangan fungsi meliputi
- 1) pertanian hortikultura,
 - 2) pertanian tanaman pangan,
 - 3) pariwisata,
 - 4) perikanan,
 - 5) agroindustri,
 - 6) pertambangan, dan
 - 7) pengelolaan kawasan lindung



Sumber: RTRW Kab. Pemalang Tahun 2018-2038
 Gambar II.41
 SWP V – Moga

Berdasarkan identifikasi geografi-ekonomi perkembangan di Kabupaten Pemalang, maka pusat pertumbuhan yang ada pada dasarnya mengarahkan pusat pertumbuhan multi-fungsi di Kabupaten Pemalang yang terdiri atas pengembangan kawasan perkotaan (dimana seringkali mengindikasikan lokus

kawasan dengan karakteristik pelayanan, perdagangan dan jasa). Selanjutnya pusat pertumbuhan yang ada juga berorientasi pada pengembangan pusat pertumbuhan dengan sektor pertanian (agropolitan). Hal ini sesuai dengan upaya optimalisasi dari potensi sumber daya alam di Kabupaten Pemalang.

Lebih lanjut, pusat pertumbuhan juga mengacu pada adanya sentra industri (kawasan peruntukkan industri), dimana diharapkan bahwa kombinasi antara sektor pertanian, menunjukkan peningkatan kegiatan perdagangan dan jasa serta industri dapat membentuk satu ekosistem agroindustri di Kabupaten Pemalang.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Dengan dinamika penyelenggaraan pembangunan daerah yang selalu dinamis dan berkelanjutan, terdapat permasalahan, isu dan tantangan pembangunan yang selalu mengiringi. Pemahaman komprehensif terhadap permasalahan dan isu strategis menjadi fondasi utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan melihat beberapa hasil capaian pembangunan yang masih belum tercapai sesuai dengan harapan menunjukkan adanya kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan pembangunan. Dengan itu, perlu adanya perumusan analisis permasalahan yang dilakukan untuk mengidentifikasi beragam permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara capaian kinerja pembangunan saat ini dengan apa yang ingin dicapai dalam rencana dan atau standar yang telah ditentukan.

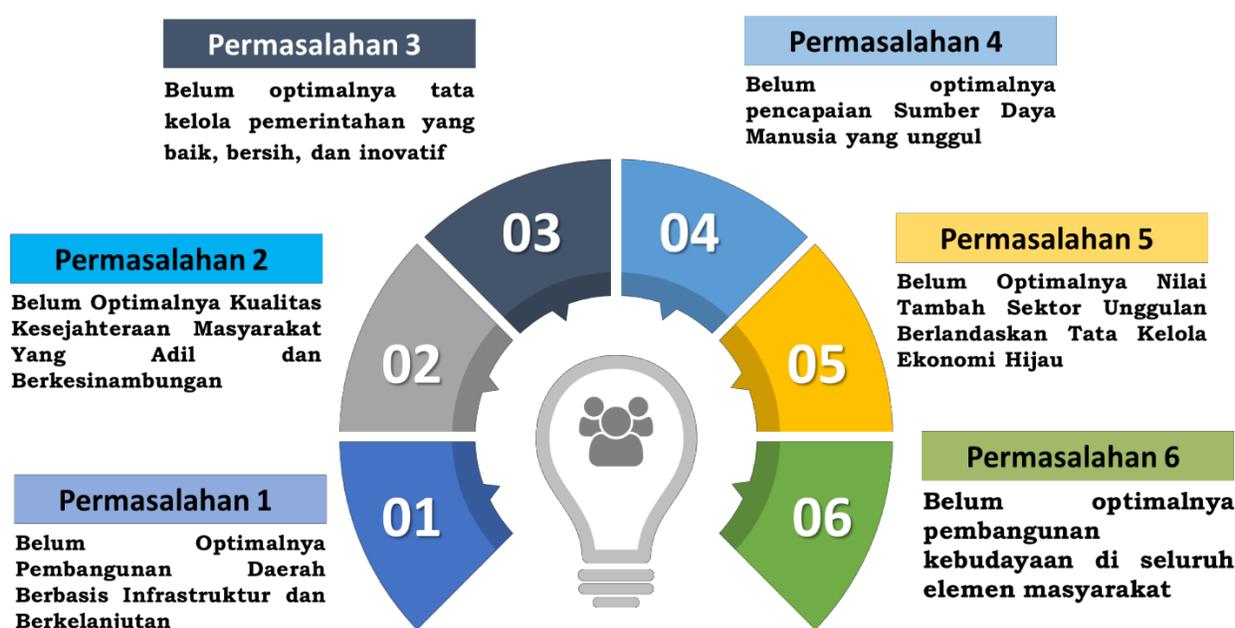
Dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Pemalang selain permasalahan, perlu memperhatikan potensi isu yang akan datang sebagai tantangan dalam pembangunan. Dengan memanfaatkan kerangka kerja yang kolaboratif, bab ini akan mengintegrasikan masukan dari semua tingkatan pemerintahan dan pemangku kepentingan. Hal ini untuk memastikan dokumen RPJPD mencerminkan pembangunan daerah yang komprehensif, berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika lokal dan global. Mengingat eratnya korelasi antara perencanaan yang efektif dan partisipasi pihak-pihak terkait, proses perumusan masalah dan penelaahan isu strategis harus memadukan perspektif dan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten, Provinsi hingga Nasional. Dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Pemalang, isu strategis sudah mempertimbangkan kondisi daerah dengan dampak yang ditimbulkan oleh dinamika global dan nasional. Melalui pendekatan yang bersifat kolaboratif, diharapkan dapat terbentuk arah pembangunan yang komprehensif dan responsif sehingga dapat mengantisipasi serta menyesuaikan dengan berbagai perubahan dan tantangan dan peluang yang akan datang.

Dengan adanya peluang yang memungkinkan akselerasi capaian pembangunan harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. Kemudian ancaman ataupun tantangan yang mengiringi pembangunan sebagai penghambat harus segera diantisipasi dengan menjadikannya sebagai “*warning action*” dalam upaya mewujudkan capaian pembangunan. Hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah akan menjadi dasar pemikiran untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sehingga akan ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan-kebijakan pembangunan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah.

3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Dalam perumusan permasalahan pembangunan daerah bertujuan untuk mengidentifikasi kendala, hambatan dan berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen

pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Permasalahan pembangunan daerah jangka panjang merupakan permasalahan pembangunan daerah yang sifatnya makro, dengan pendekatan yang cermat untuk mengidentifikasi dan menganalisis variabel- variabel kunci yang mempengaruhi dinamika sosial, ekonomi dan lingkungan. Dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah yang dibahas dalam bab sebelumnya (bab II). Penyusunan bab ini turut memperhatikan prinsip-prinsip analitis dan prediktif, mengeksplorasi hubungan sebab-akibat dari fenomena saat eksisting dan dampaknya ke masa depan. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, diperoleh gambaran permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Pemalang, dalam 6 (enam) permasalahan pokok sebagai berikut:



Gambar III.1

Permasalahan Pokok Pembangunan Kabupaten Pemalang

Permasalahan Pokok pembangunan Kabupaten Pemalang dalam RPJPD Tahun 2025-2045, dijabarkan sebagai berikut.

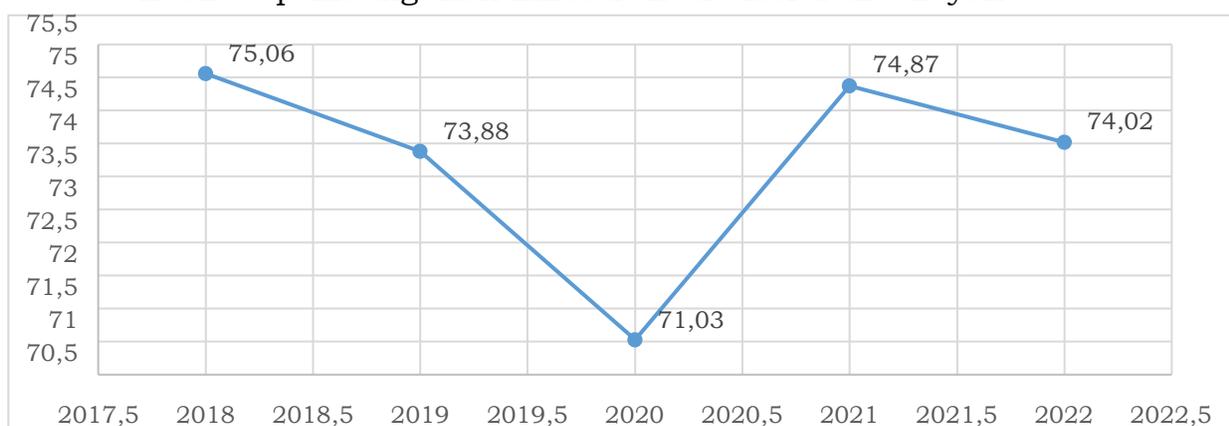
1. Belum Meratanya Pembangunan Daerah Berbasis Infrastruktur dan Berkelanjutan

Pembangunan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas oleh Pemerintah Daerah menjadi salah satu harapan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerataan pembangunan menjadi salah satu komitmen yang besar dalam pelaksanaan pembangunan daerah, yang artinya pembangunan diharapkan akan mampu dirasakan seluruh masyarakat wilayah Kabupaten Pemalang. Dengan adanya permasalahan pokok “Belum meratanya pembangunan daerah berbasis infrastruktur dan berkelanjutan”, disebabkan oleh permasalahan yang dijabarkan sebagai berikut.

a. Belum Maksimalnya Pemerataan Pembangunan Aksesibilitas Antar Wilayah

Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pemukiman layak huni, merupakan fasilitas publik yang dibangun pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mempermudah aksesibilitas/mobilisasi masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Berbagai fasilitas fisik infrastruktur merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat. Penyediaan infrastruktur yang belum optimal dapat menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.

Salah satu indikator yang mampu mempresentasikan kualitas pelayanan infrastruktur yang dibangun oleh Pemerintah daerah adalah IKLI (Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur). IKLI merupakan pengukuran secara komprehensif/hasil survey tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang. Hasil survei kepuasan masyarakat ini dilakukan terhadap 12 jenis layanan infrastruktur diantaranya jalan, irigasi, air minum, drainase, persampahan, RTH, LPJU, rumah susun, APILL, perparkiran, terminal, dan hotspot. Perkembangan IKLI Kabupaten Pemalang pada tahun 2018 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar III.2 Berdasarkan gambar tersebut, terlihat IKLI Kabupaten Pemalang mempunyai pergerakan yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2021 IKLI Kabupaten Pemalang mencapai sebesar 74,87 dan ditahun 2022 mencapai sebesar 74,02. Melihat perkembangan tersebut, IKLI Kabupaten Pemalang mengalami penurunan sebanyak 0,85 poin. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur yang di Kabupaten Pemalang sehingga masyarakat menginginkan pembangunan infrastruktur yang lebih baik lagi. Hal ini disebabkan belum maksimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Dengan ini kedepannya, pemerintah Kabupaten Pemalang perlu mengoptimalkan kualitas pembangunan infrastruktur diseluruh wilayah.



Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2022

Gambar III.2

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

Pemerataan pembangunan akan memiliki dampak yang luar biasa dalam pembangunan, yang mana pemerataan pembangunan

diindikasikan seluruh masyarakat wilayah kecamatan di Kabupaten Pemalang mendapat kemudahan akses terkait dengan pendidikan, kesehatan dan mobilisasi untuk beraktivitas. Pemerataan pembangunan dan persebaran penduduk memiliki hubungan yang erat dalam konteks pembangunan suatu wilayah. Pemerataan pembangunan mengacu pada upaya untuk menyebarkan pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang.

Salah satu indikator yang menggambarkan pemerataan pembangunan daerah adalah Indeks Ketimpangan antar wilayah. Indeks ketimpangan antar wilayah dapat menjadi tolok ukur dalam pengukuran kesenjangan antar wilayah, khususnya pada aspek infrastruktur (sarana dan prasarana) pada setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Pemalang. Besaran standar dalam pengukuran Indeks Ketimpangan antar wilayah berkisar antara 0-1. Semakin menjauhi nilai 0 (nol), berarti menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan antar wilayah semakin besar. Penilaian kategori ketimpangan antar wilayah dapat dilihat pada Tabel III.1.

Tabel III.1.

Kategori nilai Indeks Ketimpangan Antar Wilayah

Rentang Nilai Ketimpangan wilayah	Kategori
Nilai <1	Sangat Tinggi
0,7-1	Tinggi
0,4-0,69	Menengah
≤0,39	Rendah

Pada tahun 2022, Indeks Ketimpangan Antar Wilayah Kabupaten Pemalang adalah sebesar 0,378. Dengan memperhatikan Tabel III.1 diatas, ketimpangan antar wilayah Kabupaten Pemalang masuk dalam kategori, "Rendah". Meskipun angka ketimpangan antar wilayah dalam kategori rendah, namun masih ada ketimpangan antar wilayah, hal ini cukup menjadi urgensi dalam permasalahan pembangunan daerah. Dengan ini diharapkan, pembangunan infrastruktur dapat lebih merata, sehingga angka kesenjangan antar wilayah dapat menurun dan pembangunan tidak hanya dirasakan masyarakat di wilayah tertentu saja.

Pemerataan pembangunan juga ditandai dengan persebaran penduduk yang pastinya tidak padat dikecamatan tertentu. Memahami hal tersebut, terkait dengan pemerataan pembangunan hal ini dapat dilihat pada persebaran penduduk di Kabupaten Pemalang yang terlihat belum merata, paling tinggi jumlah penduduk di Kecamatan Pemalang sebesar 204.524 ribu jiwa, dan paling sedikit di Kecamatan Warungpring yang terlihat pada Tabel III.2. Dengan ini diharapkan pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan Pemerintah daerah Kabupaten Pemalang lebih merata keseluruhan wilayah dan pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tabel III.2.

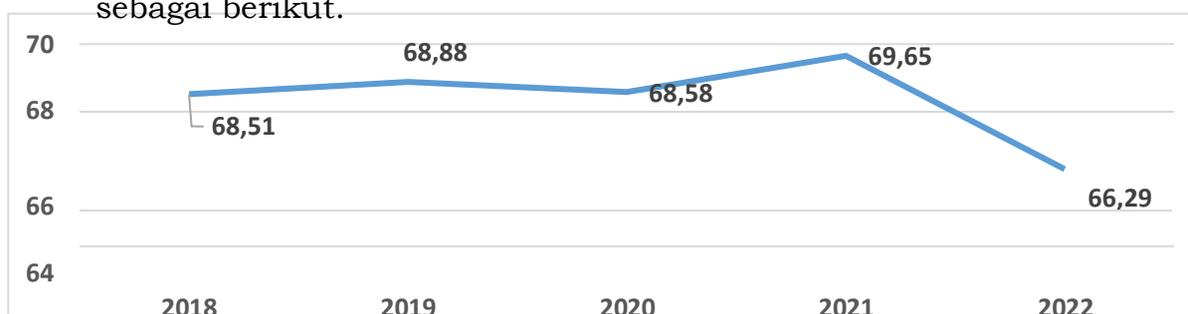
Distribusi/Persebaran penduduk Kabupaten Pemalang Tahun 2022

No	Kecamatan	Penduduk (ribu)
1	Moga	74.353
2	Warungpring	44.595
3	Pulosari	62.660
4	Belik	120.910
5	Watukumpul	77.794
6	Bodeh	63.359
7	Bantarbolang	87.596
8	Randudongkal	112.784
9	Pemalang	204.524
10	Taman	191.767
11	Petarukan	173.097
12	Ampelgading	75.995
13	Comal	95.131
14	Ulujami	116.189
15	Kabupaten Pemalang	150.0754

Sumber : BPS Kabupaten Pemalang, 2023

b. Belum optimalnya pembangunan berwawasan lingkungan

Dalam pembangunan daerah harus mampu menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan lingkungan. Hal ini berarti pembangunan tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan ekonomi saja, namun juga mempertimbangkan dampak negatif pembangunan lingkungan hidup. Pembangunan Kabupaten Pemalang yang belum maksimal dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan ini terlihat pada indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) yang disajikan pada Gambar III.3 sebagai berikut.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

Gambar III.3

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2022

Berdasarkan data Gambar III.3 diatas, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pemalang selama tahun 2018-2022 mengalami pergerakan yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2022, capaian IKLH Kabupaten Pemalang sebesar 66,29, berdasarkan penilaian IKLH dalam PermenLHK no.27 tahun 2021, maka capaian IKLH Kabupaten Pemalang masuk dalam kategori "**sedang**". Kemudian jika melihat perkembangan dari tahun 2021 hingga tahun 2022 maka IKLH Kabupaten Pemalang mengalami penurunan. Hal ini juga terlihat pada capaian beberapa komponennya IKLH menurun ditahun 2022 yaitu Indeks Kualitas Air

(IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Tutupan lahan yang disajikan pada Tabel III.3. Penurunan IKLH disebabkan menurunnya IKU yang terjadi karena meningkatnya mobilitas masyarakat yang kembali normal pasca pandemi COVID-19. Dengan demikian, dapat disimpulkan adanya penurunan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Pemalang, sehingga harapannya kedepan pembangunan Kabupaten Pemalang harus memperhatikan aspek lingkungan hidup.

Tabel III.3.

Capaian Indikator Komponen Penyusun IKLH

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kualitas Air	Nilai	45,83	47,06	47,33	50,00	48,33
2	Indeks Kualitas Udara	Nilai	86,24	89,27	85,63	86,26	84,16
3	Indeks Tutupan lahan	Nilai	73,52	69,95	73,56	72,66	64,09

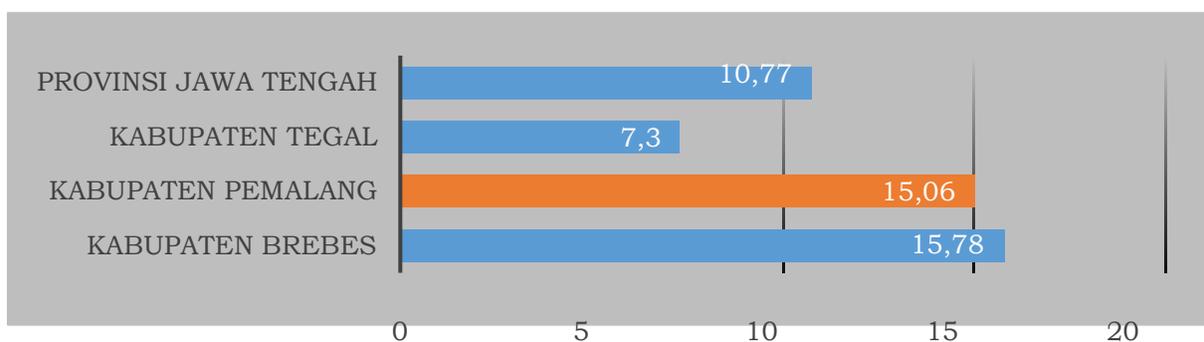
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

2. Belum Optimalnya Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Yang Adil dan Berkesinambungan

Masyarakat yang sejahtera tercermin dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan primernya secara layak. Masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya cenderung memiliki hidup yang sejahtera, sebaliknya masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhannya menjadi masyarakat miskin. Dengan adanya permasalahan, "belum optimalnya kualitas kesejahteraan masyarakat yang adil dan berkesinambungan", disebabkan oleh beberapa masalah yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Pemalang

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan multidimensi, artinya kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai kondisi seperti pendidikan, kesehatan, skill/kompetensi, dan peluang usaha, dll. Tingkat kemiskinan Kabupaten Pemalang ditahun 2022 mencapai 15,06 persen, yang mana capaian ini masih diatas Provinsi Jawa Tengah. Kemudian dengan melihat cakupan wilayah yang lebih luas, dengan membandingkan tingkat kemiskinan Kabupaten Pemalang di kawasan bergasmalang, seperti yang terlihat pada Gambar III.4. Terlihat angka kemiskinan di Kabupaten Tegal ditahun 2022 mencapai 7,3 dan Kabupaten Brebes mencapai 15,78. Melihat perbandingan angka kemiskinan dikawasan bergasmalang maka terlihat bahwa angka kemiskinan Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Tegal. Dengan ini perlu adanya perhatian Pemerintah daerah Kabupaten Pemalang untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Dengan ini diharapkan, pemerintah Kabupaten Pemalang lebih meningkatkan produktivitas masyarakat, sehingga masyarakat lebih produktif serta mempunyai kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraanya.



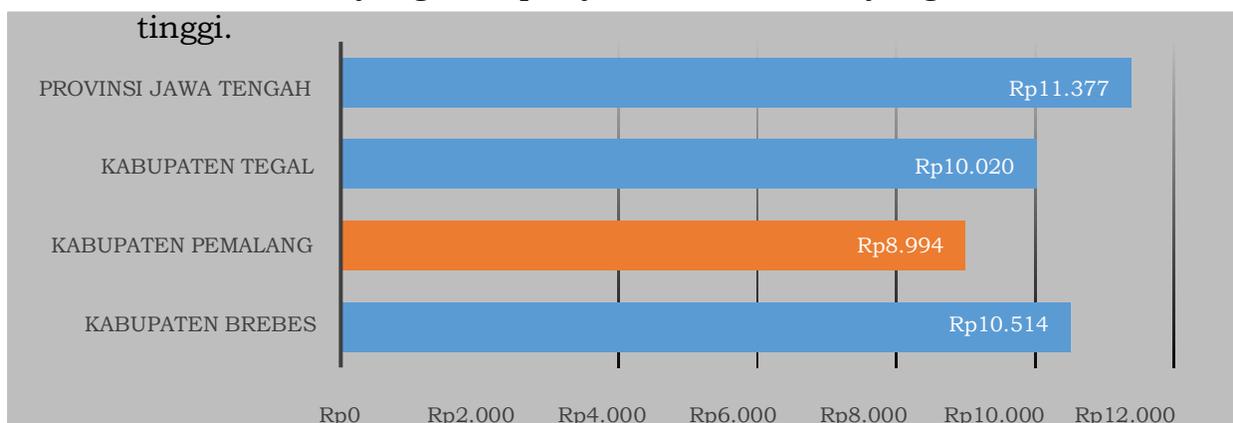
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, diolah

Gambar III.4

Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pemalang dalam kawasan Bregasmalang Tahun 2023 (persen)

Kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sangat berkaitan dengan kemampuan daya beli, yang secara tidak langsung dapat dilihat dari pengeluaran perkapita. Hal ini mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan melihat dari data perkembangan yang ada, tahun 2022 pengeluaran perkapita Kabupaten Pemalang mencapai sebesar 8.994 ribu rupiah. Kemudian jika melihat pada cakupan yang lebih luas dengan membandingkan pengeluaran perkapita Kabupaten Pemalang dan sekitarnya pada Gambar III.5 terlihat pengeluaran perkapita Kabupaten Pemalang paling rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten di wilayah Bregasmalang. Dengan ini diharapkan ke depannya Pemerintah Daerah mampu mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, dengan meningkatkan *skill* kompetensi masyarakat agar mampu bekerja pada sektor-sektor yang mempunyai nilai ekonomi yang

tinggi.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, diolah

Gambar III.5

Perbandingan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Pemalang dalam Kawasan Bergasmalang Tahun 2022 (ribu rupiah)

b. Tingginya Tingkat Pengangguran di Kabupaten Pemalang

Tingkat pengangguran yang tinggi menjadi salah satu pemicu tingginya angka kemiskinan. Salah satu pemicu tingkat pengangguran disebabkan masih rendahnya kapasitas dan produktivitas tenaga kerja serta kesempatan kerja yang masih terbatas. Tingkat pengangguran

Kabupaten Pemalang pada tahun 2022 mencapai sebesar 6,63 persen, jika dilihat pada Gambar III.6 dengan membandingkan angka pengangguran Kabupaten Pemalang dengan Provinsi Jawa Tengah, terlihat angka pengangguran Kabupaten Pemalang masih tinggi di atas capaian Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 5,57 persen. Kemudian untuk melihat posisi capaian Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten sekitar, terlihat pada perbandingan dengan kawasan Bergasmalang dan kawasan Petanglong seperti yang tersaji pada Gambar III.6. Melalui gambar tersebut terlihat capaian angka pengangguran Kabupaten Pemalang masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Pekalongan. Dengan ini diharapkan kedepannya pemerintah Kabupaten Pemalang mampu menurunkan angka pengangguran, melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja dan kesempatan peluang kerja dan usaha.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, diolah

Gambar III.6

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pemalang dalam Kawasan Bergasmalang dan Kawasan Petanglong Tahun 2022 (persen)

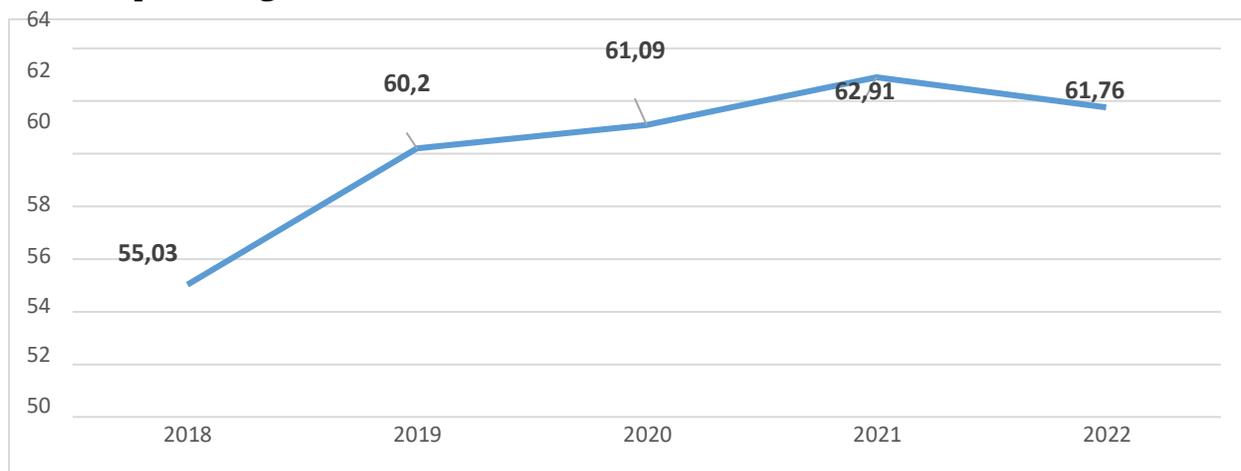
3. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Inovatif

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah pemerintah menjadi motor penggerak untuk pencapaian tujuan pembangunan. Tata Kelola pemerintahan berkaitan erat dengan performa kinerja ASN dan reformasi birokrasi. Dengan adanya permasalahan pokok, "Belum optimalnya tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif", yang disebabkan oleh beberapa permasalahan yaitu:

a. Belum maksimalnya kinerja pemerintah daerah

Dalam rangka memahami kondisi dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan maka perlu dianalisis beberapa capaian indikator pemerintah daerah yang dilihat pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) yang tersaji pada Gambar III.7 dibawah. Pada tahun 2022 capaian IRB Kabupaten Pemalang sebesar 61,76, sesuai standar penilaian IRB dari KemenPAN-RB masuk dalam kategori, "**Baik**". Melihat perkembangan dan kondisi IRB Kabupaten Pemalang ditahun 2018-2022 mengalami pergerakan yang fluktuaktif, yang dimana ditahun 2022 mengalami penurunan hingga 1,15 poin jika dibandingkan dengan tahun 2021. Penurunan Indek Reformasi Birokrasi Kabupaten Pemalang disebabkan oleh adanya penurunan pada area/indeks. Adapun indeks yang mengalami penurunan kualitas yang paling signifikan adalah kualitas

pengelolaan arsip, indeks profesionalitas ASN, kapabilitas APIP dan maturitas SPIP. Dengan ini diharapkan kedepannya Pemerintah Kabupaten Pemalang mulai memperbaiki akuntabilitas kinerja, dan menjadi komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas kinerja pembangunan daerah.



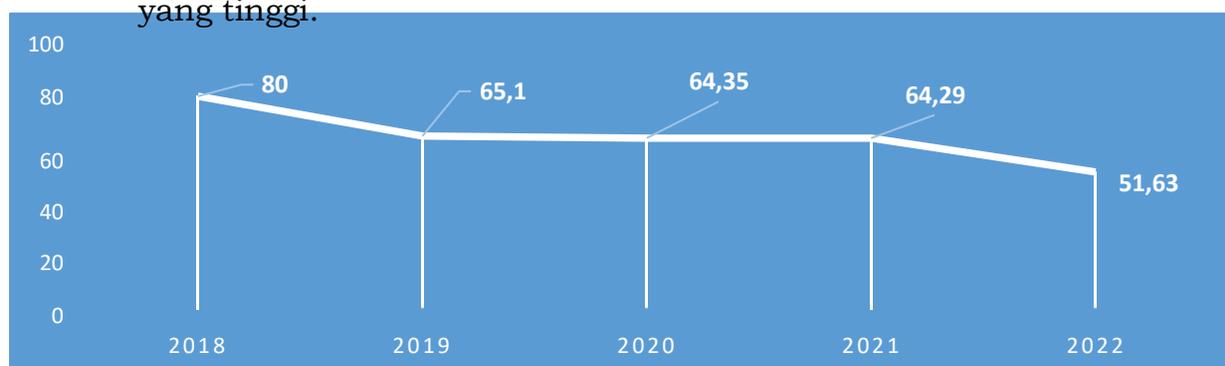
Sumber: Bappeda Kabupaten Pemalang, diolah

Gambar III.7

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2022

b. Belum Maksimalnya Kinerja Profesionalitas ASN

Kinerja ASN memberikan dampak pada kualitas pelayanan dan kinerja pembangunan daerah. Kualitas pelayanan kinerja ASN Kabupaten Pemalang dapat pada Gambar III.8. Dari gambar tersebut terlihat indikator Indeks Profesionalitas ASN yang terlihat mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2022, dengan capaian ditahun 2021 sebesar 64,29 dan menurun ditahun 2022 menjadi 51,63. Penurunan kualitas kinerja ASN disebabkan karena masih lemahnya integritas dan komitmen ASN untuk memberikan performa yang terbaik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan ini, kedepannya Pemerintah Kabupaten Pemalang harus meningkatkan budaya kerja yang positif dan memiliki integritas yang tinggi.



Sumber: Bappeda Kabupaten Pemalang, diolah

Gambar III.8

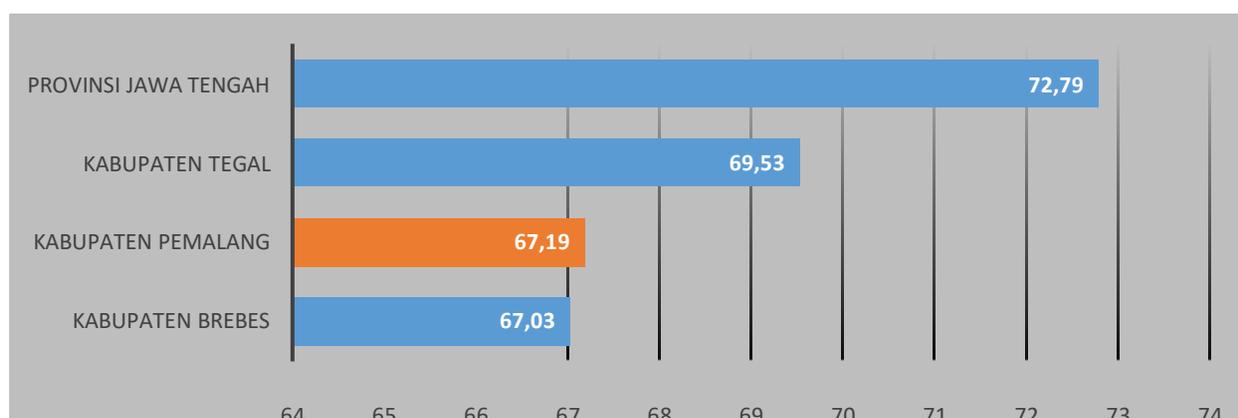
Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2022

4. Belum Optimalnya Pencapaian Sumber Daya Manusia yang Unggul

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi fondasi yang penting dalam pembangunan daerah, hal ini akan berimplikasi pada kualitas dan daya saing masyarakat. Dengan kualitas dan daya saing masyarakat yang mumpuni, akan mendorong kualitas hidup masyarakat dan pembangunan daerah akan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dengan adanya permasalahan pokok, “belum optimalnya pencapaian Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter”, yang disebabkan oleh permasalahan yang dijabarkan sebagai berikut.

a. Kualitas daya saing masyarakat masih perlu ditingkatkan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dari suatu wilayah. IPM diukur dari tiga dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dimensi kesehatan menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH), dimensi pendidikan menggunakan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), dimensi ekonomi menggunakan pengeluaran perkapita. IPM Kabupaten Pemalang di Tahun 2022 mencapai sebesar 67,19 Dengan capaian ini IPM Kabupaten Pemalang masuk dalam kategori,”sedang”. Kemudian jika kita melihat cakupan yang lebih luas dengan membandingkan IPM dengan daerah lain dalam kawasan bergasmalang yang terlihat pada 0. Dari gambar tersebut terlihat capaian IPM Kabupaten Pemalang masih dibawah Provinsi Jawa Tengah, dan IPM Kabupaten Pemalang masih dibawah capaian IPM Kabupaten Tegal yang mencapai 69,53. Dengan ini perlu adanya perhatian pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga mampu bersaing dengan kabupaten sekitarnya. Hal ini sangat penting, jika kapasitas SDM Kabupaten Pemalang tidak mampu bersaing dengan kompetensi SDM daerah sekitar, peluang pekerjaan dan usaha kemungkinan akan sulit didapatkan oleh masyarakat Kabupaten Pemalang karena SDM dari luar daerah lebih berkompeten daripada SDM di Kabupaten Pemalang.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, diolah

Gambar III.9

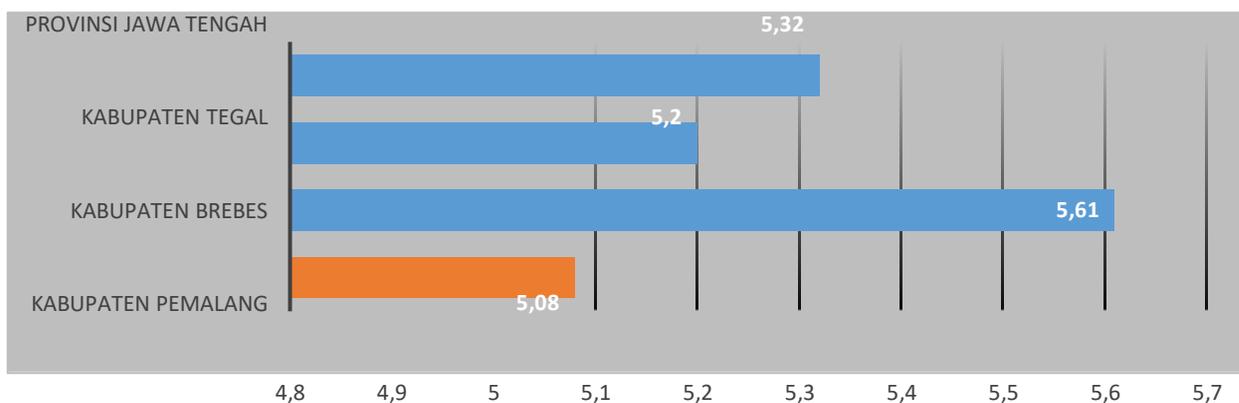
Perbandingan IPM Kabupaten Pemalang dalam Kawasan Bregasmalang Tahun 2022 (persen)

5. Belum Optimalnya Nilai Tambah Sektor Unggulan Berlandaskan Tata Kelola Ekonomi Hijau

Pembangunan ekonomi daerah mempunyai peran yang cukup krusial dalam pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah sangat ditentukan keberhasilannya dengan mengoptimalkan pengelolaan produk-produk unggulan daerah. Dengan adanya permasalahan, “belum optimalnya nilai tambah sektor unggulan berlandaskan tata kelola ekonomi hijau” disebabkan oleh beberapa permasalahan yang dijabarkan sebagai berikut.

a. Belum maksimalnya pembangunan ekonomi produk unggulan daerah

Pembangunan ekonomi daerah salah satunya dengan mengolah produk-produk unggulan daerah agar memiliki nilai tambah yang lebih sehingga mampu meningkatkan perekonomian daerah. Salah satu indikator yang mampu menggambarkan perekonomian daerah adalah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Terkait pembangunan ekonomi di Kabupaten Pemalang, dalam struktur PDRB berdasarkan lapangan usaha, Kabupaten Pemalang memiliki 4 (empat sektor unggulan) dalam struktur PDRB yaitu pertanian, kehutanan, perikanan, dengan capaian 26,49 %; sektor industri pengolahan dengan capaian 21,96%; sektor perdagangan besar dan eceran dengan capaian 15,31% serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dengan capaian 5,58%. Dengan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang ditahun 2022 sebesar 5,08 dan melihat cakupan yang lebih luas dengan membandingkan capaian pertumbuhan ekonomi dikawasan bergasmalang seperti yang tersaji pada 0. Maka terlihat capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang masih dibawah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. Hal ini menunjukkan belum maksimalnya Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam mengelola produk-produk unggulan daerah. Dengan ini, kedepan harapannya Pemerintah Kabupaten Pemalang mampu lebih memaksimalkan pembangunan kualitas dan daya saing produk unggulan daerah, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat meningkat lebih signifikan.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, diolah

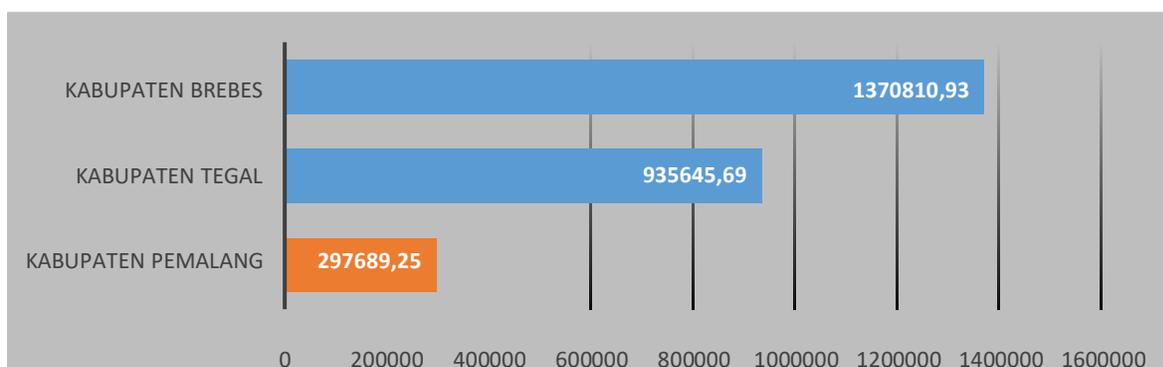
Gambar III.10

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2022

b. Belum optimalnya peningkatan daya Tarik investasi daerah

Dalam rangka percepatan pembangunan daerah, perlu adanya investasi agar perekonomian daerah dapat berkembang dengan pesat. Investasi menjadi hal yang cukup krusial dalam percepatan pembangunan

ekonomi makro maupun mikro yang pastinya akan berdampak pada perekonomian masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan perputaran ekonomi daerah akan semakin cepat. Dengan adanya investasi maka tidak hanya percepatan pembangunan ekonomi daerah, namun juga akan menggeliatkan perekonomian masyarakat. Selain itu akan mampu menciptakan peluang-peluang baru dalam pembangunan daerah. Dengan ini investasi diharapkan mampu memberikan "angin segar" dalam pembangunan daerah. Nilai investasi Kabupaten Pemalang tahun 2022 mencapai 297.689 Milyar. Dengan melihat cakupan yang lebih luas membandingkan nilai investasi beberapa daerah sekitar, dikawasan bregasmalang yang tersaji pada 0 dibawah ini. Terlihat nilai investasi di Kabupaten Pemalang masih dibawah Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes. Memahami hal tersebut, kedepannya Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu meningkatkan potensi daerah, dan daya tarik terhadap investor, agar investor melirik peluang-peluang usaha untuk dikembangkan di Kabupaten Pemalang.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, diolah

Gambar III.11

Nilai Investasi Kabupaten Pemalang dalam Kawasan Bregasmalang Tahun 2022 (Milyar)

6. Belum Optimalnya Pembangunan Kebudayaan di Seluruh Elemen Masyarakat

Pembangunan kebudayaan daerah menjadi salah satu hal yang penting dalam melestarikan budaya lokal daerah dan pembangunan karakter dalam masyarakat. Dengan adanya permasalahan pokok, "Belum optimalnya pembangunan kebudayaan diseluruh elemen masyarakat", hal ini disebabkan oleh permasalahan yang dijabarkan sebagai berikut.

a. Belum maksimalnya pengembangan kebudayaan daerah dalam kehidupan masyarakat

Pengembangan kebudayaan daerah merupakan proses meningkatkan atau mempertahankan kebiasaan yang ada pada masyarakat. Dalam dinamika globalisasi yang sangat pesat, mampu menyebabkan lunturnya kebudayaan daerah dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Pemalang. Salah satu indikator yang dapat mencerminkan kondisi kebudayaan di Kabupaten Pemalang adalah Indeks kebudayaan. Indeks Kebudayaan merupakan indeks (komposit) yang tersusun dari dimensi ekonomi budaya, pendidikan, konservasi

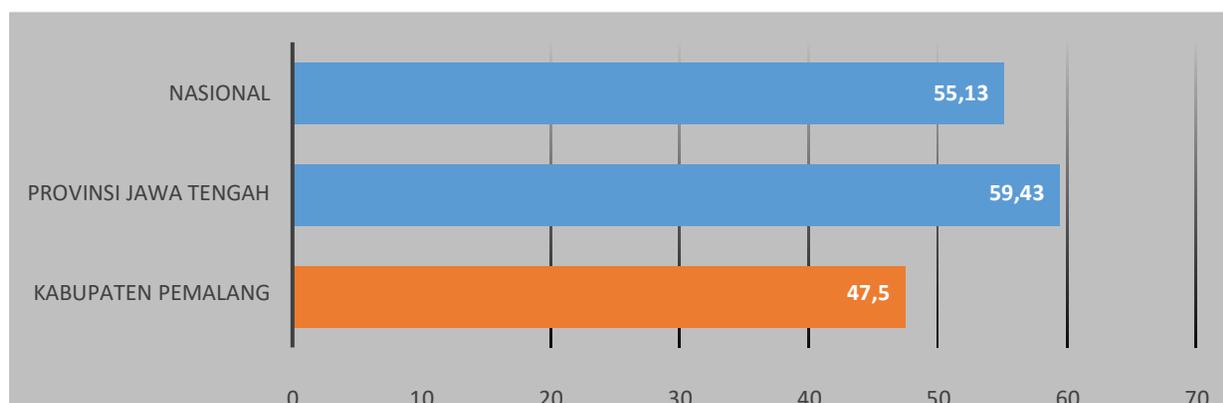
warisan budaya dan budaya literasi. Penilaian dimensi Indeks Kebudayaan Kabupaten Pemalang secara rinci disajikan pada Tabel III.4 dibawah ini.

Tabel III.4.
Nilai Indeks Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2022

Dimensi	Indikator	Tahun 2022	
		NILAI	IK
Ekonomi Budaya	Penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung pertunjukan kesenian (%)	0	3,999
Pendidikan	RLS (tahun)	6	23,47
	HLS (tahun)	12	
Warisan Budaya	Warisan budaya benda yang telah ditetapkan (%)	9,3	14,74
	Warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan (%)	2,99	
	Penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/wisata budaya (%)	12	
Budaya Literasi	Nilai budaya literasi	28,98	5,244
Indeks Kebudayaan		47,5	

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat capaian indeks kebudayaan Kabupaten Pemalang tahun 2022 sebesar 47,50 jika dibandingkan dengan capaian indeks kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 59,43 dan nasional indeks kebudayaan sebesar 55,13 seperti yang tersaji pada 0. Dengan ini terlihat capaian Indeks Kebudayaan Kabupaten Pemalang masih dibawah capaian Indeks Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Dengan ini mengindikasikan belum maksimalnya pengembangan kebudayaan di Kabupaten Pemalang, yang kedepannya perlu adanya peningkatan pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.



Sumber : Kemendikbud dan Bappeda Kab.Pemalang Tahun 2023, diolah.

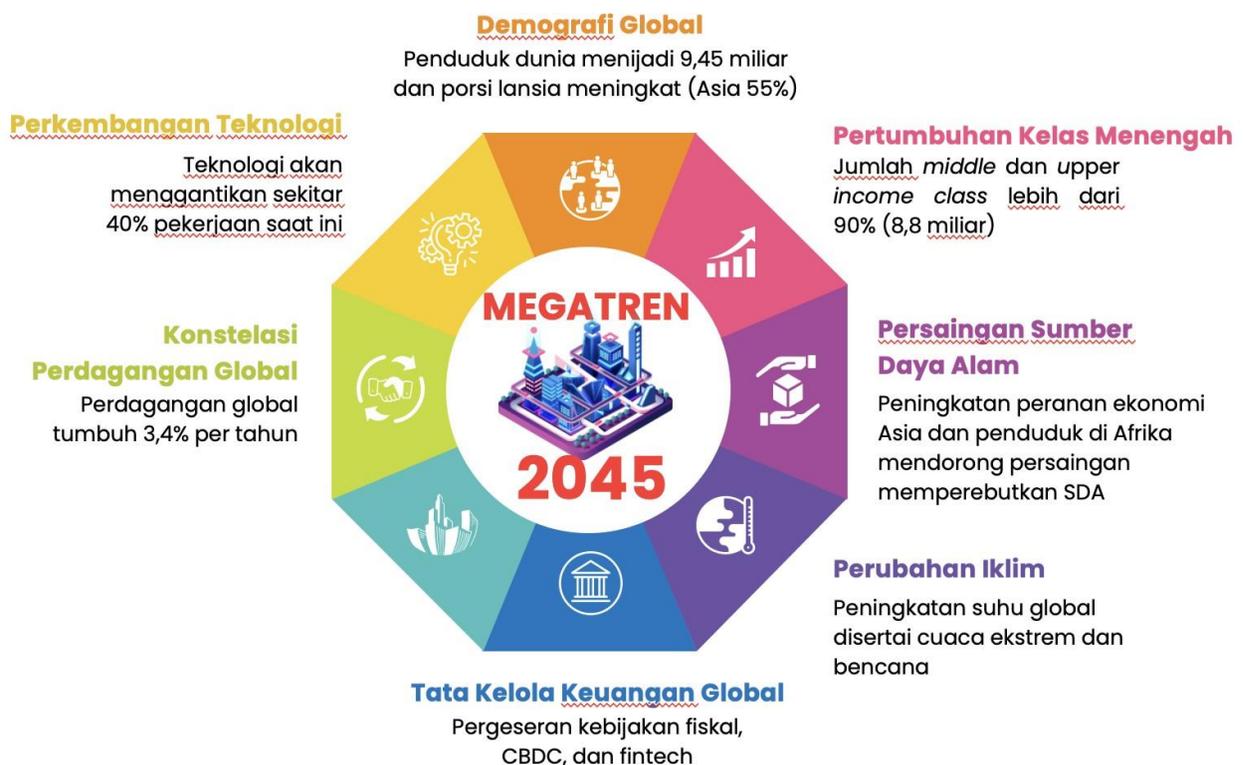
Gambar III.12
Perbandingan Indeks Kebudayaan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional

3.2 Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan berbagai persoalan yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional karena krusialnya kondisi atau perihal dalam pembangunan daerah masa kini maupun mendatang. Terkait dengan hal tersebut, perlu kiranya isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun program kegiatan prioritas pembangunan jangka Panjang agar pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat lebih terstruktur, tepat, dan cepat. Isu-isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya, akan menjadi kelebihan tersendiri dalam meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, namun sebaliknya jika isu strategis tidak diindahkan maka bukan hal yang mustahil terjadi beberapa kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah. Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan jangka panjang. Rumusan dari isu strategis mencakup isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang memiliki keterkaitan dan integrasi.

3.2.1 Isu Strategis Internasional

Dalam dinamika pembangunan daerah selalu memiliki tantangan, seiring dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi pada situasi dan kondisi yang berdampak masif dalam pembangunan daerah. Memahami bahwa pembangunan daerah merupakan bagian dalam pembangunan nasional, maka tantangan pembangunan nasional juga akan menjadi isu dan tantangan dalam pembangunan daerah. Dengan ini, di dalam RPJPN Tahun 2025-2045 tertuang isu dan tantangan global yang akan dihadapi Indonesia yang disebut dengan "Megatren", beberapa beberapa poin megatren dituangkan pada gambar sebagai berikut.



Sumber : RPJPN Tahun 2025-2045

Gambar III.13
Tantangan Global pembangunan jangka Panjang Nasional

Menindaklanjuti hal tersebut, maka tantangan global/megatren ini juga akan menjadi isu dan atau tantangan dalam pembangunan Kabupaten Pemalang mendatang dalam jangka panjang. Beberapa poin sesuai dengan megatren global yang akan dihadapi dalam pembangunan 20 (dua puluh) tahun mendatang Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

1) Perkembangan demografi global

Pembangunan harus berpusatkan pada penduduk (*people-centered development*), yaitu pembangunan yang berorientasi kepada potensi dan kebutuhan penduduk. Pembangunan saat ini, belum sepenuhnya mengarah pada pembangunan berwawasan kependudukan dengan tantangan yang tergambar dari tingginya laju dan jumlah penduduk, struktur penduduk dan kepadatan dan persebaran penduduk yg belum merata. Perkembangan demografi global ini merupakan perubahan struktur umur yang menjadi sebuah kesempatan dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Dengan memperkuat dan meningkatkan kualitas SDM demi mendorong pertumbuhan ekonomi sebelum rasio ketergantungan meningkat. Dalam pembangunan Kabupaten Pemalang harus segera menyadari, menindaklanjuti serta mempersiapkan adanya dampak demografi global.

Dengan jumlah penduduk Kabupaten Pemalang diproyeksikan mencapai 1.791.957 jiwa pada tahun 2045, berdasarkan proyeksi BPS. Angka ini meningkat kisaran 286.827 jiwa dibandingkan jumlah penduduk saat ini. Memahami hal itu, pemerintah Kabupaten Pemalang perlu mempersiapkan pembangunan, salah satunya dengan memaksimalkan pembangunan SDM terutama pada generasi yang berusia produktif terutama skill dan daya saingnya. Kemudian selain itu, perlu adanya persiapan kebutuhan masyarakatnya, terkait sarana dan prasarana, lapangan pekerjaan dan aksesibilitas. Dengan ini diharapkan perkembangan demografi global akan menjadi peluang dalam pembangunan Kabupaten Pemalang.

2) Perkembangan teknologi

Pada era globalisasi sekarang ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat dan semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi informasi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan. Dengan segala sumberdaya yang ada dimiliki, pembangunan Kabupaten Pemalang harus mampu mengikuti dan memanfaatkan setiap perkembangan globalisasi teknologi dan komunikasi. Dengan ini perlu adanya infrastruktur IT harus dipersiapkan dengan matang, bagaimana seluruh wilayah Kabupaten Pemalang mampu mengakses dan memanfaatkan infrastruktur IT dalam pembangunan daerah. Perkembangan teknologi yang kian pesat tidak hanya dimanfaatkan dalam pelayanan publik di Kabupaten Pemalang, namun juga percepatan pembangunan ekonomi masyarakat. Perkembangan teknologi saat ini dimanfaatkan masyarakat terutama dalam dunia usaha (UMKM) di kabupaten Pemalang untuk bekerjasama dengan e-commerce, sehingga market yang terjaring tidak hanya pada lokal saja, tapi juga konsumen diberbagai belahan dunia. Selain dalam dunia usaha, perkembangan IT juga dimanfaatkan oleh Pemerintah

Kabupaten Pemalang untuk memberikan ruang pada olahraga digital (*e-sport* yang mana Kabupaten Pemalang pernah menyelenggarakan, ”*Competition Mobile Legend E-Sport* di SMK Satya Praja 02 Petarukan. Hal ini menjadi peluang dan tantangan kedepan bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang agar dapat mengembangkan dalam memanfaatkan perkembangan IT dalam seluruh aspek pembangunan daerah. Dengan ini, kedepan pembangunan Kabupaten Pemalang diharapkan mampu mengakomodasi segala perkembangan teknologi yang diharapkan mampu berdampak positif dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

3) Pertumbuhan kelas menengah (*middle class*)

Pertumbuhan kelas menengah ini sangat terkait dengan tingkat ekonomi masyarakat dan atau proporsi ekonomi masyarakat. Kelas menengah dapat diartikan masyarakat yang aman secara ekonomi, dan berpeluang kecil untuk menjadi miskin. Dengan ini dapat dikatakan kelas menengah merupakan tingkatan ekonomi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya secara layak dan sejahtera. Pertumbuhan kelas menengah ini berorientasi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat, yang mana hal ini dianggap mampu menciptakan peluang ekonomi namun juga memberikan tantangan pada aspek sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam pembangunan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pemalang perlu ditingkatkan agar mampu naik kelas sehingga berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan daya saing produk unggulan daerah dan dikolaborasikan dengan teknik pemasaran dengan penggunaan sosial media dan teknologi informasi. Dengan kolaborasi ini diharapkan mampu tercipta peluang-peluang usaha lainnya yang mampu dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan perekonomian.

4) Konstelasi Perdagangan Global

Konstelasi perdagangan global di dunia saat ini mengalami perubahan persaingan yang semakin ketat. Hal ini berpotensi memberikan dampak pada perdagangan di Indonesia dan juga Kabupaten Pemalang. Kabupaten pemalang memiliki posisi yang strategis, baik dari sisi perdagangan maupun pemerintahan. Kegiatan ekonomi rakyat yang menjadi andalan di Kabupaten Pemalang adalah industri tekstil seperti sarung tenun, sarung palekat, kaos kaki dan goyor dan produk kerajinan yang sudah menembus pasar ekspor ke Singapura dan Malaysia. Selain itu adanya produk gondorukem yang menjadi ekspor andalan dari Kabupaten Pemalang yang tercatat ekspor ditahun 2020 mencapai 6.622,6 ton dengan nilai 132,49 miliar. Gondorukem (*resina colophonium*) adalah hasil olahan dari getah batam pinus, yang digunakan untuk beberapa industri seperti kertas, cat, plastik, kosmetik, elektronik, batik, sabun dan industri lainnya. Dengan adanya persaingan perdagangan global hal ini menjadi tantangan dalam pembangunan daerah khususnya pada bidang perdagangan dan industri. Dengan ini kedepannya pemerintah Kabupaten Pemalang diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk unggulan daerah, sehingga dapat

meningkatkan kinerja ekspor, yang pastinya akan berdampak pada pembangunan ekonomi daerah.

5) Tata Kelola Keuangan Global

Tata kelola keuangan global dan nasional sangat berkaitan dengan adanya perubahan struktur ekonomi dan demografi, yang kemungkinan hal ini juga akan dialami oleh Kabupaten Pemalang. Dengan melihat pertumbuhan penduduk Kabupaten Pemalang diproyeksikan mencapai 1.791.957 jiwa pada tahun 2045. Pada tahun 2045 ada kemungkinan adanya pergeseran *aging society* dalam demografi penduduk, yang akan berdampak produktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Selain itu, dengan perkembangan teknologi informasi saat ini telah mampu menggeser tata kelola keuangan global konvensional menjadi lebih modern yang terlihat pada penggunaan bank digital, fintech (*financial technology*) dan transaksi yang sudah *cash-less*. Dengan perpaduan system IT dan perbankan mampu meningkatkan efisiensi dan perluasan akses ke layanan keuangan. Namun pertumbuhan pesat perusahaan teknologi finansial juga mempunyai resiko yang tinggi, jika belum ada regulasi yang memadai. Hal ini berpotensi menimbulkan implikasi stabilitas keuangan dalam masyarakat maupun daerah.

6) Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam

Pemanfaatan SDA (Sumber Daya Alam) merupakan salah satu cara memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan perkembangan penduduk yang semakin bertambah maka akan mengakibatkan tingginya masyarakat mengakses pemanfaatan SDM dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber Daya Alam (SDA) yang dibutuhkan masyarakat seperti air, bahan pangan, energi akan berpotensi menyebabkan kelangkaan yang pada akhirnya akan terjadi persaingan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Memahami hal ini, pemanfaatan SDA di Kabupaten Pemalang harus dikelola dengan bijak terutama perlu adanya upaya konservasi sumber daya alam dan kolaborasi dengan teknologi pengolahan. Sehingga ketersediaan SDA dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pemalang dapat dinikmati dalam jangka panjang.

7) Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam akibat dari pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian lingkungan. Perubahan iklim dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama terjadinya berbagai bencana alam. Salah satu potensi dampak perubahan iklim yang kemungkinan akan dialami oleh Kabupaten Pemalang adalah *Sea Level Rise* (*peningkatan permukaan air laut*) yang dapat menimbulkan kerugian sosio-meter. Peningkatan permukaan air laut seperti peristiwa banjir rob yang pernah terjadi di tahun 2022, tinggi air yang menggenangi pemukiman penduduk di 8 Desa antara 20 – 100 centimeter, paling parah di Desa Pesantren antara 80 – 100 centimeter. Hal ini berdampak pada hilangnya mata pencaharian, tempat tinggal masyarakat, dan kerugian infrastruktur. Selain itu perubahan Iklim juga mempengaruhi kualitas hasil produksi panen tanaman pangan, yang berimplikasi pada

meningkatnya harga bahan makanan pokok. Melihat dampaknya yang besar bagi pembangunan dan lingkungan maka perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi isu perubahan iklim melalui perencanaan pembangunan yang harus ramah lingkungan (pembangunan berkelanjutan) yang harus terus dilaksanakan dalam pembangunan di Kabupaten Pemalang.

3.2.2 Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya *treatment* khusus dalam mengantisipasinya. Selain memerhatikan isu skala internasional, hal-hal lain yang menjadi pertimbangan perumusan isu-isu strategis adalah isu/kebijakan nasional yang dijabarkan sebagai berikut.

1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Rancangan Akhir RPJPN) Periode 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional. Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN maka untuk memajukan Negara Indonesia.

Dengan mempertimbangkan segala potensi Negara Indonesia, isu dan dinamika tantangan pembangunan, dan berbagai kajian yang ada, maka Visi dan Misi RPJPN Indonesia Tahun 2025-2045 pada Gambar III.14 dengan penjabaran sebagai berikut:



Gambar III.14
Visi Indonesia EMAS 2045

Dengan visi diatas, maka diperlukan komitmen dan kejelasan apa aja yang harus dicapai sebagai 'goals' visi Indonesia Emas 2045 melalui 5 (lima) Sasaran Utama Visi Indonesia 2045, yaitu:

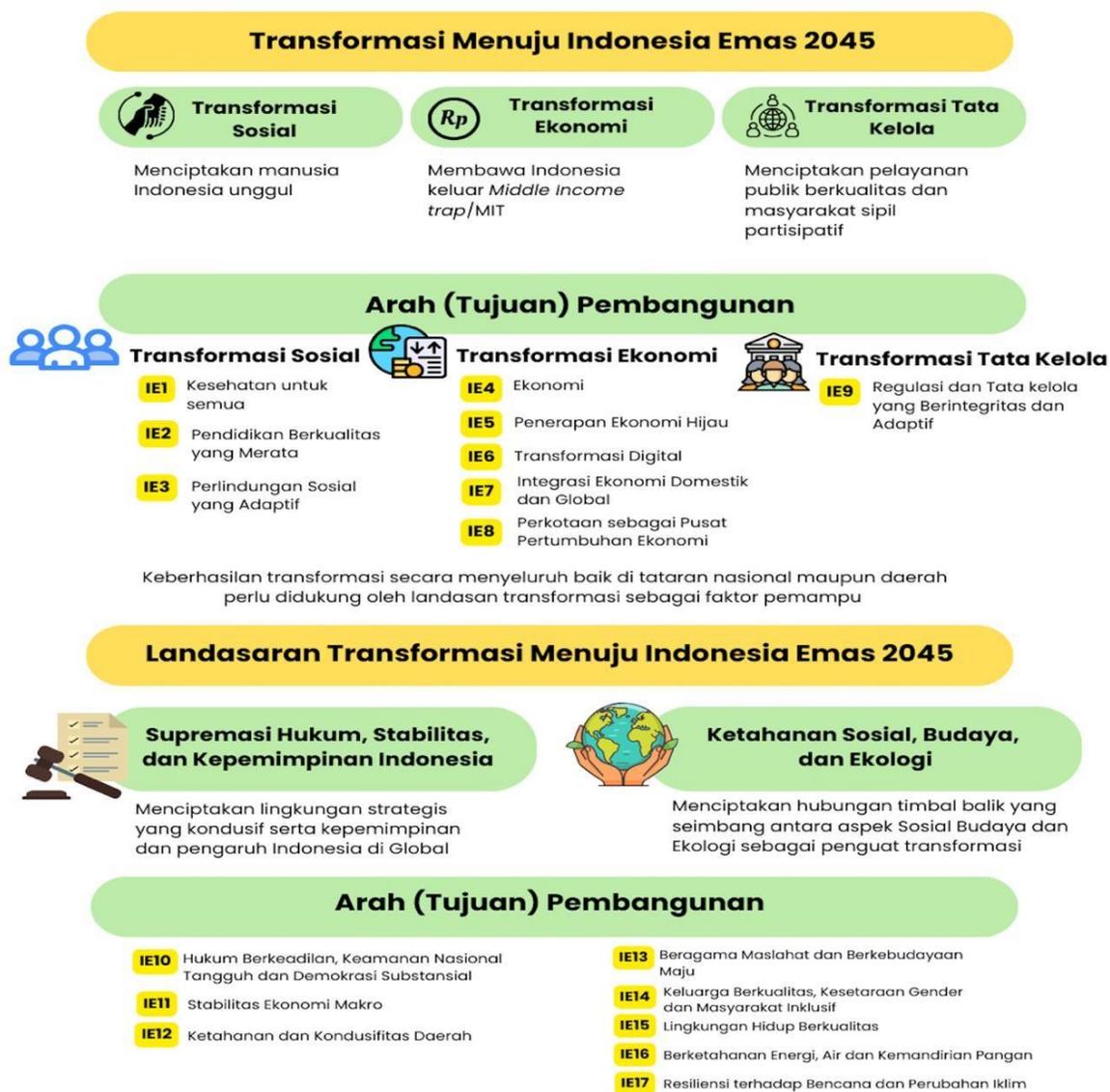
- Pendapatan Per kapita setara negara maju
- Kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang
- Kepemimpinan dan pengaruh di dunia international meningkat
- Daya saing sumber daya manusia meningkat
- Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.

Berdasarkan visi dan misi diatas, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan Koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.
3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum, dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.

8. Kestinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

Dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, perlu adanya pendekatan pembangunan yang diperkuat dengan transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembangunan dalam 17 arah pembangunan yang terbagi dalam 3 transformasi besar yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi Tata Kelola yang secara rinci dijabarkan dengan 17 arah pembangunan pada Gambar III.15 sebagai berikut:



Gambar III.15

17 (tujuh belas) arah pembangunan Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045

Dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Pemalang harus memdomani dan memperhatikan kebijakan nasional yang dituangkan dalam RPJPN tahun 2025-2045. Dengan berdasarkan penjabaran visi, misi, sasaran utama dan arah pembangunan RPJPN diatas, dapat disimpulkan RPJPD Kabupaten Pemalang sudah memperhatikan kebijakan nasional. Secara umum RPJPD Kabupaten Pemalang sudah memiliki keterkaitan dengan misi RPJPN, terutama pada misi nomor 1 hingga nomor 7 dan transformasi sosialpembangunan dalam kebijakan RPJPD Kabupaten Pemalang.

3.2.3 Isu Strategis Daerah

1) Telaahan RPJPD dan Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah

Pencapaian pembangunan Provinsi Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh pencapaian Kab/Kota dalam lingkup Provinsi. Dalam rangka mendukung pembangunan Provinsi Jawa Tengah, maka kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pemalang harus memperhatikan kebijakan pembangunan Provinsi. Menindaklanjuti hal tersebut maka beberapa urgensi dalam Rancangan Awal RPJPD Provinsi Jawa Tengah yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan pembangunan dalam rancangan Awal RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah

- Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat
- Daya saing dan produktivitas perekonomian daerah belum optimal
- Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah
- Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana
- Belum optimalnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia
- Terjadinya pergeseran karakter dan nilai-nilai budaya masyarakat
- Belum optimalnya reformasi birokrasi

b. Isu pembangunan dalam rancangan Awal RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah

- Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan
- Penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
- Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana
- Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia
- Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat
- Tata kelola pemerintahan yang dinamis

c. Visi dalam Rancangan Awal RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah

**“JAWA TENGAH MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, BERBUDAYA,
DAN BERKELANJUTAN”**



Gambar III.16

Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

Dari visi diatas, terdapat 5 (lima) pokok visi dengan penjabaran di bawah ini:

- 1) Mandiri, dalam pembangunan Provinsi Jawa Tengah mandiri ini diartikan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri dan mampu memberi kontribusi pihak lain.
- 2) Maju, bermakna masyarakat yang berada pada tingkat peradaban yang tinggi dalam penguasaan teknologi.
- 3) Sejahtera, diartikan suatu kondisi yang menunjukkan masyarakat di Jawa Tengah dalam keadaan sehat, tercukupi kebutuhan dasarnya.
- 4) Berbudaya, bermakna masyarakat yang berkarakter kuat, menjaga etika dan norma, mempertahankan kearifan lokal dalam semua sektor.
- 5) Berkelanjutan, bermakna menjaga kesejahteraan ekonomi, kehidupan sosial masy, kualitas lingkungan hidup, keadilan dan tata kelola untuk peningkatan kualitas hidup satu generasi ke generasi berikutnya

Dalam mencapai visi tersebut, maka sebagai upaya pencapaian misi RPJPD Provinsi Jawa Tengah yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Transformasi Ekonomi
2. Infrastruktur Berkualitas dan Ramah Lingkungan
3. Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan hidup dan Bencana
4. Transformasi sosial
5. Ketahanan Budaya
6. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan

Dalam pembangunan jangka panjang, terdapat tema pembangunan dalam empat tahapan pembangunan. Tema pembangunan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar III.17 sebagai berikut.

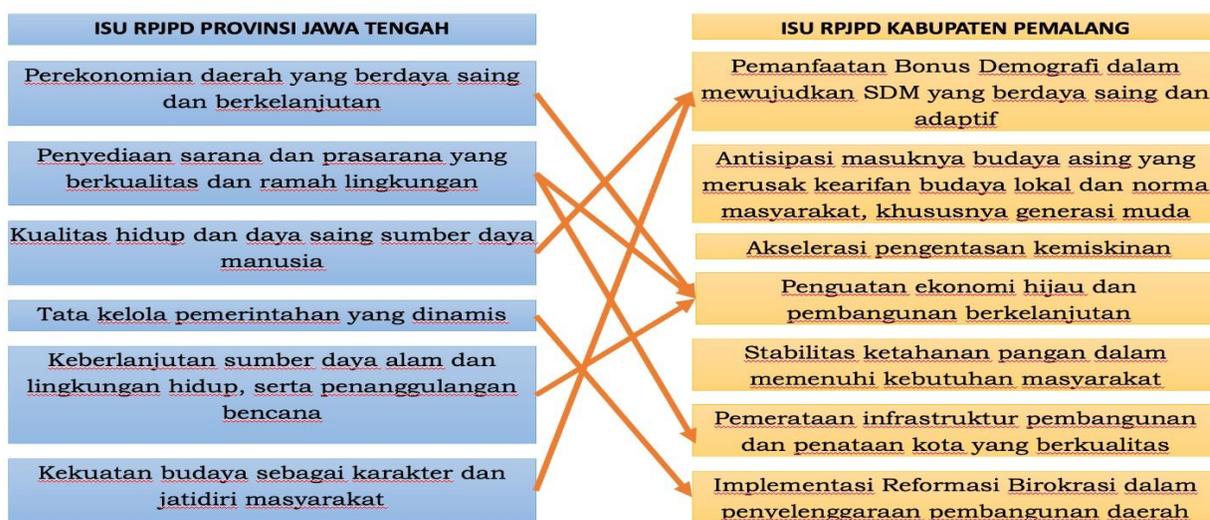


Gambar III.17

Tema RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045

- d. Arah Pembangunan untuk Kabupaten Pemalang dalam Rancangan Awal RPJPD adalah sebagai berikut:
 1. Menjadikan Kabupaten Pemalang sebagai pusat pengembangan pariwisata alam di Wilayah Pengembangan Bergasmalang dengan memanfaatkan potensi alam yang ada
 2. Pengembangan pariwisata alam sinergis dengan penguatan pembangunan wilayah pertanian sebagai sektor unggulan Kabupaten Pemalang
 3. Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah yang diarahkan untuk pengembangan infrastruktur
 4. Pendekatan pembangunan berbasis *ecoregion* dengan tetap mempertahankan kelestarian Sumber Daya Alam yang ada

Dengan beberapa poin penjabaran dalam urgensi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah dua puluh tahun kedepan, bahwa permasalahan, isu strategis, visi, misi dan arah pembangunan pembangunan harus diperhatikan dan diintegrasikan dalam perencanaan jangka panjang Kabupaten Pemalang. Setelah memperhatikan beberapa penjabaran Ranwal RPJPD Provinsi Jawa tengah diatas, terlihat bahwa permasalahan dan isu strategis dalam cakupan pembangunan jangka panjang Kabupaten Pemalang sudah diperhatikan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Pemalang. Hal ini terlihat pada beberapa aspek permasalahan dan isu strategis yang sudah sesuai dengan pembahasan dalam RPJPD Provinsi dan Kabupaten Pemalang, yang terlihat pada gambar kesesuaian permasalahan dan isu yang tertuang pada Gambar III.18 dan Gambar III.19 dibawah ini.



Gambar III.18
Keterkaitan isu strategis RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPD Kabupaten Pemalang



Gambar III.19
Keterkaitan Permasalahan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPD Kabupaten Pemalang

2) Telaahan KLHS RPJPD

Dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Pemalang harus mengimplementasikan isu pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam KLHS-RPJPD. Dengan berdasarkan hasil analisis skenario kondisi lingkungan dan skenario tujuan pembangunan berkelanjutan dan sesuai hasil rumusan isu serta permasalahan RPJPD Kabupaten Pemalang. Dalam rangka menindaklanjuti sinkronisasi antara isu dan permasalahan pembangunan berkelanjutan (PB) dan RPJPD perlu adanya matriks penyalarsan isu PB dengan RPJPD yang tertuang pada Tabel III.5 dibawah ini.

Tabel III.5.
Matriks isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) dengan masalah & isu RPJPD Kabupaten Pemalang

KLHS-RPJPD	RPJPD	
ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (PB)	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
Kualitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Belum optimalnya pencapaian SDM yang unggul ❑ Belum optimalnya pembangunan kebudayaan di seluruh elemen masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Pemanfaatan Bonus Demografi dalam mewujudkan SDM yang berdaya saing dan adaptif ❑ Antisipasi masuknya budaya asing yang merusak kearifan budaya lokal dan norma masyarakat, khususnya generasi muda
Belum optimalnya distribusi kesejahteraan masyarakat dengan dukungan kepastian hukum yang adil, inklusif dan berbasis kesetaraan gender	Belum optimalnya kualitas kesejahteraan masyarakat yang adil dan berkesinambungan	Akselerasi pengentasan kemiskinan
Perlu meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Belum optimalnya nilai tambah sector unggulan berlandaskan tata Kelola ekonomi hijau ❑ Belum meratanya pembangunan daerah berbasis infrastruktur dan berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Penguatan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan ❑ Stabilitas ketahanan pangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat
Belum optimalnya ekonomi dan pariwisata yang berkelanjutan serta berorientasi pada ekonomi kerakyatan		Pemerataan infrastruktur pembangunan dan penataan kota yang berkualitas
Perlu untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan berbasis teknologi informasi	Belum optimalnya tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	Implementasi Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

Dari tabel matriks diatas, dapat disimpulkan bahwa isu Pembangunan Berkelanjutan dengan permasalahan dan isu RPJPD terlihat sudah selaras, hal ini menunjukkan bahwa dokumen RPJPD sudah mengimplementasikan isu KLHS-RPJPD.

3) Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

A. Konstelasi Kabupaten Pemalang Secara Regional

Apabila ditinjau kedudukannya secara regional, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, Kabupaten Pemalang memiliki peran sebagai PKL (Pusat Kegiatan Lokal).

Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Dalam menjalankan perannya sebagai PKL di lingkup wilayah Provinsi Jawa Tengah,

Dalam hal ini, Kabupaten Pemalang termasuk dalam Wilayah Pengembangan Bregasmalang yang merupakan kawasan regional yang memiliki keterkaitan pengembangan secara ekonomi, sosial, dan/atau budaya dengan cakupan daerah meliputi Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang yang disajikan pada Gambar berikut.



Wilayah Pengembangan Bregasmalang

Orientasi pengembangan Bregasmalang, dimana Kota Tegal berperan sebagai pusat wilayah pengembangan dengan statusnya sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), didasarkan pada pada sektor unggulan yang meliputi:

1. industri;
2. perdagangan dan jasa;
3. pertanian;
4. pariwisata;
5. perikanan;
6. kehutanan; dan
7. pertambangan.

Secara spesifik Kabupaten Pemalang diarahkan pengembangan wilayahnya berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah, sebagai wilayah dengan peruntukkan strategis Kawasan Agropolitan dan minapolitan.

Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. Sedangkan kawasan minapolitan adalah Kawasan suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.

B. Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang

Dalam Perda RTRW Kabupaten Pemalang sendiri, tujuan penataan ruang Daerah didasarkan atas sektor utama yang akan menjadi penopang perkembangan wilayah daerah yaitu sektor pertanian, yang didukung sektor perdagangan dan industri.

Adapun penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Pemalang memiliki tujuan untuk:

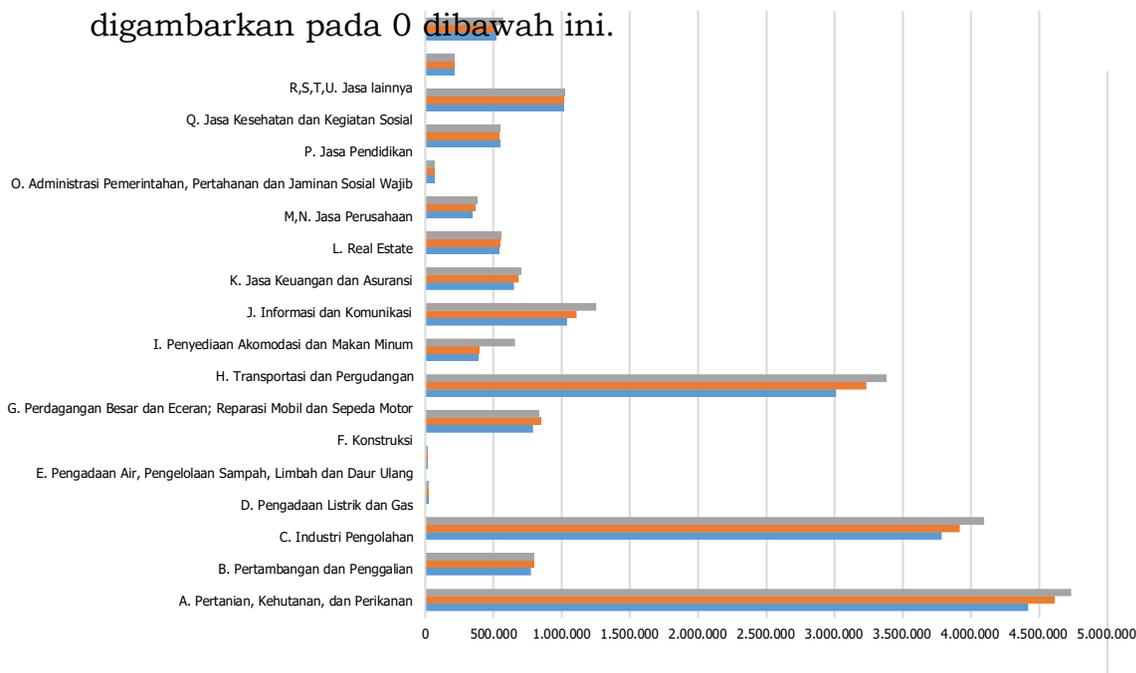
“Mewujudkan ruang daerah berbasis pertanian yang didukung oleh sektor perdagangan dan industri dalam sistem wilayah terpadu dan berkelanjutan”.

Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang yang berbasis pada pengembangan Pertanian didukung oleh sektor perdagangan dan industri dalam sistem wilayah yang terpadu tidak terlepas dari kondisi Ekoregion Kabupaten Pemalang yang tersusun atas landscape wilayah pertanian baik sektor pangan maupun hortikultura. Selain beras sebagai komoditas pangan utama, Pemalang juga memiliki komoditas pangan strategis lainnya, seperti komoditas tanaman hortikultura. Beberapa di antaranya, bawang merah, cabe besar, nanas, mangga, dan durian. Sedangkan untuk perkebunan, di Pemalang juga terdapat cengkeh, teh, tebu, kopi arabika, kopi robusta, serta tembakau.

Selanjutnya, berkaitan dengan telaah RTRW, maka aspek substansial yang diperlukan adalah konsistensi alokasi pola ruang yang mendukung ke arah kebijakan dan pembangunan di Kabupaten Pemalang dalam periode waktu 20 tahun mendatang yang dapat ditinjau dalam alokasi fungsi budidaya dan fungsi lindung. Pada tahap ini, diharapkan agar orientasi perencanaan spasial dapat saling melengkapi secara komprehensif dengan dokumen perencanaan pembangunan

Pembangunan ekonomi Kabupaten Pemalang dinilai cukup baik, namun perlu mengoptimalkan sektor-sektor perekonomian agar dapat bersaing di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Sektor pertanian di Kabupaten Pemalang menjadi sektor perekonomian yang berpotensi sebagai sektor unggulan. PDRB Kabupaten Pemalang ADHK 2010 menurut lapangan usaha tahun selama tiga tahun terakhir (2020 sd 2022) sebesar 18.155.597 juta 18.933.194 juta 19.895.335 juta rupiah dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai penyumbang terbesar PDRB yaitu

berturut-turut sebesar 4.419.014 juta (24,34%), 4.613.437 juta (24,37%) dan 4.735.899 juta (23,80%) (BPS Kabupaten Pemalang, 2023) yang digambarkan pada 0 dibawah ini.

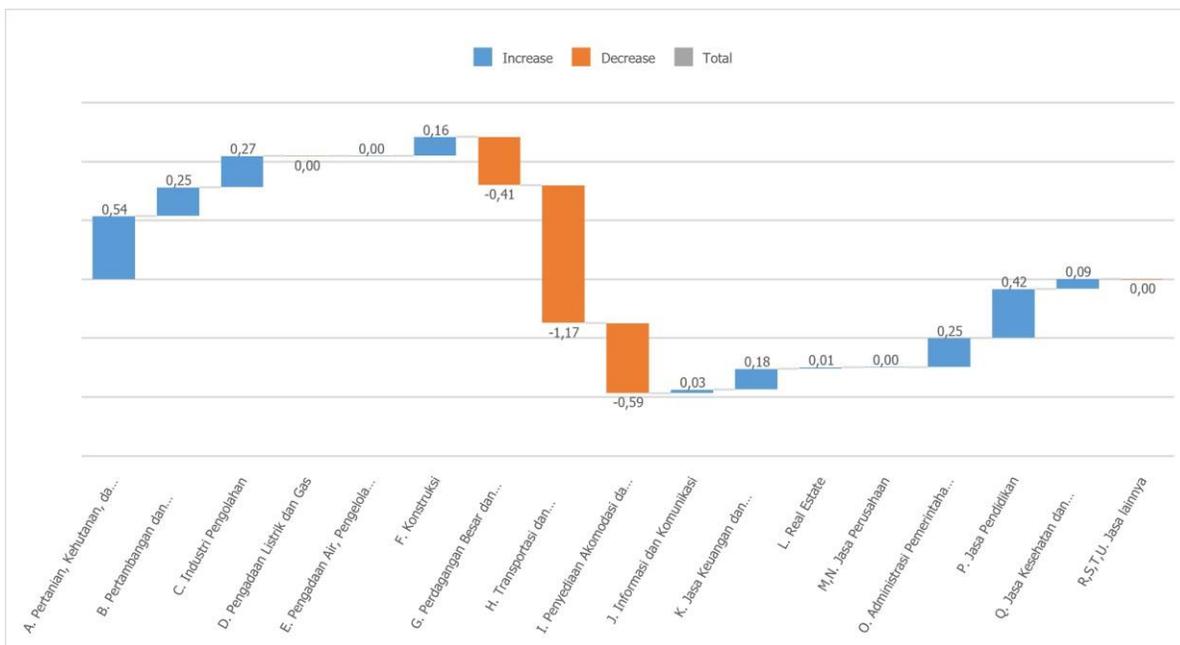


Sumber: BPS Kabupaten Pemalang, 2023

Gambar III.20

Tren PDRB Kabupaten Pemalang ADHK 2010 menurut lapangan usaha

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Pemalang ditinjau dari laju pertumbuhannya dari tahun 2020-2022 relatif mengalami penurunan mencapai 0,54% sekaligus menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi. Selanjutnya diikuti oleh sektor Jasa Pendidikan dengan laju pertumbuhan tertinggi kedua mencapai 0,42%. Sementara itu Industri pengolahan, Pertambangan dan administrasi masing-masing 0,27% dan 0,25% seperti yang tersaji pada gambar sebagai berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Pemalang, 2023

Gambar III.21

Tren laju pertumbuhan per sektor PDRB ADHK

Sementara itu, sektor-sektor yang mengalami penurunan adalah sektor Transportasi (-1,17%), Penyediaan Akomodasi makan dan minum (-0,59). Dan sektro Perdagangan besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (-0,41%).

Analisis potensi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam perekonomian di Kabupaten Pemalang juga dimaksudkan untuk mengetahui Klasifikasi pertanian kehutanan,dan perikanan berdasarkan analisis yaitu *Location Quotient* dan *Delta Location Quotient*.

Analisis *Location Quotient* sektor analisis yang digunakan untuk mengklasifikasikan 17 sektor perekonomian suatu daerah menjadi dua kategori yaitu basis dan non basis, diperoleh dari membandingkan kondisi sektor perekonomian suatu wilayah dengan kondisi sektor perekonomian wilayah yang satu tingkat di atasnya sebagai acuan. Apabila hasil $LQ > 1$ maka sektor tersebut disebut sektor basis dan cenderung melakukan eskpor ke wilayah lain sedangkan apabila $LQ < 1$ maka sektor tersebut disebut sektor non basis dan cenderung melakukan impor dari wilayah lain. Dalam penelitian ini, Kabupaten Pemalang dijadikan wilayah analisis dan Provinsi Jawa Tengah dijadikan sebagai wilayah acuan dengan menggunakan data PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha dari tahun 2017-2022, seperti yang tertuang pada Tabel III.6 dan Error! Reference source not found. sebagai berikut.

Tabel III.6.
Hasil Analisis *Location Quotient* (LQ) Sektor Perekonomian
Kabupaten Pemalang

Lapangan Usaha	Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ) Sektor Perekonomian Kabupaten Pemalang					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,69	1,67	1,64	1,65	1,68	1,61
b. Pertambangan dan Penggalian	1,80	1,72	1,64	1,68	1,57	1,52
c. Industri Pengolahan	0,60	0,58	0,59	0,59	0,58	0,56
d. Pengadaan Listrik dan Gas	1,38	1,34	1,33	1,34	1,35	1,34
e. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,41	1,40	1,37	1,30	1,28	1,26
f. Konstruksi	0,41	0,40	0,40	0,40	0,39	0,35
g. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,25	1,21	1,20	1,19	1,19	1,14
h. Transportasi dan Pergudangan	0,97	0,95	0,93	0,92	0,89	0,80
i. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,81	1,80	1,77	1,85	1,84	1,70
j. Informasi dan Komunikasi	0,80	0,81	0,80	0,81	0,81	0,81
k. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,00	0,98	0,96	0,96	0,92	0,85
l. Real Estate	1,10	1,08	1,07	1,09	1,11	1,08
m. Jasa Perusahaan	0,97	0,94	0,91	0,87	0,86	0,82
n. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,13	1,11	1,09	1,08	1,09	1,06
o. Jasa Pendidikan	1,21	1,19	1,17	1,14	1,13	1,12
p. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,18	1,17	1,17	1,14	1,13	1,10
q. Jasa lainnya	1,84	1,83	1,83	1,82	1,80	1,69

Sumber: Analisis Penyusun, 2023

Tabel III.7.

Hasil Analisis Sektor Basis dan Non Basis Kabupaten Pemalang

	BASIS	NON-BASIS
LQ	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Industri Pengolahan
	Pertambangan dan Penggalian	Konstruksi
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Transportasi dan Pergudangan
	Pengadaan Listrik dan Gas	Informasi dan Komunikasi
	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Jasa Keuangan dan Asuransi
	Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	Jasa Perusahaan
	Real Estate	
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	
	Jasa Pendidikan	
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	
	Jasa lainnya	

Sumber: Analisis Penyusun, 2023

Dengan memperhatikan dari sudut pandang Penataan Ruang, Daya Dukung dan Daya Tampung Spasial, rekomendasi yang dapat diberikan sebagai data dukung perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang adalah Pengembangan Berbasis Pada Pertanian (Agropolitan dan Minapolitan) dengan didukung oleh kegiatan hilirisasi pertanian baik Agroindustri maupun Agribisnis.

3.2.4 Isu Strategis Kabupaten Pemalang

Isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah. Isu strategis menjadi hal krusial karena pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan masa mendatang. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu baik internasional, nasional maupun daerah, dapat ditentukan isu strategis untuk Kabupaten Pemalang yang akan ditangani dalam 20 tahun ke depan yang dijabarkan sebagai berikut:

1) Pemanfaatan Bonus Demografi dalam mewujudkan SDM yang berdaya saing dan adaptif

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan daerah. Dengan SDM yang berkualitas diharapkan akan mampu melaksanakan penyelenggaraan urgensi-urgensi pembangunan daerah dengan maksimal. Pembangunan SDM harus menyeluruh, artinya tidak hanya dari aspek kualitas pendidikan atau kepintarannya/kecerdasannya saja, namun juga harus berkarakter. SDM yang berkarakter ini terbentuk dari nilai-nilai budaya yang ada didalam kehidupan masyarakat. Dengan kualitas SDM unggul diharapkan mampu mencetak generasi yang berdaya saing, berbudaya dan aplikatif terhadap perkembangan teknologi informasi (IT). Kemampuan SDM untuk berdaya saing menjadi tuntutan dalam dunia kerja untuk memenuhi pasar kerja dan dunia usaha. Dengan adanya isu bonus demografi, kualitas SDM menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan Kabupaten Pemalang. Dengan ini Pemerintah daerah Kabupaten Pemalang perlu mempersiapkan beberapa hal yang matang dalam upaya mencetak generasi-generasi yang tangguh, berdaya saing, berbudaya sehingga momentum bonus demografi ini dapat ditangkap sebagai peluang untuk menyerap sebanyak-banyaknya tenaga kerja yang mampu bersaing dalam dunia kerja.

2) Akselerasi pengentasan kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu dampak dari kehidupan masyarakat yang belum sejahtera, artinya masyarakat belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak dan mandiri. Kemiskinan salah satu implikasi dari belum maksimalnya pembangunan kualitas SDM terutama dalam bidang pendidikan, keterbatasan masyarakat dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang baik akan menggiring pada minimnya produktivitas masyarakat. Kemiskinan akan menjadi lingkaran yang akan sulit diputus, jika masyarakat tidak mampu memberdayakan dirinya menjadi lebih produktif. Dengan melihat urgensi pengentasan kemiskinan perlu adanya akselerasi dari beberapa bidang aspek dalam pembangunan daerah untuk berkolaborasi, berkerjasama dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini penting karena pengentasan kemiskinan perlu beberapa aspek yang diperhatikan, tidak hanya dari pendidikan dan kesehatan, namun juga sarana-prasarana pemukiman yang layak, pelibatan dalam pemberdayaan masyarakat miskin, pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran. Sehingga dengan adanya akselerasi pengentasan kemiskinan ini diharapkan mampu menekan dan

menurunkan tingkat kemiskinan dalam masyarakat Kabupaten Pemalang.

3) Implementasi Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

Menurut Kementerian PAN-RB, tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Reformasi Birokrasi menjadi kebutuhan dalam dinamika penyelenggaraan pembangunan daerah. Dengan reformasi birokrasi diharapkan mampu menciptakan kebijakan-kebijakan pembangunan yang dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Beberapa isu yang penting dalam reformasi birokrasi adalah 1) birokrasi yang belum kolaboratif; 2) transformasi digital yang belum optimal; 3) penyederhanaan struktur dan mekanisme kerja baru yang belum tuntas; 4) integritas penyelenggaraan pemerintahan yang masih menghadapi kendala; 5) budaya birokrasi: BerAKLHAK yang belum terimplementasi dengan baik. Mengingat capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pemalang 61,76 masuk pada kategori **"baik"**. Dengan demikian penting adanya komitmen pemerintah daerah Kabupaten Pemalang untuk mengimplementasikan reformasi birokrasi yang berintegritas, transparan dan akuntabel. Dengan implementasi reformasi birokrasi yang lebih baik diharapkan kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah dapat ditingkatkan.

4) Penguatan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan

Ekonomi hijau adalah bentuk pembangunan ekonomi yang mengedepankan pembangunan ekonomi dengan meminimalisir risiko kerusakan lingkungan secara signifikan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial. Konsep ekonomi hijau juga diartikan perekonomian yang minim menghasilkan emisi karbondioksida terhadap lingkungan. Prinsip ekonomi hijau merupakan perwujudan dari pembangunan berkelanjutan, yang memadukan tiga pilar pembangunan yakni ekonomi, lingkungan, dan sosial. Prinsip ekonomi hijau beserta pembangunan berkelanjutan menjadi strategi pembangunan yang tepat untuk mengakselerasikan pembangunan Kabupaten Pemalang dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan. Kabupaten Pemalang sebagai "Pusere Jawa" mengartikan bahwa Kabupaten Pemalang menjadi pusat peradaban di Pulau Jawa. Pusat peradaban ini menandakan adanya keanekaragaman potensi ekonomi di Kabupaten Pemalang. Kabupaten Pemalang memiliki topografi bervariasi sehingga memiliki tanah yang subur. Sektor pertanian dengan lahan sawah seluas 38.617 hektar dan lahan kering 23.813 hektar masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Dengan berdasarkan hasil analisis (LQ) *Location Quotient* pembangunan ekonomi Kabupaten Pemalang dapat fokuskan pembangunan ekonomi kedepan pada beberapa sektor basis yang tertuang pada Tabel III.7 diatas, terutama sektor-sektor yang menjadi unggulan saat ini harus kedepannya harus mampu memberikan nilai tambah lebih dalam pembangunan ekonomi daerah.

Dalam pembangunan perekonomian daerah harus diseimbangkan dengan pembangunan ekosistem lingkungan yang ada di dalamnya. Mengingat produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan menjadi salah satu sektor basis yang kedepannya akan dikembangkan. Dengan ini pembangunan ekonomi Kabupaten Pemalang diarahkan pada pembangunan Ekonomi hijau, sebagai salah satu ekskalasi pembangunan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang. Pembangunan pada bidang infrastruktur Kabupaten Pemalang nantinya harus diarahkan pembangunan infrastruktur lingkungan yang mampu mengurangi emisi karbon dan polusi, peningkatan efisiensi energi dan sumber daya serta pencegahan hilangnya keanekaragaman hayati. Penguatan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pemalang dijalankan dengan prinsip kesejahteraan, keadilan, konservasi alam, efisien, dan tata kelola yang baik. Dengan penguatan tersebut, Pembangunan Kabupaten Pemalang dapat berjalan secara inklusif, adil, dan berkelanjutan.

5) Stabilitas ketahanan pangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat

Stabilitas ketahanan pangan merupakan urgensi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Melalui stabilitas ketahanan pangan, Kabupaten Pemalang dapat memastikan ketersediaan gizi yang cukup untuk semua lapisan masyarakat dan mampu mempertahankan kesehatan serta nutrisi yang baik. Pilar ketahanan pangan meliputi ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kestabilan. Ketahanan pangan bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui ketersediaan produksi dan cadangan pangan, menjangkau konsumsi pangan dan gizi masyarakat.

Potensi luas lahan sawah mencapai 35 hektar di Kabupaten Pemalang menjadikannya sebagai daerah penyangga ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah. Potensi ini harus dimaksimalkan dengan mengkolaborasikannya dengan penguatan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, Kabupaten Pemalang diorientasikan pada pembangunan sektor usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan (pertanian dalam arti luas). Hal ini penting untuk mengembangkan produk-produk pertanian unggulan daerah agar Kabupaten Pemalang memiliki ketahanan pangan yang kuat di tengah ancaman ketahanan pangan. Ancaman ketahanan pangan meliputi perubahan iklim, penurunan kesuburan tanah akibat aktivitas ekonomi, serta ketidakstabilan harga. Stabilitas ketahanan pangan di Kabupaten Pemalang dapat diupayakan dengan pengembangan pertanian berkelanjutan, diversifikasi pangan, pengelolaan sumber daya, penguatan infrastruktur pertanian, serta pengelolaan risiko bencana. Upaya-upaya ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan masyarakat, sehingga mampu menjadi swasembada pangan yang berkelanjutan untuk Kabupaten Pemalang.

6) Antisipasi masuknya budaya asing yang merusak kearifan budaya lokal dan norma masyarakat, khususnya generasi muda

Perkembangan *society* 5.0 telah mengakselerasikan perkembangan teknologi informasi secara pesat. Implementasinya, perkembangan ini

tidak hanya memberikan peluang tetapi juga tantangan dalam kehidupan bermasyarakat. Pertukaran budaya dan pengetahuan, perluasan peluang bisnis dan investasi, peningkatan akses dan keterhubungan sampai pembentukan masyarakat yang inklusif menjadi peluang dalam perkembangan ini. Akan tetapi, pertukaran budaya dengan masuknya budaya asing dapat menjadi katalisator sistem sosial di Kabupaten Pemalang. Kurangnya penguatan budaya lokal mampu merusak kearifan budaya lokal dan norma masyarakat di Kabupaten Pemalang. Masuknya budaya asing yang mampu merusak keafian budaya lokal dan norma masyarakat rentan menyerang generasi muda. Generasi muda memiliki aksesibilitas yang tinggi terhadap media global, interaksi lintas batas, dan eksposur budaya. Dampak negatif dari adanya kemudahan ini harus dapat diantisipasi oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang. Mengingat Kabupaten Pemalang merupakan Kabupaten yang mempunyai etnis karakteristik budaya yang beragam. Kearifan lokal ini merupakan potensi yang perlu dilestarikan.

Pelestarian kearifan lokal dan norma sosial menjadi tugas penting Pemerintah Kabupaten Pemalang bersama seluruh masyarakat. Dapat diupayakan dengan peningkatan pendidikan dan kesadaran budaya serta norma dalam lingkungan masyarakat, pembiasaan penggunaan bahasa lokal, penyelenggaraan festival dan acara budaya, pemberdayaan komunitas budaya sampai kolaborasi antar generasi. Langkah strategis ini diharapkan mampu diselenggarakan secara holistik oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan sinergitas stakeholders untuk mempertahankan dan melestarikan kearifan lokal serta penerapan norma sosial di lingkungan masyarakat Kabupaten Pemalang.

7) Pemerataan infrastruktur pembangunan dan penataan kota yang berkualitas

Pembangunan infrastruktur mempunyai dampak yang sangat berpengaruh dalam produktivitas masyarakat dan mendukung dalam percepatan pembangunan daerah. Infrastruktur menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat untuk mempermudah aksesibilitas, konektivitas antar wilayah dan sarana prasarana umum dalam menunjang kehidupan masyarakat. Pembangunan infrastruktur tidak boleh lepas dari tata ruang wilayah, pembangunan yang dilaksanakan harus sesuai dengan peruntukannya. Pembangunan infrastruktur di kabupaten Pemalang diharapkan mampu sesuai dengan tata ruang wilayah, sehingga infrastruktur yang terbangun mampu memberikan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna infrastruktur. Selain itu, pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Pemalang mampu memberikan kesan tertata, rapi, indah, bersih sehingga masyarakat dapat menikmati pembangunan infrastruktur dengan nyaman.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan sekaligus pembangunan daerah juga merupakan bagian dari pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Pada pelaksanaannya, Kabupaten Pemalang memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan. Pada bab ini menggambarkan cita-cita yang hendak dicapai Kabupaten Pemalang untuk tahun 2025-2045.

Visi RPJPD merupakan cita-cita yang ingin dicapai Kabupaten Pemalang diakhir periode dalam perencanaan dua puluh tahun. Usaha untuk mengupayakan visi adalah dengan menentukan misi-misi dalam RPJPD. Melihat kondisi saat ini dimana terdapat pembaruan regulasi serta kebutuhan peningkatan perekonomian yang masih dirasakan masyarakat, maka perlu adanya kebijakan jangka panjang daerah untuk menangani dan memperbaiki kondisi dengan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Kabupaten Pemalang memiliki andil dalam perwujudan Indonesia Emas 2045 dimana cita-cita besar bangsa Indonesia tersebut tercermin dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045. Sebagai wilayah yang memiliki berbagai potensi baik SDM maupun SDA, tentu capaian pembangunan Kabupaten Pemalang akan memiliki daya ungkit yang cukup berdampak pada pencapaian pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan juga pembangunan Nasional.

RPJPD diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. RPJPD merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Penyusunan RPJPD Kabupaten Pemalang dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

Pada dasarnya, pembangunan jangka panjang di Kabupaten Pemalang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tersebut pada pasal 260 yang berbunyi “Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional”. Pasal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang memiliki kewajiban dalam melakukan pembangunan jangka panjang dua puluh tahunan dengan menyusun dan merumuskan berbagai kebijakan pembangunan yang nantinya akan diimplementasikan dalam pembangunan jangka menengah lima tahunan.

Visi dan Misi Jangka Panjang Daerah adalah milik daerah atau Masyarakat, sehingga dalam penyusunan visi dan misi jangka Panjang perlu keterlibatan Masyarakat secara partisipatif dengan metode Kuesioner. Metode ini mengolah hasil kuesioner menjadi visi dan misi Pembangunan jangka Panjang Kabupaten Pemalang.

Visi dan misi RPJPD menggambarkan jangkauan kebijakan yang lebih luas dalam jangka panjang dan secara konsisten dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan jangka menengah. Visi dan misi digunakan untuk menjelaskan gambaran umum tentang apa yang akan diwujudkan dalam RPJPD dan RPJMD serta kerangka umum kebijakan pembangunan untuk pencapaiannya. Visi dan misi harus dijelaskan untuk dapat dipahami para pemangku kepentingan dan dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun. Visi harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat/daerah dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar/basis bagi semua elemen atau semua pelaku (*stakeholders*) dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pemalang. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Di sini, visi diciptakan melampaui realitas sekarang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, visi didasarkan pada realita, bukan pikiran berandai-andai (*wishfull thinking*), tetapi dengan fokus pada masa depan. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Visi mengarahkan kondisi daerah yang ingin dicapai dimasa depan (*desired future*) dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Visi daerah dituangkan dalam RPJPD, dirumuskan, dibahas dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah secara partisipatif. Visi pembangunan jangka panjang daerah yang telah diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD menjadi acuan bagi (calon) kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam merumuskan visinya pada periode lima tahun berkenaan dan bagaimana RPJMD dikembangkan.

Sedangkan misi pembangunan merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi dalam dokumen perencanaan dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi jangka panjang daerah Kabupaten Pemalang. Oleh karena itu dalam penyusunannya, pernyataan misi Kabupaten Pemalang menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah, sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan visi dan misi merupakan bagian penting dalam penyusunan dokumen pembangunan jangka panjang dikarenakan visi merupakan pengejawantahan dari cita-cita Kabupaten Pemalang di tahun 2045. Penyusunan visi membutuhkan upaya yang besar karena dasar perumusan visi pembangunan jangka panjang ini harus memerhatikan visi nasional, visi provinsi Jawa Tengah, dokumen RTRW dan dokumen KLHS, serta harapan dari masyarakat.

Perbedaan dokumen pembangunan jangka Panjang dan dokumen pembangunan jangka menengah terkait konsep visi dan misi ini terdapat pada sumber penetapannya. Visi dan misi RPJPD merupakan milik Masyarakat, sedangkan visi dan misi dokumen pembangunan jangka menengah merupakan milik kepala daerah. Visi dan misi dokumen pembangunan jangka menengah yang diusung oleh kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan umum akan dipedomani dalam dokumen RPJMD. Sedangkan visi dan misi pembangunan jangka panjang dirancang melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan secara tertib.

Dalam merancang konsep visi dan misi pembangunan jangka panjang agar mampu menciptakan perencanaan jangka panjang yang komprehensif dan mampu konsisten dan berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah disusun melalui sosialisasi dan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan atas rancangan RPJPD. Proses ini dilaksanakan secara terbuka dengan partisipasi dan keterlibatan para *stakeholders* dengan keterwakilan bersifat *pentahelix* yang dalam hal ini terdiri dari pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat dan media. Hal ini dilakukan karena aspirasi dari publik harus terwakili untuk mengetahui harapan untuk kemajuan daerah dua puluh tahun ke depan.

4.1 Visi Pemalang

Pelaksanaan Pembangunan tahun 2025-2045 Kabupaten Pemalang diharapkan sejalan dengan visi Pembangunan jangka Panjang Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Visi Pembangunan Nasional Tahun 2025-2045 yaitu Visi Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Penentuan visi ini berlandaskan pada: (i) kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi: kependudukan, modal manusia, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim; (ii) perkembangan megatren global; dan (iii) pencapaian pembangunan periode sebelumnya. Visi nasional tersebut terdiri dari empat komponen yang menjadi cita-cita Bangsa Indonesia yang diharapkan terealisasi dalam peringatan ke 100 tahun kemerdekaan Indonesia.

Pada tahun 2045 Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya. Pada tahun 2045 Indonesia diharapkan sebagai

negara maju, ekonominya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasis pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, dan adil, sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Indonesia semakin berperan penting dalam berbagai forum-forum internasional.

Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.

Pembangunan daerah Kabupaten Pemalang dalam dua puluh tahun ke depan juga adalah dalam rangka menghadapi dinamika global dan nasional yang berpengaruh terhadap pembangunan Kabupaten Pemalang tahun-tahun sebelumnya. Dinamika tersebut terutama dipicu oleh megatren global seperti revolusi teknologi, perubahan demografi, perubahan iklim, serta dinamika geopolitik dan geoekonomi. Hal tersebut menuntut respon mitigasi dan adaptasi yang cepat dengan segala potensi yang dimiliki. Respon terhadap dinamika yang serba cepat ini diperlukan percepatan pembangunan dengan pendekatan transformasi dalam setiap aspek pembangunan. Transformasi untuk merespon dinamika harus juga diseimbangkan dengan ketahanan sumber daya dan budaya agar tetap tangguh dalam menghadapi setiap ancaman dan tantangan yang dimungkinkan akan terjadi di masa yang akan datang.

Dalam proses perumusan Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pemalang, partisipasi masyarakat diperlukan agar perencanaan yang disusun tepat sasaran serta sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Kabupaten Pemalang memulai penyusunan visi dan misi pembangunan jangka Panjang dengan menghimpun aspirasi dari Masyarakat melalui <http://pemalangkab.pembangunan2045.id/> yang dapat diakses oleh masyarakat Pemalang dengan mengisi kolom kuesioner. Hasil Kuesioner Kabupaten Pemalang yang disebarkan dari tanggal 10 Agustus 2023 hingga 30 Agustus 2023 berhasil menjangkau responden yang mengisi sebanyak 1.379 orang, dengan hasil akhir sepuluh besar harapan dari masyarakat Kabupaten Pemalang sebagai berikut:

Tabel IV.1.

Sepuluh Harapan Besar Masyarakat Kabupaten Pemalang

No	Harapan	Persentase
1.	Maju	29,44%
2.	Sejahtera	17,84%
3.	SDM berdaya saing	16,15%
4.	Pemerataan Pembangunan	12,02%
5.	Mandiri	6,90%
6.	Nyaman/Aman/Damai	4,46%
7.	Anti KKN	3,33%
8.	Berkelanjutan	3,15%
9.	Religius	1,83%
10.	Pelayanan publik Baik	1,78%

Sumber: Analisis Penyusun, 2023

Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner partisipasi masyarakat yang menghasilkan simpulan dari harapan masyarakat, serta memperhatikan visi dan misi RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah serta tujuan RTRW dan KLHS RPJPD, maka kerangka logis perumusan visi Kabupaten Pemalang dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:



Gambar IV.1.

Kerangka Logis Perumusan Visi Kabupaten Pemalang 2025-2045

Sementara itu, tujuan RTRW disebutkan bahwa tujuan RTRW Kabupaten Pemalang adalah mewujudkan ruang daerah yang berbasis pertanian yang didukung oleh sektor perdagangan dan industri dalam sistem wilayah terpadu dan berkelanjutan. Berdasarkan kerangka berpikir pembangunan jangka panjang yang tergambar dalam *logframe* di atas dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan daerah periode sebelumnya, potensi daerah, permasalahan pembangunan daerah, isu dan tantangan global serta harapan masyarakat berdasarkan hasil penjarangan aspirasi dan tujuan RTRW, ditetapkan visi pembangunan jangka Panjang daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045 yaitu:

**“PEMALANG MULYA
(MAJU, UNGGUL, LESTARI DAN BERBUDAYA)”**

Penjelasan visi Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045 sebagai berikut:

a. MAJU

Kemajuan suatu daerah atau masyarakat diartikan mempunyai kualitas dan kemampuan untuk berprestasi dan berdaya saing, berperadaban, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Kabupaten yang maju diartikan sebagai daerah yang berhasil mencapai tujuan pembangunan dilihat dari tingkat ekonomi, kemajuan teknologi, keamanan dan menjadi tempat yang ideal bagi masyarakatnya untuk hidup serta pelayanan fasilitas publik yang baik, pelayanan pendidikan serta fasilitas kesehatan yang sudah sangat memadai.

Diharapkan pada tahun 2045, Kabupaten Pemalang akan menjadi wilayah yang maju dimana hal ini akan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang meningkat dengan pemanfaatan teknologi dan penguatan inovasi.

b. UNGGUL

Masyarakat Kabupaten Pemalang yang memiliki kemampuan dalam berinovasi dan berkreasi untuk menghasilkan karya nyata yang bermanfaat dan berdaya saing tinggi, visioner serta memiliki pemikiran maju, optimistis, didukung semangat belajar dan berprestasi yang tinggi. Diharapkan pada tahun 2045, Kabupaten Pemalang akan menjadi wilayah yang unggul dimana hal ini akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan.

c. LESTARI

Dengan semakin menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan saat ini, sedangkan di sisi lain tuntutan pembangunan ekonomi yang semakin meningkat, maka menjadi penting untuk membangun daerah Jawa Tengah dengan terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Perwujudan Kabupaten yang lestari merupakan komitmen untuk mendorong implementasi pembangunan berkelanjutan dan mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab dengan keunggulan dari sisi komoditas pertanian dan perkebunan, potensi pariwisata, produk UMKM hingga inovasi. Prinsip yang ada berupa apa yang saat ini dinikmati oleh generasi sekarang akan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.

Dalam perwujudan pokok visi ini, Kabupaten Pemalang berkontribusi nyata pada target nasional untuk menarik investasi berkualitas ramah lingkungan, ramah sosial untuk meningkatkan daya saing daerah, membuka lapangan pekerjaan dan peluang usaha baru, serta mencegah resiko kebencanaan dan krisis iklim.

Selain itu, beberapa upaya lain untuk mewujudkan Pemalang yang lestari adalah dengan bergotong royong dengan para pihak lintas sektor dan lintas latar belakang untuk mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab ekosistem penting yang ada di Kabupaten Pemalang. Diharapkan pada tahun 2045, Kabupaten Pemalang akan menjadi wilayah yang lestari dimana hal ini akan fokus pada pembangunan berwawasan lingkungan.

d. BERBUDAYA

Masyarakat Kabupaten Pemalang di tahun 2045 diharapkan merupakan Masyarakat yang berbudaya. Makna dari Masyarakat berbudaya antara lain, Masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong, tata kelola pemerintahan yang baik, bertindak terpuji, tidak melakukan kerusakan serta memegang teguh nilai-nilai agama, tradisi, kearifan dan budaya lokal.

Diharapkan pada tahun 2045, Kabupaten Pemalang akan menjadi Kabupaten yang berbudaya dimana hal ini akan fokus pada pengembangan budaya, agama dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Masing-masing pokok visi memiliki indikatornya masing-masing yang dapat diukur keberhasilannya. Visi Pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045 merupakan perwujudan pencapaian cita-cita dan harapan Masyarakat Kabupaten Pemalang. Pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis pemerataan infrastruktur dan SDM yang Unggul serta pemantapan stabilitas ekonomi agro industri serta agro bisnis berbasis pengembangan Kawasan yang inovatif dan produktif menjadi *core* bisnis Kabupaten Pemalang di tahun 2025-2045.

Ketercapaian Visi Kabupaten Pemalang dilihat dari sudut pandang Penataan Ruang, Daya Dukung dan Daya Tampung Spasial. Rekomendasi yang dapat diberikan sebagai data dukung perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang adalah Pengembangan Berbasis pada Pertanian (Agropolitan dan Minapolitan) dengan didukung oleh kegiatan hilirisasi pertanian baik Agroindustri maupun Agribisnis. Dengan melihat permasalahan, isu strategis, serta harapan Masyarakat maka dapat digambarkan keterkaitan pokok visi dengan sasaran visi Kabupaten Pemalang sebagai berikut:



Gambar IV.2.

Keterkaitan Pokok Visi dan Sasaran Visi Kabupaten Pemalang

Dalam rangka mendukung Visi Indonesia Emas 2045: Mewujudkan Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan serta konsep arah pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2045 yaitu "Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Mandiri, Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan" dan sinergitas visi jangka panjang, maka dalam perumusan visi disertai sasaran visi dan indikator sasaran visi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

Tabel IV.2.
Sasaran Visi RPJPD, Indikator dan Target RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045

POKOK VISI	SASARAN VISI	INDIKATOR	Baseline (Proyeksi) Tahun 2025	TARGET			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
MAJU (Ekonomi)	Peningkatan Pendapatan Per Kapita	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	21.708.518	22.686.188	23.970.424	25.327.359	27.057.455
		Kontribusi PDRB sektor Industri (%)	22,68	23,29	24,09	24,90	25,92
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian (%)	2	2	2,5	1	1
UNGGUL (SDM dan Kesejahteraan)	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	69,75	71,78	74,21	76,53	79,41
	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	14,32	13,01	11,36	9,72	7,50
LESTARI (Infrastruktur dan Lingkungan)	Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission	Penurunan Intentinas Emisi GRK (%)	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
BERBUDAYA (Budaya dan Tata Kelola)	Peningkatan Nilai Budaya, Agama dan Tata Kelola	Indeks Kebudayaan Daerah	57	59,36	59,86	60,36	60,96
		Indeks Kerukunan Umat Beragama	70,88-74,90	74,95-74,97	75,05-75,07	76,05-76,07	77,07-77,09
		Indeks Inovasi Daerah	43,36	49,36	56,86	64,36	73,36

Sumber: Analisis Penyusun, 2023

4.2 Misi Pemalang

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Dengan landasan berpikir, harapan masyarakat serta mempertimbangkan berbagai pencapaian pembangunan daerah periode sebelumnya, potensi daerah, permasalahan pembangunan daerah, isu dan tantangan global, ditetapkan pembangunan daerah Kabupaten Pemalang 2025-2045 diarahkan pada cita-cita Pemalang Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Cita-cita ini menjadi visi pembangunan Kabupaten Pemalang

2025-2045 yang dituangkan dalam RPJPD Tahun 2025-2045 dan penuangannya ke dalam misi pembangunan jangka panjang yang digambarkan dalam *logical frame* pembangunan Kabupaten Pemalang 2025-2045. Setiap visi dijabarkan ke dalam 6 misi yang mengandung makna landasan transformasi dan pengarusutamaan transformasi. Masing-masing misi diterjemahkan ke dalam 15 arah pembangunan. Keterkaitan antara visi, misi dan arah pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar IV.3.

Logical Framework Pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045

Logical framework pembangunan Kabupaten Pemalang tersebut menggambarkan bahwa cita-cita Pemalang 2045 adalah Kabupaten Pemalang Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Pencapaian cita-cita pembangunan Kabupaten Pemalang ini tercermin dari kualitas hidup masyarakat yang semakin baik dan terjamin, serta dari terpenuhinya semua kebutuhan layanan dasar masyarakat

Perwujudan cita-cita pembangunan Kabupaten Pemalang dua puluh tahun kedepan ditopang dengan empat landasan transformasi sebagai kekuatan pembangunan daerah. Empat landasan tersebut meliputi transformasi ekonomi dan transformasi sosial yang didukung dengan infrastruktur yang berkualitas, merata dan berkelanjutan serta ketahanan sumber daya alam dan lingkungan. Dalam rangka mewujudkan semua kondisi tersebut diperkuat dengan kerangka pengarusutamaan transformasi meliputi ketahanan budaya dan transformasi tata

kelola pemerintahan yang tergambar dari individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat yang memiliki karakter budaya, agama serta memegang erat tradisi.

Berdasarkan visi jangka panjang Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan yaitu “PEMALANG MULYA (MAJU, UNGGUL, LESTARI DAN BERBUDAYA)” yang dijabarkan ke dalam masing-masing pokok visi serta berkaitan dengan kondisi akhir Kabupaten Pemalang yang diharapkan hingga tahun 2045 sebagai suatu visi pembangunan, maka dalam rangka perwujudannya maka ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Transformasi Ekonomi

Misi Transformasi Ekonomi dalam perencanaan jangka panjang Kabupaten Pemalang yaitu transformasi ekonomi yang merupakan proses sektor-sektor yang memiliki produktivitas rendah ke sektor-sektor yang lebih tinggi produktivitasnya.

Transformasi ekonomi merupakan suatu keniscayaan Kabupaten Pemalang untuk menuju Indonesia Emas 2045 ditengah kondisi global yang tengah mengalami ketidakpastian akibat kompetisi yang semakin tajam. Untuk memperkokoh hal tersebut menjadikan pentingnya transformasi ekonomi, untuk menjaga momentum positif guna dapat terus meningkatkan kemakmuran masyarakat Kabupaten Pemalang. Transformasi ekonomi merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi serta penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan pembangunan.

Transformasi ekonomi yang menjadi misi jangka panjang Kabupaten Pemalang 2025-2045 diharapkan dapat menggeser struktur ekonomi yang semula berbasis komoditas, menjadi ekonomi berbasis investasi, produksi, dan pelayanan yang memiliki nilai tambah tinggi. Hal ini dapat meningkatkan daya saing perekonomian dan kualitas hidup masyarakat Pemalang pada 2045.

2. Transformasi Sosial

Misi Transformasi Sosial pada perencanaan jangka panjang Kabupaten Pemalang diwujudkan melalui kesejahteraan masyarakat dengan terjaminnya hak dan kesempatan sama untuk meningkatkan kualitas hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan dan sosial, memiliki kesetaraan gender, serta terlayani kebutuhan dasar yang lain. Selain itu, misi ini juga menjamin masyarakat Kabupaten Pemalang memperoleh perlindungan keamanan, ketentraman, dan ketertiban. Masyarakat sejahtera dengan indeks pembangunan manusia yang unggul tercermin dari masyarakat yang berkehidupan religius dan bermoral tinggi, rukun, harmonis, berbudaya, berkesenian, dan berolahraga.

Aspek lain yang difokuskan dalam misi ini adalah penurunan angka kemiskinan yang berorientasi pada kemajuan ekonomi kerakyatan, mendorong tumbuh dan berkembangnya pelaku-pelaku ekonomi lokal berbasis komoditi unggulan lokal di samping kemajuan ekonomi skala besar berbasis potensi unggulan lokal. Seluruh upaya perwujudan misi transformasi sosial diharapkan berkontribusi menyediakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat guna menurunkan angka pengangguran dan menekan angka kemiskinan.

3. Infrastruktur yang Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan

Percepatan pembangunan jangka panjang Kabupaten Pemalang melalui misi ini salah satunya dilakukan melalui percepatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, merata dan berkelanjutan. Hal ini memiliki peran strategis Kabupaten Pemalang yang memiliki andil dalam menjadikan Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045.

Misi ini bermakna terbangunnya infrastruktur yang andal dan berkualitas merupakan kunci utama untuk penguatan daya saing suatu daerah. Perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang dan terpadu dari berbagai sektor demi menciptakan kawasan yang tidak hanya terbangun, melainkan juga terintegrasi sehingga mampu berkembang dan memberi manfaat yang maksimal kepada masyarakat. Untuk menjamin keberhasilan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, pemerintah daerah harus melakukan peningkatan keterpaduan rencana dan program berbasis pendekatan wilayah. Pengembangan infrastruktur harus mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah dan kapasitas daya dukung lingkungan melalui kajian lingkungan hidup strategis.

Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi, yaitu keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja.

Pembangunan infrastruktur dilakukan dengan harapan sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan, sekaligus bentuk investasi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing yang dapat menunjang ketercapaian visi pembangunan jangka panjang khususnya dalam pokok visi menuju Pemalang “Lestari”.

4. Ketahanan SDA, Lingkungan Hidup dan Bencana

Dalam perwujudan misi ketahanan SDA, lingkungan dan bencana memiliki makna penciptaan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Pemalang dengan tetap berpegang pada kelestarian lingkungan hidup serta berkelanjutan.

Keseimbangan pendayagunaan sumber daya alam dan buatan agar tercapainya harmonisasi antara dua aspek kepentingan yaitu aspek kesejahteraan yang harus selaras dengan aspek Pertahanan Negara, sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam turut serta mengemban visi pertahanan demi menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.

Misi ini bertujuan untuk menciptakan kesiapsiagaan peran sumber daya alam dan sumber daya buatan dalam usaha pertahanan dan meningkatkan potensi serta kapasitas kekuatan pertahanan daerah. Dalam misi ini juga berfokus untuk mewujudkan target penurunan indeks risiko bencana dengan melibatkan multi stakeholder. Indeks Ketahanan Daerah menjadi rekomendasi dan kebijakan strategis untuk meningkatkan ketahanan daerah yang secara

langsung berdampak pada penurunan indeks risiko bencana di Kabupaten Pemalang.

5. Ketahanan Budaya

Dalam misi Ketahanan Budaya memiliki makna pemajuan kebudayaan yaitu upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Kabupaten Pemalang di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Ketahanan budaya adalah suatu proses perwujudan kesadaran kolektif yang tersusun dalam masyarakat untuk meneguhkan, menyerap, dan menyesuaikan berbagai pengaruh dari budaya lain melalui proses belajar kebudayaan, yaitu enkulturasi, sosialisasi, dan internalisasi yang disandarkan pada pengalaman sejarah yang sama. Untuk mencapai tujuan ini pemerintah bersama masyarakat harus memiliki kekuatan dan keteguhan dalam mempertahankan budaya lokal dari pengaruh budaya asing yang kemungkinan dapat merusak atau membahayakan berlangsungnya hidup sebagai bangsa.

Asas pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal yang digunakan antara lain toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong. Adapun tujuannya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri daerah dan bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melestarikan warisan budaya daerah khususnya di Kabupaten Pemalang.

6. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan

Transformasi Tata Kelola Pemerintahan merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik antara lain: akuntabilitas; pengawasan; daya tanggap; profesionalisme; efisien dan efektivitas; transparansi; kesetaraan; wawasan ke depan; partisipasi; dan penegakan hukum. Pelayanan prima melalui digitalisasi teknologi menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten Pemalang karena merupakan suatu dedikasi pemberian pelayanan secara profesional, sesuai kebutuhan, transparan, dan terukur dari segi waktu, serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dicapai pada tahun 2045.

Dalam mengintegrasikan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang, perumusan misi Kabupaten Pemalang memedomani misi nasional sesuai hasil penyelarasan dengan RPJPN Tahun 2025-2045 serta misi RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. Sandingan penyelarasan Misi Nasional, Provinsi dan Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.3.

Sandingan Misi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pemalang

Misi RPJPN 2025-2045	Misi RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045	Misi RPJPD Kabupaten Pemalang 2025-2045
Transformasi Sosial	Transformasi Sosial	Transformasi Sosial
Transformasi Ekonomi	Transformasi Ekonomi	Transformasi Ekonomi
Tranformasi Tata Kelola	Tranformasi Tata Kelola	Transformasi Tata Kelola Pemerintahan
Supremasi Hukum, Stabilitas dan Ketangguhan Diplomasi	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	-
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi,	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Ketahanan Budaya
Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Ketahanan SDA, Lingkungan Hidup dan Bencana
Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Infrastruktur yang Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan
Kesinambungan Pembangunan	Kesinambungan Pembangunan	-

Sumber: Analisis Penyusun, 2023

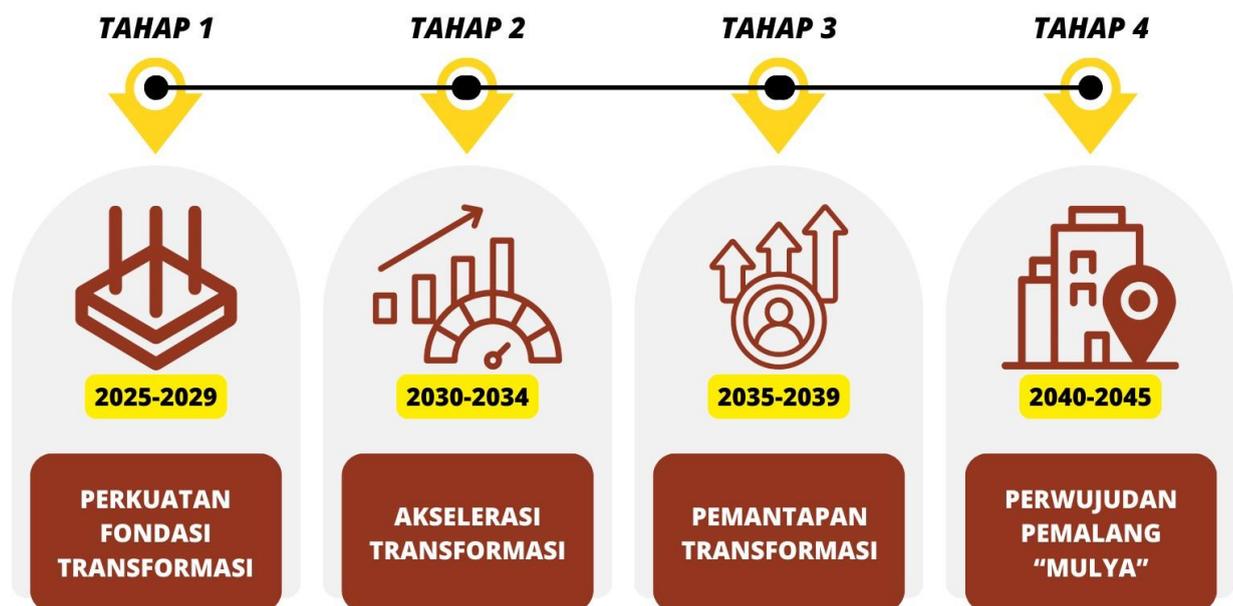
BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Dalam proses pencapaian visi dan misi jangka panjang memerlukan tema dan arah kebijakan sebagai petunjuk strategis setiap tahapan per lima tahun selama dua puluh tahun. Tema dan arah kebijakan dapat dijadikan arahan atau pedoman calon kepala daerah dalam merumuskan visi, misi, dan program politik. Tema dan arah kebijakan disusun menjadi tahapan-tahapan periode lima tahunan dan diterjemahkan ke dalam sasaran pokok serta indikator sebagai ukuran keberhasilan RPJPD 2025-2045 Kabupaten Pemalang.

Kabupaten Pemalang memiliki harapan dalam pembangunan jangka panjang untuk mencapai Kabupaten Pemalang Mulya pada tahun 2045. Pada akhir pembangunan jangka panjang, Kabupaten Pemalang menjadi daerah yang Maju, Unggul, Lestari, dan Berbudaya. Sehingga, dalam mewujudkan pembangunan jangka panjang tersebut, Kabupaten Pemalang membagi tahapan pembangunan dalam empat tema pembangunan.

Pentahapan tema pembangunan yang dilakukan Kabupaten Pemalang disusun secara terukur dan konsisten untuk mencapai Kabupaten Pemalang Mulya. Berikut merupakan penjabaran tema pembangunan jangka panjang yang dilaksanakan Kabupaten Pemalang.



Gambar V.1.
Tema Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pemalang

Tema pembangunan Kabupaten Pemalang dimulai dengan Perkuatan Fondasi Transformasi. Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Pemalang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif berbasis pemerataan dan infrastruktur.

Tahap kedua pembangunan di Kabupaten Pemalang menjadi langkah lanjutan pembangunan, yaitu Akselerasi Transformasi. Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada percepatan pembangunan dan kualitas

infrastruktur di Kabupaten Pemalang untuk mewujudkan SDM yang unggul dan ekonomi yang mandiri.

Tahap ketiga pembangunan Kabupaten Pemalang merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya, yaitu memastikan akselerasi transformasi dapat dilanjutkan dengan Pemantapan Transformasi. Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada pemantapan stabilitas ekonomi di Kabupaten Pemalang dengan memastikan berkembangnya infrastruktur pada kawasan produktif dan penguatan SDM yang inovatif.

Tahap akhir pembangunan jangka panjang Kabupaten Pemalang adalah mewujudkan **Pemalang “Mulya”** tercapai. Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada perwujudan masyarakat Kabupaten Pemalang yang sejahtera melalui terciptanya kemandirian ekonomi daerah, daya saing SDM, dan penguatan infrastruktur.

5.1. Arah Kebijakan Kabupaten Pemalang 2025-2045

Arah kebijakan menjadi panduan strategis yang mengarahkan suatu rencana pembangunan pada visi dan misi yang telah ditentukan. Kabupaten Pemalang memiliki visi pembangunan jangka panjang untuk menjadi wilayah yang maju, unggul, lestari, dan berbudaya. Arah kebijakan yang disusun berguna untuk menyelaraskan langkah pembangunan yang terbagi menjadi empat tahap periode pembangunan.

Arah kebijakan Kabupaten Pemalang dirumuskan untuk mencapai misi-misi yang mengarah pada transformasi pembangunan secara menyeluruh. Dengan memperhatikan berbagai aspek yang dapat mempengaruhi pembangunan, keberhasilan pembangunan jangka panjang memiliki arah pembangunan yang disesuaikan dengan misi Kabupaten Pemalang. Transformasi menuju Kabupaten Pemalang Mulya terbagi menjadi lima belas arah pembangunan sebagai berikut.

Transformasi Menuju Kabupaten Pemalang Mulya

Dalam upaya mencapai visi dan misi jangka panjang, Kabupaten Pemalang harus mengubah pendekatan yang telah digunakan pada periode pembangunan sebelumnya. Untuk mendukung tercapainya Kabupaten Pemalang yang Maju, Unggul, Lestari, dan Berbudaya, diperlukan transformasi secara menyeluruh di berbagai bidang pembangunan.

Transformasi Menuju Kabupaten Pemalang Mulya 2045

ARAH PEMBANGUNAN



Transformasi Ekonomi

- PM.1** IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
- PM.2** Penerapan Ekonomi Hijau
- PM.3** Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
- PM.4** Stabilitas Ekonomi Makro



Transformasi Sosial

- PM.5** Kesehatan untuk Semua
- PM.6** Pendidikan Berkualitas yang Merata
- PM.7** Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
- PM.8** Perlindungan Sosial yang Adaptif



Transformasi Tata Kelola Pemerintahan

- PM.15** Regulasi dan Tata Kelola Berintegrasi dan Adaptif

Keberhasilan transformasi secara menyeluruh perlu didukung oleh landasan transformasi sebagai faktor pemampu.

Landasan Transformasi Menuju Kabupaten Pemalang Mulya 2045

ARAH PEMBANGUNAN



Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan

- PM.9** Transformasi Digital
- PM.10** Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi



Ketahanan SDA, Lingkungan, dan Bencana

- PM.11** Lingkungan Hidup yang Berkualitas
- PM.12** Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian
- PM.13** Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim



Ketahanan Budaya

- PM.14** Beragama Maslahat dan Berkebudayaan

Gambar V.2.

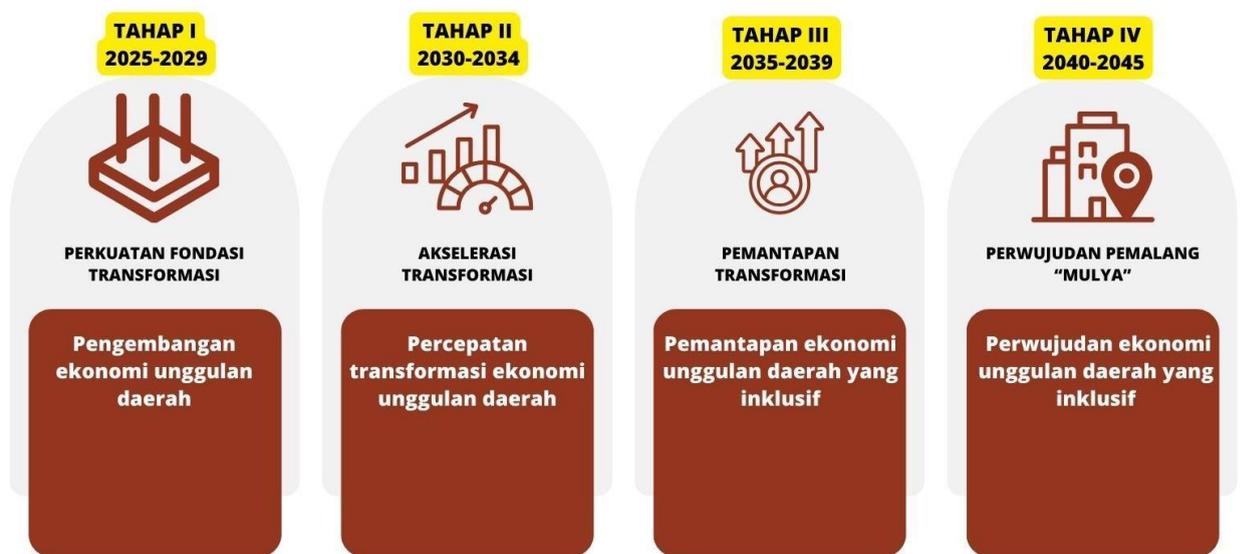
Transformasi Kabupaten Pemalang Mulya 2045

Untuk mencapai visi Pemalang Mulya 2045, Kabupaten Pemalang memerlukan transformasi untuk mencapai arah pembangunan di masa yang akan datang. Keberhasilan transformasi secara menyeluruh memerlukan dukungan landasan transformasi sebagai faktor pemampu. Transformasi yang terdiri dari transformasi ekonomi, transformasi sosial, serta transformasi tata kelola pemerintahan yang didukung oleh landasan transformasi berupa infrastruktur yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan; ketahanan SDA, lingkungan, dan bencana; serta ketahanan budaya. Arah kebijakan untuk mendukung transformasi dalam mencapai visi Pemalang Mulya dijabarkan pada penjelasan berikut.

5.1.1. Transformasi Ekonomi

Transformasi ekonomi merupakan suatu proses untuk mencapai pertumbuhan pada bidang ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi diupayakan melalui kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah dapat memberikan perubahan yang fundamental dalam struktur perekonomian suatu daerah.

Kabupaten Pemalang mengupayakan adanya transformasi ekonomi dalam pencapaian visi jangka panjang. Transformasi ekonomi pada Kabupaten Pemalang dapat diupayakan melalui pemanfaatan IPTEK, digitalisasi, serta penerapan ekonomi hijau. Dalam mewujudkan transformasi ekonomi Kabupaten Pemalang, disusun arah kebijakan sebagai berikut.



Gambar V.5.

Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Kabupaten Pemalang

A. Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)

Pada tahap pertama, transformasi ekonomi di Kabupaten Pemalang diarahkan pada **"Pengembangan ekonomi unggulan daerah"**. Pemerintah Kabupaten Pemalang dapat melakukan analisis terhadap sektor ekonomi unggulan dan potensial di Kabupaten Pemalang. Selain itu, adanya inovasi pada bidang-bidang tertentu dapat meningkatkan produktivitas ekonomi di Kabupaten Pemalang.

B. Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)

Pada tahap kedua, transformasi ekonomi di Kabupaten Pemalang diarahkan pada **"Percepatan transformasi ekonomi unggulan daerah"**. Tahap ini merupakan tahap lanjutan dalam transformasi ekonomi dengan memperhatikan perkembangan infrastruktur daerah. Tersedianya akses distribusi yang memadai dapat membantu pertumbuhan ekonomi unggulan di Kabupaten Pemalang. Penerapan ekonomi hijau yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan memberikan nilai tambah pada aspek perekonomian daerah.

C. Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)

Pada tahap ketiga, transformasi ekonomi di Kabupaten Pemalang diarahkan pada **“Pemantapan ekonomi unggulan daerah yang inklusif”**. Pertumbuhan ekonomi unggulan daerah pada tahap ini dapat didorong dengan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi sehingga dapat menciptakan kestabilan perekonomian daerah. Pada tahap ini, perekonomian unggulan di Kabupaten Pemalang dapat memberikan manfaat yang menyeluruh bagi masyarakat digambarkan melalui pemerataan pendapatan serta terbukanya peluang untuk meningkatkan perekonomian daerah.

D. Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)

Pada tahap akhir pembangunan jangka panjang, transformasi ekonomi diarahkan pada **“Perwujudan ekonomi unggulan daerah yang inklusif”**. Transformasi ekonomi di Kabupaten Pemalang ditandai dengan meningkatnya nilai tambah sektor ekonomi unggulan daerah. Hal ini diupayakan melalui pengintegrasian ekonomi daerah dan nasional serta terciptanya stabilitas ekonomi makro. Peningkatan terhadap nilai tambah sektor ekonomi Kabupaten Pemalang dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonominya.

5.1.2. Transformasi Sosial

Transformasi sosial merupakan upaya suatu daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui transformasi sosial diharapkan dapat tercipta kehidupan masyarakat yang lebih baik, adil, sejahtera, dan kohesif. Dalam transformasi sosial, aspek yang diperhatikan adalah manusia sehingga diupayakan adanya pemenuhan terhadap pelayanan dasar masyarakat serta pengembangan modal manusia dan sosial budaya.

Dalam mewujudkan transformasi sosial di Kabupaten Pemalang, disusun arah kebijakan sebagai berikut.



Gambar V.3.

Arah Kebijakan Transformasi Sosial Kabupaten Pemalang

A. Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)

Pada tahap pertama, transformasi sosial Kabupaten Pemalang diarahkan pada **“Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang**

berdaya saing” dan “Pemenuhan kehidupan masyarakat yang layak dan berkualitas”. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemenuhan kehidupan masyarakat yang layak dilakukan melalui pemenuhan pelayanan dasar, seperti pada bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Program peningkatan kualitas SDM menjadi tujuan pertama yang harus diperhatikan oleh Kabupaten Pemalang. Sumber daya manusia yang berkualitas memiliki inovasi yang dapat membantu meningkatkan kemajuan dan produktivitas daerah, terlebih pada aspek pertumbuhan ekonomi. Aspek yang diperhatikan pada tahap ini adalah kesehatan, pendidikan, serta perlindungan sosial untuk menciptakan masyarakat yang sehat, cerdas dan terpelajar, serta terlindungi dan sejahtera.



Gambar V.4.

Transformasi Sosial Menciptakan Masyarakat Kabupaten Pemalang yang Berdaya Saing

B. Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)

Pada tahap kedua, transformasi sosial Kabupaten Pemalang diarahkan pada **“Percepatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing” dan “Percepatan kehidupan masyarakat yang layak dan berkualitas”.** Tahap ini menjadi tahapan lanjutan pada pembangunan transformasi sosial yang berfokus pada percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kehidupan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur.

Pada aspek kesehatan, kebijakan dapat diarahkan pada peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Penambahan sarana dan prasarana kesehatan dapat dilakukan untuk memenuhi pemerataan fasilitas kesehatan untuk semua. Pada aspek pendidikan, dapat dilakukan penguatan pembelajaran berbasis digital dan pemerataan akses serta sarana prasarana pendidikan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pendidikan dapat diakses dan diterima oleh siapapun di Kabupaten Pemalang. Selain itu, peningkatan daya saing masyarakat dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan mengenai keterampilan.

C. Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)

Pada tahap ketiga, transformasi sosial Kabupaten Pemalang diarahkan pada **“Pemantapan sumber daya manusia Kabupaten Pemalang yang berdaya saing” dan “Pemantapan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan”.** Tahap ini memiliki fokus untuk mengembangkan ekonomi daerah melalui sumber daya manusia yang

berdaya saing sehingga dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera. Peningkatan sumber daya manusia yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan diharapkan dapat meningkatkan inovasi dan produktivitas masyarakat. Masyarakat yang produktif dapat membantu roda perekonomian daerah sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pemalang. Sehingga, kehidupan masyarakat menjadi lebih layak, sejahtera, dan berkeadilan.

D. Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)

Pada tahap akhir pembangunan, transformasi sosial Kabupaten Pemalang diarahkan pada **“Perwujudan sumber daya manusia Kabupaten Pemalang yang berdaya saing”** dan **“Perwujudan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan”**. Keberhasilan pada tahap ini dapat dilihat melalui keterwujudan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia serta kompetensi tenaga kerja di Kabupaten Pemalang. Masyarakat yang berdaya saing mampu memiliki inovasi dan mendorong diri mereka untuk produktif sehingga memiliki kompetensi. Peningkatan daya saing masyarakat akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan taraf hidup ekonomi masyarakat di Kabupaten Pemalang.

5.1.3. Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan

Infrastruktur menjadi hal yang penting dalam memajukan suatu wilayah. Adanya infrastruktur memberikan kemudahan akses yang dapat memajukan perekonomian suatu wilayah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat pada suatu wilayah. Kabupaten Pemalang mengupayakan peningkatan infrastruktur yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Pemalang. Dalam mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan di Kabupaten Pemalang, disusun arah kebijakan sebagai berikut.



Gambar V.6.

Arah Kebijakan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan Kabupaten Pemalang

A. Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)

Pada tahap pertama, dalam mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan di Kabupaten Pemalang diarahkan pada **“Pemenuhan infrastruktur pembangunan yang merata dan memadai”**. Infrastruktur yang memadai dapat membantu pergerakan masyarakat di Kabupaten Pemalang. Hal ini didukung dengan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah yang tepat.

B. Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)

Pada tahap kedua, dalam mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan di Kabupaten Pemalang diarahkan pada **“Percepatan peningkatan kapasitas infrastruktur pembangunan yang merata dan memadai”**. Peningkatan kapasitas infrastruktur dilakukan untuk mendukung konektivitas antar wilayah di Kabupaten Pemalang. Konektivitas antar wilayah dapat mendorong produktivitas masyarakat dalam berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya secara efisien.

C. Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)

Pada tahap ketiga, dalam mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan di Kabupaten Pemalang diarahkan pada **“Pemantapan infrastruktur pembangunan yang merata dan memadai”**. Pembangunan infrastruktur yang merata dan memadai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pemalang. Pembangunan kawasan potensial dan strategis pada suatu wilayah didukung dengan konektivitas dan sarana prasarana akan mempengaruhi aspek ekonomi. Selain itu, wilayah-wilayah layak huni dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pemalang.

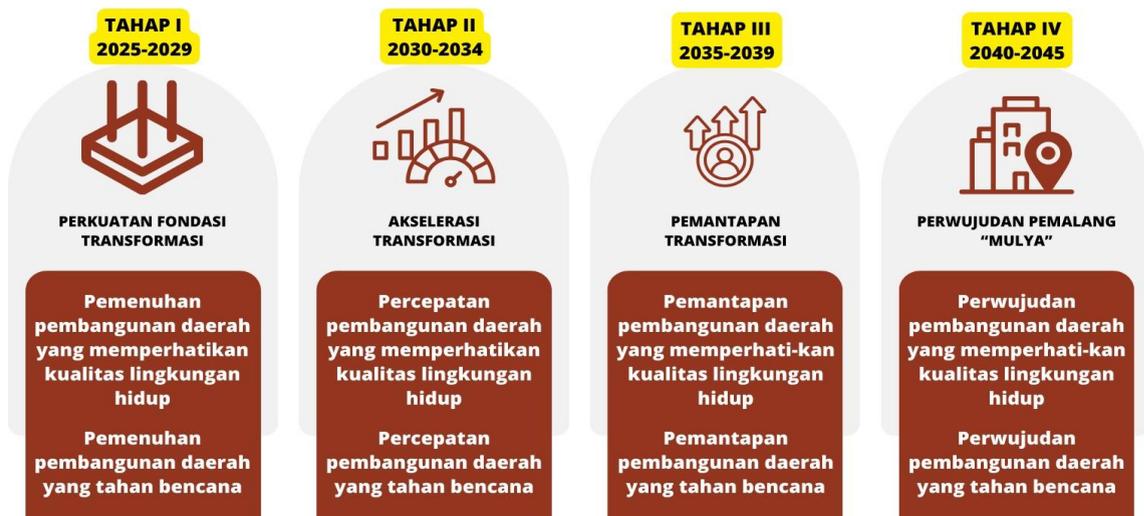
D. Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)

Pada tahap akhir pembangunan jangka panjang, dalam mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan di Kabupaten Pemalang diarahkan pada **“Perwujudan infrastruktur pembangunan yang merata dan memadai”**. Perwujudan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pemalang yang merata dan memadai dapat dilihat melalui kualitas konektivitas dan sarana prasarana yang memberikan kepuasan atas pelayanan yang diberikan.

5.1.4. Ketahanan SDA, Lingkungan Hidup, dan Bencana

Ketahanan lingkungan hidup sangat diperlukan untuk keberlangsungan pembangunan jangka panjang suatu daerah. Pengendalian terhadap sumber daya alam, lingkungan hidup, serta pengelolaan bencana alam dapat dilakukan untuk mengupayakan peningkatan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pada Kabupaten Pemalang, pengendalian terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas memperhatikan ketahanan energi serta air di wilayah tersebut. Selain itu, pengendalian terhadap bencana alam juga memperhatikan perubahan iklim yang dapat mempengaruhi Kabupaten Pemalang. Dalam mewujudkan ketahanan

SDA, lingkungan hidup, dan bencana di Kabupaten Pemalang, disusun arah kebijakan sebagai berikut.



Gambar V.7.

Arah Kebijakan Ketahanan SDA, Lingkungan Hidup, dan Bencana Kabupaten Pemalang

A. Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)

Pada tahap pertama, dalam mewujudkan ketahanan SDA, lingkungan hidup, dan bencana di Kabupaten Pemalang diarahkan pada **“Pemenuhan pembangunan daerah yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup”** dan **“Pemenuhan pembangunan daerah yang tahan bencana”**. Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Pemalang memperhatikan aspek-aspek lingkungan dengan upaya melestarikan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan melakukan upaya mengurangi risiko bencana. Peningkatan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan perubahan perilaku masyarakat menuju gaya hidup yang berkelanjutan. Selain itu, penanggulangan bencana didasarkan pada karakteristik daerah Kabupaten Pemalang sehingga dapat menyusun program mitigasi bencana.

B. Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)

Pada tahap kedua, dalam mewujudkan ketahanan SDA, lingkungan hidup, dan bencana di Kabupaten Pemalang diarahkan pada **“Percepatan pembangunan daerah yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup”** dan **“Percepatan pembangunan daerah yang tahan bencana”**. Dalam memperhatikan kualitas lingkungan hidup, diperlukan peningkatan dalam pengelolaan limbah yang terintegrasi. Selain itu, pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang memperhatikan kerawanan bencana dan perubahan iklim.

C. Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)

Pada tahap ketiga, dalam mewujudkan ketahanan SDA, lingkungan hidup, dan bencana di Kabupaten Pemalang diarahkan pada **“Pemantapan pembangunan daerah yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup”** dan **“Pemantapan pembangunan daerah yang tahan bencana”**. Lingkungan hidup yang berkualitas memiliki potensi berkelanjutan dapat membantu meningkatkan produktivitas dan

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, diperlukan pembangunan yang berketahanan dari bencana dan perubahan iklim untuk menekan potensi kerugian ekonomi.

D. Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)

Pada tahap akhir pembangunan jangka panjang, dalam mewujudkan ketahanan SDA, lingkungan hidup, dan bencana di Kabupaten Pemalang diarahkan pada **“Perwujudan pembangunan daerah yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup”** dan **“Perwujudan pembangunan daerah yang tahan bencana”**. Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Pemalang memiliki peningkatan untuk dapat menyokong kegiatan masyarakat. Adanya program-program mitigasi bencana memberikan peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana di Kabupaten Pemalang.

5.1.5. Ketahanan Budaya

Kemajuan dan kelestarian budaya dapat membantu memperkuat karakter masyarakat. Kebudayaan berperan dalam memperkuat jati diri masyarakat pada suatu daerah. Sehingga, hal ini dapat mempengaruhi peningkatan kesejahteraan, peran, dan posisi masyarakat dalam mengembangkan karakter suatu daerah. Dalam mewujudkan ketahanan budaya di Kabupaten Pemalang, disusun arah kebijakan sebagai berikut.



Gambar V.8.

Arah Kebijakan Misi Ketahanan Budaya Kabupaten Pemalang

A. Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)

Pada tahap pertama, dalam mewujudkan ketahanan budaya di Kabupaten Pemalang diarahkan pada **“Penguatan ketahanan budaya sebagai landasan dan modal dasar pembangunan”**. Masyarakat di Kabupaten Pemalang memiliki pendidikan karakter dan tradisi kebudayaan yang ditanamkan sejak dini sebagai landasan spiritual, beretika, dan moral sebagai modal dasar dalam pembangunan.

B. Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)

Pada tahap kedua, dalam mewujudkan ketahanan budaya di Kabupaten Pemalang diarahkan pada **“Percepatan ketahanan budaya sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan**

inklusif". Untuk mempercepat ketahanan budaya di Kabupaten Pemalang dapat dilakukan penguatan terhadap ketahanan keluarga serta penguatan pendidikan karakter yang ditanamkan sejak dini. Adanya pembangunan kehidupan beragama yang inklusif dan rukun sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang penuh toleransi sehingga mendorong pembangunan sosial dan ekonomi yang setara pada setiap lapisan masyarakat.

C. Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)

Pada tahap ketiga, dalam mewujudkan ketahanan budaya di Kabupaten Pemalang diarahkan pada “Pemantapan perwujudan masyarakat dalam menghadapi berbagai dinamika budaya asing yang **negatif**”. Dalam memperkuat masyarakat untuk menghadapi masuknya budaya asing diperlukan penguatan terhadap pendidikan karakter dan pemantapan tradisi kebudayaan di Kabupaten Pemalang. Hal ini dilakukan untuk melestarikan kebudayaan sebagai jati diri masyarakat dalam menghadapi perubahan dan masuknya budaya asing yang sangat cepat.

D. Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)

Pada tahap akhir pembangunan jangka panjang, dalam mewujudkan ketahanan budaya di Kabupaten Pemalang diarahkan pada “Perwujudan masyarakat Kabupaten Pemalang yang memiliki **ketahanan budaya**”. Pemajuan dan pelestarian budaya dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memantapkan peran masyarakat Kabupaten Pemalang dalam mempengaruhi perubahan. Hal ini dapat dilihat melalui kemajuan kebudayaan pada suatu daerah.

5.1.6. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan

Transformasi tata kelola pemerintahan memungkinkan adanya pengelolaan sektor pemerintahan dan publik menjadi lebih efektif dan efisien. Transformasi ini memungkinkan tata kelola pemerintahan menjadi lebih akuntabel yang didasarkan atas pertukaran informasi yang lebih terbuka dan transparan. Adanya tata kelola pemerintahan yang baik mendorong pelayanan terhadap publik yang lebih optimal dan munculnya regulasi yang adaptif. Dalam mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pemalang, disusun arah kebijakan sebagai berikut



Gambar V.9.
Arah Kebijakan Misi Transformasi Tata Kelola Pemerintahan
Kabupaten Pemalang

A. Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)

Pada tahap pertama, dalam mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan diarahkan pada **“Pemenuhan pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pelayanan”**. Pelayanan terhadap publik yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam mewujudkan pemenuhan pemerintahan yang adaptif dan inovatif dibutuhkan sumber daya yang cakap dan profesional untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat.

B. Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)

Pada tahap kedua, dalam mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan diarahkan pada **“Percepatan implementasi kinerja pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pelayanan”**. Implementasi tata kelola pemerintahan yang berbasis pelayanan dapat ditingkatkan dengan adanya peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan melalui pengembangan kelembagaan dan pelayanan berbasis teknologi dan digitalisasi.

C. Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)

Pada tahap ketiga, dalam mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan diarahkan pada **“Pemantapan tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pelayanan”**. Adanya penyederhanaan regulasi dapat membantu memantapkan perwujudan proses bisnis yang kolaboratif dan terintegrasi. Kemudahan regulasi dan pelayanan terhadap pelaku bisnis dapat meningkatkan stabilitas perekonomian daerah di Kabupaten Pemalang.

D. Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)

Pada tahap akhir pembangunan jangka panjang, dalam mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan diarahkan pada **“Perwujudan tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pelayanan”**. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pelayanan dibutuhkan peran serta berbagai pihak agar tercapai kesinambungan transformasi tata kelola. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dapat meningkatkan partisipasi serta kepercayaan masyarakat sipil. Hal ini dilihat melalui peningkatan birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

5.2. Sasaran Pokok Kabupaten Pemalang 2025-2045

Sasaran Pokok adalah gambaran rincian kinerja daerah yang menggambarkan pencapaian pembangunan sebagai upaya perwujudan visi daerah. Sasaran pokok merupakan kinerja yang merefleksikan aspek kesejahteraan, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum pada setiap tahapan dengan menggunakan indikator-indikator yang bersifat progresif. Sasaran pokok 5 (lima) tahunan (per periode RPJMD) merupakan target berdasarkan arah kebijakan pembangunan pada

setiap periode lima tahunan yang ditentukan berdasarkan pentahapan pembangunan.

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator pada level impact dan bersifat progresif.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 ditetapkan 6 (enam) sasaran pokok. Pencapaian sasaran pokok diukur dengan indikator kinerja yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2045. Sasaran pokok dan indikator kinerjanya dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1. Sasaran Pokok 1. Terwujudnya Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Daerah

Perwujudan sasaran pokok tersebut dilakukan secara bertahap dengan proses secara menerus untuk mendorong sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas rendah menjadi sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi, dan juga dilakukan dengan menggerakkan sumber daya manusia agar lebih produktif dan inovatif agar mampu menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah dan bersaing di pasar global. Upaya yang dilakukan fokus pada peningkatan produktivitas di sektor-sektor unggulan daerah yang dilakukan dengan mendorong hilirisasi didukung dengan digitalisasi ekonomi, serta berbasis pada riset dan inovasi. Selain itu juga didorong untuk pengembangan ekonomi kreatif dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Untuk memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi sampai ke generasi berikutnya, maka diterapkan pembangunan ekonomi hijau. Penerapan ekonomi hijau akan menjamin ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki dengan tetap dapat dimanfaatkan secara ekonomi. Upaya perwujudan perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan dengan produktivitas yang semakin meningkat dan menerapkan prinsip ekonomi hijau, diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang semakin merata. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan difokuskan pada empat arah pembangunan beserta arah kebijakan meliputi sebagai berikut.

PM 1. IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Salah satu upaya perwujudan perekonomian yang berdaya saing adalah meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan daerah Kabupaten Pemalang dan memberikan nilai tambah produksi agar mampu lebih bersaing di pasar global maupun nasional. Peningkatan produktivitas salah satunya dengan mendorong hilirisasi produk berbasis riset, teknologi, dan inovasi, serta didukung dengan digitalisasi ekonomi yang memadai dan terjangkau.

Pertanian

Sektor pertanian (dalam arti luas) menjadi salah satu sektor unggulan daerah Kabupaten Pemalang yang sampai dua puluh tahun ke depan masih akan menjadi unggulan untuk menopang perekonomian Kabupaten Pemalang. Kondisi saat ini, sektor pertanian masih fokus pada sisi produksi yang belum optimal memberikan nilai tambah produk pertanian dan peningkatan kesejahteraan. Untuk itu ke depan peningkatan produktivitas sektor pertanian terutama hilirisasi sektor pertanian menjadi salah satu kebijakan penting untuk transformasi ekonomi Kabupaten Pemalang. Kebijakan ini diharapkan juga akan berdampak pada kesejahteraan pelaku sektor pertanian terutama petani/nelayan. Kebijakan jangka panjang dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah, serta peningkatan kesejahteraan pelaku usaha sektor pertanian diarahkan antara lain melalui: 1) modernisasi dalam pembangunan sektor pertanian berbasis riset, teknologi, dan inovasi baik di sisi hulu maupun hilir, 2) pengembangan pertanian terintegrasi (hulu hilir), 3) pengembangan pertanian berkelanjutan, 4) penguatan kemandirian pengelolaan pertanian, 4) perbaikan di sisi hulu atau produksi terutama dalam menjamin biaya produksi pertanian tidak lebih besar dari pendapatan yang diterima oleh para petani/nelayan, 5) regenerasi pelaku sektor pertanian, 6) perluasan diversifikasi produk pertanian, 7) pengembangan pertanian berbasis korporasi, 8) penguatan sistem distribusi produk pertanian, 9) peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha sektor pertanian, 10) penguatan perlindungan terhadap pelaku usaha sektor pertanian.

Industri pengolahan

Sektor industri pengolahan di Kabupaten Pemalang menjadi salah satu sektor penyumbang terbesar pada perekonomian Kabupaten Pemalang. Untuk itu, dalam dua puluh tahun ke depan kebijakan peningkatan produktivitas sektor ini menjadi penting dalam upaya akselerasi peningkatan perekonomian daerah yang memiliki daya saing global maupun nasional. Arah kebijakan peningkatan produktivitas industri pengolahan di Kabupaten Pemalang dalam dua puluh tahun ke depan antara lain meliputi: 1) penguatan industri kecil dan menengah agar memiliki nilai tambah tinggi, 2) pengembangan industri berbasis teknologi, riset dan inovasi, dan ramah lingkungan (*green investment*), 3) pengembangan industri bahan baku lokal, 4) penguatan integrasi rantai pasok antarindustri didukung dengan ketersediaan infrastruktur konektivitas dan logistik pendukung industri, 5) peningkatan penyediaan infrastruktur pendukung industri pengolahan ramah lingkungan, 6) penguatan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha industri pengolahan agar lebih produktif, inovatif, dan kreatif, 7) digitalisasi industri pengolahan, 8) penciptaan iklim usaha yang sehat dan iklim kemitraan yang mendorong produktivitas industri pengolahan, serta 9) peningkatan penumbuhan kawasan industri/kawasan peruntukan industri baru.

Perdagangan

Salah satu sektor yang berkontribusi besar pada perekonomian daerah Kabupaten Pemalang adalah sektor perdagangan. Kebijakan penguatan sektor perdagangan Kabupaten Pemalang dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada 1) penguatan ekspor produk unggulan daerah, 2) pengurangan ketergantungan impor, 3) penguatan standarisasi produk-produk unggulan daerah sehingga mampu bersaing di pasar global dan nasional, 4) pengendalian harga dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat, 5) peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku sektor perdagangan untuk mampu menciptakan produk yang berdaya saing tinggi dan memasarkannya di pasar global maupun nasional, 6) penguatan iklim kemitraan pasar produk unggulan daerah, 7) penguatan sistem distribusi produk perdagangan,serta 8) penyederhanaan regulasi, penguatan kapasitas hukum, persaingan persaingan usaha,termasuk kelembagaan persaingan usaha.

UMKM dan Koperasi

Perekonomian Kabupaten Pemalang mampu tumbuh dan berkembang salah satunya ditopang oleh sektor UMKM dan koperasi yang dinilai mampu menghadapi goncangan pasar global dan nasional maupun dinamika global lainnya. Sektor ini juga mampu banyak menyerap tenaga kerja yang baik yang berpendidikan rendah sampai berpendidikan tinggi. Untuk itu, agar sektor ini ke depan tetap mampu berkontribusi tinggi pada perekonomian daerah didorong untuk lebih meningkatkan produktivitas agar memiliki nilai tambah lebih dan mampu bersaing secara global dan nasional. Arah Kebijakan yang diterapkan untuk penguatan sektor UMKM dan koperasi dalam jangka panjang antara lain meliputi: 1) peningkatan kualitas produk unggulan UMKM berbasis riset, inovasi, dan teknologi, 2) fasilitasi perluasan akses pasar, kemitraan, modal/pembiayaan inovatif, kemasan, standar produk, dan manajemen usaha, 3) akselerasi digitalisasi dan penggunaan teknologi bagi pelaku UMKM disertai dengan penyediaan akses internet dan teknologi yang memadai dan terjangkau, 4) peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM untuk mampu mengembangkan produk UMKM yang memiliki standar pasar,berbasis riset,inovasi,dan teknologi, 5) pengembangan wirausaha baru, 6) penguatan koperasi produksi sebagai konsolidator UMKM terutama bagi usaha mikro kecil, 7) perbaikan mekanisme pengawasan dan penjaminan koperasi simpan pinjam,dan 8) peningkatan kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia koperasi.

Pariwisata

Kabupaten Pemalang memiliki potensi pariwisata yang cukup tinggi yang mampu menarik kunjungan wisatawan sehingga mampu memberikan dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan mendorong perekonomian daerah. Untuk itu, pembangunan pariwisata ke depan menjadi penting sebagai bentuk upaya mewujudkan ekonomi Kabupaten Pemalang yang berdaya saing. Arah kebijakan pembangunan

pariwisata Kabupaten Pemalang dalam dua puluh tahun ke depan antara lain meliputi: 1) pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan, 2) penguatan promosi pariwisata berbasis digital, 3) peningkatan kualitas destinasi wisata berbasis klaster dengan perbaikan sarana prasarana destinasi wisata, 4) penguatan diversifikasi daya tarik pariwisata sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah seperti pemanfaatan keragaman sumber daya alam, budaya, kreativitas, dan olahraga berbasis digital, 5) peningkatan infrastruktur konektivitas antardestinasi wisata, 6) penguatan integrasi antardestinasi wisata, 7) penguatan kapasitas SDM pelaku pariwisata termasuk pelaku UMKM pariwisata, serta 8) penguatan fasilitasi kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata.

Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif saat ini menjadi salah satu sektor ekonomi yang mampu menjadi kekuatan baru untuk peningkatan perekonomian daerah Kabupaten Pemalang. Sektor ekonomi kreatif mampu menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang ditengah pelambatan pertumbuhan ekonomi secara global terutama pasca pandemi Covid-19. Pengembangan sektor ekonomi kreatif akan mampu menciptakan nilai tambah tinggi berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia dan berbasis ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi. Arah kebijakan di sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Pemalang dalam dua puluh tahun ke depan antara lain mencakup: 1) peningkatan kualitas sumber daya manusia ekonomi kreatif, 2) pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan ekonomi kreatif dan jejaringnya sampai tingkat desa, 3) peningkatan pemasaran dan promosi produk ekonomi kreatif, 4) pengembangan sistem pembiayaan dan pendanaan bagi pengembangan ekonomi kreatif, 5) penyediaan infrastruktur fisik dan nonfisik yang memadai dan terjangkau untuk mendukung pengembangan kreativitas, 6) peningkatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan warisan budaya lokal sebagai bahan baku usaha ekonomi kreatif, 7) pengembangan sistem regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif, 8) peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kreativitas dan perlindungan hak kekayaan intelektual, 9) pengembangan dan penguatan jejaring kabupaten/kota kreatif, 10) pengembangan dan penguatan desa kreatif terutama pada produk kreatif unggulan, serta 11) penguatan standarisasi produk dan praktek usaha ekonomi kreatif,

Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas semua sektor ekonomi daerah didukung dengan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan kompeten, adaptif, inovatif dan mampu menguasai pasar kerja. Guna meningkatkan produktivitas tenaga kerja agar mampu berkontribusi dalam peningkatan produktivitas ekonomi daerah, arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam dua puluh tahun ke depan antara lain: 1) penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia

industri, disertai dengan penguatan regulasi tentang vokasi, 2) penguatan keahlian dan kompetensi digital, riset dan inovasi, 3) penguatan sistem perlindungan tenaga kerja, 4) penguatan iklim ketenagakerjaan yang mendukung pasar kerja yang inklusif termasuk penerapan upah minimum yang berkeadilan, serta 5) penyediaan informasi pasar kerja dalam jangkauan luas berbasis digital terintegrasi dengan dunia usaha dunia industri.

PM 2. Penerapan Ekonomi Hijau

Perwujudan nilai tambah sektor ekonomi unggulan daerah di Kabupaten Pemalang dalam dua puluh tahun kedepan diarahkan dengan menerapkan prinsip ekonomi hijau yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Dengan menerapkan ekonomi hijau diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah tetap tinggi dan tetap sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup agar tetap lestari dan berkelanjutan. Penerapan *green economy* di Kabupaten Pemalang dilakukan dengan tujuan Pembangunan Rendah Karbon/*Low Carbon Development* (PRK/LCD) yang berketahanan iklim. PRK yang berketahanan iklim merupakan serangkaian strategi dan rencana kerja untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui aktivitas dengan emisi GRK maupun intensitas emisi GRK yang rendah, serta mengurangi penggunaan sumber daya alam. Kebijakan penerapan *green economy* dibagi dalam empat kelompok sebagai berikut: 1) penerapan *circular economy* secara bertahap dengan mentransformasikan dari *brown industry* menuju *green industry* baik untuk perusahaan besar, menengah, UMKM dan IKM, dengan mengadopsi prinsip-prinsip *circular economy* (R0-R9), yang dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu: a) membuat dan menggunakan produk dengan lebih cerdas (R0: *refuse*, R1: *rethink*, R2: *reduce*); b) memperpanjang usia pakai produk (R3: *reuse*, R4: *repair*, R5: *refurbish*, R6: *remanufacture*, R7: *repurpose*); dan c) mengambil manfaat dari material (R8: *recycle*, R9: *recover*), 2) penerapan konservasi energi agar lebih efisien dan mendorong transisi energi ke sumber energi terbarukan yang dicapai melalui pembangunan infrastruktur EBT, gerakan penghematan energi, desa mandiri energi berbasis potensi lokal yang terjangkau, inklusif, dan pendampingan energi, 3) pengembangan sistem transportasi umum massal yang andal, berkualitas, merata, terintegrasi dan terjangkau serta rendah emisi secara bertahap untuk meningkatkan peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum untuk mendukung peningkatan efisiensi penggunaan energi, 4) pengelolaan hutan lestari, lahan pertanian, lahan budidaya perikanan dan kelautan serta produk-produk turunannya secara berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan mendukung hilirisasi sektor pertanian, serta 5) pengembangan green financing dan penerapan *carbon pricing* untuk mendukung investasi dan produk-produk hijau.

PM 3. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global diharapkan akan semakin mendorong perekonomian daerah Kabupaten Pemalang lebih produktif dan tumbuh semakin optimal. Kebijakan terkait integrasi ekonomi domestik dan global di Kabupaten Pemalang dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada: 1) penguatan ekspor produk unggulan daerah, 2) pengurangan ketergantungan impor, 3) penguatan standarisasi produk-produk unggulan daerah sehingga mampu bersaing di pasar global dan nasional, 4) pengendalian harga dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat, 5) peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku sektor perdagangan untuk mampu menciptakan produk yang berdaya saing tinggi dan memasarkannya di pasar global maupun nasional, 6) penguatan iklim kemitraan pasar produk unggulan daerah, 7) penguatan sistem distribusi produk perdagangan, serta 8) penyederhanaan regulasi, penguatan kapasitas hukum, persaingan usaha, termasuk kelembagaan persaingan usaha. Kebijakan ini didukung dengan kebijakan percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang handal yang akan mendorong penguatan keterkaitan nilai tambah antarwilayah secara lebih terintegrasi.

PM 4. Stabilitas Ekonomi Makro

Perwujudan stabilitas ekonomi makro daerah Kabupaten Pemalang dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada kebijakan meliputi: 1) peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah, 2) penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, 3) sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional, 4) penguatan pengendalian inflasi daerah, serta 5) perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas.

Terwujudnya nilai tambah sektor ekonomi unggulan daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

Tabel V.1.
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan,
dan Target Terwujudnya Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	Baseline (2025)	Target			
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Terwujudnya nilai tambah sektor ekonomi unggulan daerah	PM 1. IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	Rasio PDRB Industri Pengolahan	22,68	23,29	24,09	24,90	25,92
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	5,76	6,02	6,36	6,72	7,18

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	Baseline (2025)	Target			
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	13	15	20	22	24
		Return on Aset (ROA) BUMD	1,49	2,05	2,93	4,16	6,46
		Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota	21.708.518	22.686.188	23.970.424	25.327.359	27.057.455
		Rasio kewirausahaan daerah	2,57	2,74	2,91	3,06	3,22
		Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	1,43	1,46	1,51	1,56	1,62
		Kapabilitas inovasi	3,25	3,33	3,43	3,53	3,65
	PM 2. Penerapan Ekonomi Hijau	Persentase Desa Mandiri	0,1462	24,0566	36,3208	48,1132	62,7358
	PM 3. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	12,15	12,38	12,63	12,76	12,91
		Disparitas Harga	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10
	PM 4. Stabilitas Ekonomi Makro	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0.36	0,36	0,36	0,39	0,39
		Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota Per PDRB					
		Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten/Kota Per PDRB					

5.2.2. Sasaran Pokok 2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing Yang Inklusif

Pencapaian sasaran tersebut dilakukan dengan memastikan penyediaan layanan dasar secara merata dan inklusif dalam rangka menjamin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat dan kecukupan ekonomi masyarakat sehingga tercapai manusia Kabupaten Pemalang yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing, dan semakin sejahtera. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya sumber daya manusia unggul dan berdaya saing yang inklusif difokuskan pada empat arah pembangunan beserta arah kebijakan meliputi sebagai berikut.

PM 5. Kesehatan untuk Semua

Hidup sehat adalah hak setiap individu masyarakat dan menjadi penting untuk dimiliki oleh setiap individu karena sehat menjadi salah satu prasyarat individu untuk mampu melakukan aktivitas baik aktivitas ekonomi, sosial, maupun budaya. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan produktif dalam perlindungan sosial yang berkesinambungan. Pelayanan kesehatan yang paripurna dan inklusif dilaksanakan sebagai

perwujudan kesehatan untuk semua. Arah kebijakan untuk mewujudkan pembangunan kesehatan untuk semua di Kabupaten Pemalang dua puluh tahun ke depan adalah: 1) perluasan upaya promotif preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan, 2) pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal, 3) peningkatan kualitas dan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan, 4) pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya, 5) penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan, 6) peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan, 7) pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, 8) perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, 9) pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, 10) percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting, 11) peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat, 12) percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan, 13) penyediaan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi, 14) penguatan riset, data, dan informasi, serta penerapan inovasi dan teknologi di bidang kesehatan, serta 15) penguatan sistem pengawasan obat dan makanan. Pelayanan kesehatan yang paripurna dan inklusif akan dicapai jika prasyaratnya dipenuhi yaitu tersedianya sumber daya kesehatan yang kuat, terlaksananya upaya kesehatan yang komprehensif, tersedianya regulasi untuk mendukung penyempurnaan sistem kesehatan, serta tersedianya ekosistem yang mampu memfasilitasi tumbuhnya industri kesehatan. Dampak peningkatan derajat kesehatan masyarakat harus dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang. Penerapan *health in all policies*, pemerataan kapasitas daerah, serta partisipasi masyarakat menjadi strategi kunci untuk menjamin pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh penduduk.

PM 6. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan menjadi hal penting yang berperan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menciptakan sumber daya manusia yang berakhlak, inovatif dan berdaya saing sehingga dapat terwujud masyarakat yang lebih sejahtera. Dalam mewujudkan kondisi tersebut, kebijakan pembangunan pendidikan Kabupaten Pemalang dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada mewujudkan Pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Guna mewujudkan Pendidikan yang inklusif dan berkualitas ditempuh dengan 1) konsolidasi kelembagaan dengan lebih menekankan pada perbaikan pola koordinasi internal institusi pendidikan, melibatkan sektor lain, serta

dengan memperkuat kerjasama lintas sektor, 2) solidasi stakeholder pendidikan lebih diarahkan pada peningkatan peran serta stakeholder dalam penyelenggaraan pendidikan dalam upaya membangun aliansi antara pendidikan, bisnis, dan pemerintah, 3) penguatan sinergi penyelenggaraan pendidikan, dan 4) perwujudan penyelenggaraan pendidikan berbasis tata kelola yang baik. 5) penguatan pendataan berbasis wilayah dan analisis kebutuhan yang dilakukan dengan menyusun data berbasis analisis situasi dan identifikasi pemetaan layanan pendidikan secara kewilayahan, 6) perluasan cakupan akses layanan pendidikan diarahkan pada penyediaan akses layanan pendidikan dengan penambahan prasarana sarana pendidikan sesuai standar nasional pendidikan maupun keterjangkauan pembiayaan pendidikan, 7) pemerataan akses layanan pendidikan yang diarahkan untuk pencegahan putus sekolah dan penanganan anak tidak sekolah termasuk penguatan sekolah inklusi, serta 8) perwujudan pendidikan inklusif 9) peningkatan digitalisasi pendidikan, dengan mendorong metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan 10) pencapaian hasil pembelajaran semakin berkualitas dengan peningkatan kemampuan numerasi, literasi dan pembinaan karakter.

PM 7. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

Arah kebijakan dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif di Kabupaten Pemalang meliputi: 1) peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal, 2) penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan, 3) pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang, serta 4) pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.

PM 8. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pemalang tanpa terkecuali sesuai tingkat kerentanan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif. Perlindungan sosial ditujukan untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan. Kebijakan perlindungan sosial untuk masyarakat Kabupaten Pemalang dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada: 1) perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien, 2) perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan,

bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan pemasangan instalasi listrik bersubsidi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat, 3) perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat, 4) pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, 5) percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi, 6) percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga, serta 7) peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.

Terwujudnya sumber daya manusia unggul dan berdaya saing yang inklusif Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

Tabel V.2.

Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing yang Inklusif Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	Baseline (2025)	Target			
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Terwujudnya Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing yang Inklusif	PM 5. Kesehatan untuk Semua	Usia Harapan Hidup	74,05	74,25	74,5	74,75	75,05
		Jumlah Kasus Kematian Ibu	72	62	52	42	30
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	13,5	11,5	9	6,5	5
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	90	92	94	97	100
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	90	92	94,5	97	100
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	89,5	91,5	94	96,5	99,5
	PM 6. Pendidikan Berkualitas yang Merata	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang) :					

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	Baseline (2025)	Target			
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		a. Literasi Membaca SD/Sederajat	72,49	74,14	74,39	74,64	74,94
		b. Literasi Membaca SMP/Sederajat	75,83	78,63	82,13	85,63	89,83
		c. Numerasi SD/Sederajat	62,27	66,27	71,27	74,64	82,27
		d. Numerasi SMP/Sederajat	69,06	71,46	74,46	77,46	81,06
		Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	84,39	100	100	100	100
		Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	7,06	7,35	7,71	8,1	8,75
		Harapan Lama Sekolah	12,80	13,40	14,15	14,89	15,79
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	4,1	4,5	5,0	5,5	6,1
	PM 7. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	62,1	62,14	62,19	62,24	62,3
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,485	0,565	0,665	0,765	0,885
	PM 8. Perlindungan Sosial yang Adaptif	Tingkat Kemiskinan	14,32	13,01	11,36	9,72	7,50
		Tingkat Pengangguran Terbuka	5,87	5,2	4,76	4,42	4,00
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	56,48	57,43	58,63	59,74	61,09
		Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	8,17	6,83	5,56	4,53	3,52
		Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)					
		Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan provinsi					

5.2.3. Sasaran Pokok 3. Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas, merata dan berkelanjutan membantu Kabupaten Pemalang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang memadai. Infrastruktur yang terdiri dari

konektivitas dan sarana prasarana dapat menjadi daya tarik investasi sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Kemudahan akses juga mendorong produktivitas dan mobilitas masyarakat di Kabupaten Pemalang.

Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas, merata dan berkelanjutan difokuskan pada dua arah pembangunan beserta arah kebijakan meliputi sebagai berikut.

PM 9. Transformasi Digital

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas, merata dan berkelanjutan dapat terwujud didukung dengan transformasi digital yang adaptif, inklusif, memberdayakan, berdaulat, dan berkelanjutan. Kebijakan transformasi digital dilaksanakan dengan membangun ekosistem digital tangguh yang diarahkan pada: 1) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok, 2) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis, serta 3) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).

PM 10. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu upaya untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi daerah adalah pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi menuju kota dan desa maju, inklusif, dan berkelanjutan. Kebijakan secara umum pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi terutama diarahkan pada: 1) pemantapan jalan dan jembatan sesuai standar merata di seluruh wilayah guna memperlancar distribusi barang dan jasa, 2) peningkatan keselamatan perjalanan transportasi, efisiensi sistem logistik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan pemantapan kualitas pelayanan transportasi terutama angkutan umum massal untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta penerapan transportasi ramah lingkungan, 3) penguatan pemenuhan dan pemerataan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, serta 4) penguatan implementasi penataan ruang terutama dalam perwujudan struktur ruang. Selanjutnya untuk semakin memperkuat pembangunan perdesaan terutama dalam upaya mewujudkan desa yang mandiri, kebijakannya diarahkan pada: 1) peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas SDM lokal, 2) pemenuhan dan pemerataan kebutuhan akses layanan dasar perdesaan, 3) penguatan peran lembaga perekonomian desa melalui optimalisasi potensial lokal desa, 4)

penguatan kerjasama kawasan perdesaan sebagai upaya pemerataan pusat pertumbuhan, serta 5) penguatan peran supra desa dalam penyelasaan pembangunan desa sesuai pembagian kewenangan.

Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas, merata dan berkelanjutan di Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

Tabel V.3.

Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	Baseline (2025)	Target			
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas, merata dan berkelanjutan	PM 9. Transformasi Digital	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet					
	PM 10. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	69,48	72,77	76,81	80,77	85,44
		Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	70	74	79	84	90
		Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	66,53	66,9	67,4	67,93	68,5
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	50,29	51,29	52,54	53,79	55,29
		Indeks kinerja sistem irigasi (IKSI) kewenangan Kabupaten/Kota	54	54	55	56	57

5.2.4. Sasaran Pokok 4. Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Bencana

Keberlanjutan proses pembangunan dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung yang dapat terwujud hanya apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dijaga, dipelihara, dan dilestarikan. Dengan terjaganya sumber daya alam dan lestariannya lingkungan hidup akan mengurangi potensi terjadinya bencana. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya ketahanan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan bencana difokuskan pada tiga arah pembangunan beserta arah kebijakan meliputi sebagai berikut.

PM 11. Lingkungan Hidup yang Berkualitas

Kebijakan dalam upaya terwujudnya lingkungan hidup berkualitas dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada: 1) penguatan

pengelolaan keanekaragaman hayati, sumber daya hutan, pesisir dan laut yang berkelanjutan, 2) pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan sampah terintegrasi hulu hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah, serta 3) penguatan penyediaan sarana air minum dan sanitasi aman bagi masyarakat.

PM 12. Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Upaya perwujudan ketahanan energi dan air di Kabupaten Pemalang dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada kebijakan: 1) peningkatan akses terhadap listrik kepada masyarakat tidak mampu, 2) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi, 3) mendorong percepatan aksi konservasi energi dari sisi pemanfaatan energi melalui penerapan manajemen energi di daerah, serta 4) penguatan pengelolaan sumber daya air. Selanjutnya, arah kebijakan untuk mewujudkan kemandirian pangan meliputi: 1) pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan, 2) penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan, 3) pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*), serta 4) peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu.

PM 13. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Dalam rangka memperkuat resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, kebijakan Kabupaten Pemalang dua puluh tahun ke depan diarahkan pada: 1) pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tanah longsor, kebakaran, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di daerah rawan bencana tinggi, serta 2) penguatan aksi pembangunan rendah karbon dan upaya adaptasi perubahan iklim.

Terwujudnya ketahanan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan bencana di Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

Tabel V.4.
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Bencana Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	Baseline (2025)	Target			
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Terwujudnya ketahanan sumber daya alam, lingkungan hidup dan bencana	PM 11. Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	63,84	65,1	66,67	68,25	70,14
		Timbulan Sampah Terolah	27,85	41,12	57,82	74,52	94,56

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	Baseline (2025)	Target			
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		di Fasilitas Pengolahan Sampah					
	PM 12. Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	82,06	84,55	88,86	89,75	90,83
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	28,51	34,51	42,01	49,51	58,51
	PM 13. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)	113	109	104	99	95
		Penurunan Emisi GRK	18554,5	23425	31347	41950	59507

5.2.5. Sasaran Pokok 5. Terwujudnya Ketahanan Budaya Daerah

Kabupaten Pemalang mewujudkan ketahanan budaya dalam menghadapi globalisasi. Penguatan terhadap nilai agama dan budaya pada masyarakat Kabupaten Pemalang dilakukan sebagai modal dasar pembangunan. Hal ini dilakukan untuk menjaga nilai agama, etika, dan norma yang berlaku dalam menghadapi arus perubahan. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya ketahanan budaya daerah difokuskan pada satu arah pembangunan beserta arah kebijakan meliputi sebagai berikut.

PM 14. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan

Masyarakat yang beragama maslahat dan berkebudayaan dapat menjadi identitas pada suatu wilayah. Kemajuan dan kelestarian budaya dapat dilakukan untuk memperkuat karakter masyarakat di Kabupaten Pemalang dalam memperkuat jati diri dan meningkatkan kesejahteraan melalui ketahanan budaya. Kemaslahatan beragama mampu menciptakan kerukunan serta toleransi antar umat beragama. Keterwujudan ketahanan budaya pada Kabupaten Pemalang.

Arah kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan budaya daerah di Kabupaten Pemalang meliputi: 1) peningkatan strategi pemajuan kebudayaan, 2) penguatan penanaman nilai-nilai budaya Jawa sejak dini dengan edukasi budaya Jawa mulai dari dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat terkecil, 3) internalisasi kurikulum kebudayaan Jawa di semua jenjang pendidikan, disertai peningkatan kualitas tenaga pendidik dalam implementasi budaya Jawa pada anak-anak sekolah, 4) edukasi di keluarga dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya untuk mengajarkan identitas Jawa Tengah melalui tutur kata sehari-hari, termasuk melakukan parenting untuk para orang tua terkait pembelajaran karakter masyarakat Jawa Tengah dalam kehidupan sehari-hari, 5) pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, kearifan lokal, tradisi, kesenian sebagai salah satu sumber perekonomian daerah, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, 6) penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat, 7) penguatan komitmen pemerintah dalam memperkuat pembentukan

karakter masyarakat Jawa Tengah yang salah satunya tercermin dari politik kebudayaan untuk memprioritaskan pendidikan kebudayaan dan kesenian untuk masyarakat Jawa Tengah, serta 8) pemantapan kohesi sosial melalui edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak dini.

Terwujudnya ketahanan budaya daerah di Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

Tabel V.5.

Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Terwujudnya Ketahanan Budaya Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	Baseline (2025)	Target			
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Terwujudnya Ketahanan Budaya Daerah	PM 14. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	100	100	100	100	100
		Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	59,27	66,05	68,09	71,03	74,01
		Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	40	45	50	55	60
		Jumlah pengunjung tempat bersejarah					
		Tingkat pemanfaatan perpustakaan	0,03	2,53	2,67	2,84	3,01
		Jumlah Kejadian Konflik SARA	n/a	0	0	0	0

5.2.6. Sasaran Pokok 6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Transformasi tata kelola menjadi penting dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif dan akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal. Transformasi tata kelola ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang dinamis dengan memperkuat pemerintahan yang semakin adaptif dan kolaboratif, dengan integritas yang semakin kuat. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih difokuskan pada satu arah pembangunan beserta arah kebijakan meliputi sebagai berikut.

PM 15. Regulasi dan Tata Kelola Berintegritas dan Adaptif

Kebijakan dalam rangka perwujudan regulasi dan tata kelola berintegritas dan adaptif di Kabupaten Pemalang dalam dua puluh tahun ke depan meliputi: 1) penguatan pelayanan publik yang cepat, tepat, berbasis digital, serta keterbukaan pelayanan pengaduan masyarakat (*open government*), 2) penguatan manajemen pemerintahan yang semakin adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada hasil, berbasis riset, dan risiko, 3) penguatan kelembagaan yang efektif, 4) penguatan pendapatan asli daerah dan sumber-sumber pembiayaan alternatif lainnya, 5) digitalisasi tata kelola pemerintahan, 6) akselerasi peningkatan kompetensi ASN melalui penguatan manajemen ASN dan manajemen talenta secara efektif dan efisien, 7) penyederhanaan regulasi dan penguatan penegakan hukum, 8) penguatan manajemen pengawasan yang independen dan berintegritas dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, 9) penguatan kolaborasi dan kerja sama antardaerah, antara daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka perwujudan cita-cita pembangunan daerah, serta 10) penguatan integritas setiap penyelenggara pemerintahan dan masyarakat termasuk partai politik.

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan dinamis Jawa Tengah tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

Tabel V.6.
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan,
dan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	Baseline (2025)	Target			
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	PM 15. Regulasi dan Tata Kelola Berintegritas dan Adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi	68,09	74,2	79,4	84,2	90
		Indeks Reformasi Hukum	60	75	85	92	98
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,00	3,25	3,5	3,75	4,10
		Indeks Pelayanan Publik	4,51	4,51	4,70	4,80	5,00
		Indeks Integritas Nasional	69,77	69,9	72,9	74,5	76,5

BAB VI

PENUTUP

RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang memuat visi, misi dan arah pembangunan dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 menjadi instrumen bagi keselarasan agenda pembangunan nasional, pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan pembangunan Kabupaten Pemalang. RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan pembangunan yang mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi sesuai karakteristik dan potensi yang dimiliki Kabupaten Pemalang. Dalam hal ini, penyusunan RPJPD harus mengacu kepada RPJPN agar terdapat acuan yang jelas, sinergi, dan menjamin keterkaitan dari setiap perencanaan pembangunan di tingkat daerah berdasarkan kewenangan otonomi yang dimilikinya berdasarkan *platform* RPJPN.

Dokumen RPJPD Kabupaten Pemalang 2025-2045 juga menjadi pedoman bagi calon bupati dan calon wakil bupati periode tahun 2025 sampai dengan 2030 dalam merumuskan visi, misi dan program prioritas yang akan menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berdimensi waktu satu tahunan.

RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 ditetapkan dengan peraturan daerah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya RPJPD periode berikutnya. Dalam kaitannya tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan untuk mengawal implementasi RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Kepala daerah terpilih (Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang) berkewajiban melaksanakan Peraturan Daerah tentang RPJPD ini dengan menjabarkannya dalam RPJMD sesuai tahapannya. Menyesuaikan dengan urusan dan kewenangan pemerintah Kabupaten dalam penjabarannya pada semua dokumen perencanaan pembangunan daerah.
2. Peraturan Daerah tentang RPJPD ini harus disosialisasikan secara luas kepada seluruh instansi pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan (*stakeholder*) agar dapat dipahami secara mendalam serta menjabarkannya sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang, masyarakat dan swasta secara bersama-sama mendukung konsistensi implementasi RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, juga melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap konsistensi penjabaran dalam dokumen selanjutnya, terutama kaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang.

4. Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menyusun RPJPD mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah, serta melakukan penyerasian dalam RPJMD dan menjadi acuan dalam proses perencanaan anggaran yang dituangkan dalam APBD.
5. Dalam rangka implementasi RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045, Bappeda berkewajiban untuk menjabarkan RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 ke dalam RPJMD Kabupaten Pemalang sesuai dengan periode berkenaan yang menjabarkan lebih lanjut visi, misi dan agenda kepala daerah serta berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan secara terukur, terarah dan dapat dilaksanakan pada tahapan rencana pembangunan jangka menengah lima tahunan, termasuk secara kreatif dan inovatif mendesain program-program terobosan dan prioritas sebagai upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Pemalang.
6. Unit satuan kerja vertikal setingkat maupun lembaga-lembaga lokal non pemerintah atau lembaga internasional pemerintah dan non pemerintah yang melakukan kegiatan di Kabupaten Pemalang berkewajiban melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk menyerasikan dan menjamin konsistensi terhadap RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045.
7. Pemerintah Kabupaten Pemalang melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 melalui Bappeda Kabupaten Pemalang.
8. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka Panjang. Hal yang dilakukan melalui pemantauan, supervisi dan penilaian hasil pelaksanaan RPJPD guna menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang telah dipedomani.

Keberhasilan RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 sangat tergantung pada komitmen, konsistensi dan partisipasi dari penyelenggara pemerintahan Kabupaten Pemalang. Pengendalian dan evaluasi secara berkala harus dilakukan dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga arah pembangunan dalam jangka panjang tetap dalam jalur sebagaimana telah ditentukan dengan arah kebijakan dan sasaran pokok yang sekurang-kurangnya harus dicapai tiap lima tahun.

Kaidah perumusan kebijakan pembangunan daerah adalah perumusan rancangan teknokratik dan penyusunan rancangan awal rencana pembangunan Daerah yang meliputi rancangan awal RPJPD, rancangan teknokratik dan rancangan awal RPJMD serta rancangan awal RPPD. Pada tahun 2043 Pemerintah Kabupaten Pemalang mulai menyusun Evaluasi RPJPD 2025-2045. Sesuai amanat pasal 298 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ayat (3) bahwa hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Pemalang digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD periode berikutnya, serta dapat dijadikan acuan Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk menyusun RPJMD Teknokratik.

Tahun 2044 Pemerintah Kabupaten Pemalang diharapkan menyusun dokumen RPJMD Teknokratik atau dokumen perencanaan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai dasar penyusunan visi, misi, dan program calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada dan diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Pemalang sebagai ketua tim. Pada saat penyusunan RKPD 2046 Pemerintah Kabupaten Pemalang berpedoman kepada visi, misi kepala daerah terpilih dan/atau dokumen perencanaan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

BUPATI PEMALANG

MANSUR HIDAYAT, S.T.